

(KEPMENDAGRI NOMOR 400.8.2-5484 DUKCAPIL TANGGAL 30 DESEMBER 2022)

KEMENTERIAN DALAM N GERI REPUBLIK INCONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT JENDERAL KEPE DUDUKAN DAN PENCATATAN SIFIL



DIREKTORATIENDERALKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya penyusunan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8.2-5484.DUKCAPIL Tanggal 30 Desember Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil yang mana lampirannya menjadi Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil, dapat diselesaikan dengan baik. Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil ini memberikan gambaran tentang penjelasan umum, sejarah dan regulasi dari peristiwa penting serta persyaratan, tata cara, formulir hingga hasil pelayanan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Buku petunjuk teknis ini disusun dengan mengacu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan yang berlaku saat ini, dengan harapan dapat mempermudah, mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan khususnya dalam bidang pelayanan pencatatan sipil.

Petunjuk teknis ini akan menjadi acuan karena memuat pengaturan secara komprehensif semua peristiwa penting yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Besar harapan kami, buku petunjuk teknis ini dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh seluruh pemangku kepentingan dan memberikan kontribusi nyata dan positif bagi perkembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia.

> Jakarta, 30 Desember 2022 Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Disektur Jenderal Kependudukan dan

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Prof Dr. Zudan Arif Fakrolloh, SH. MH



Secual dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 400.8.2-5484. Dukcapil TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi baik secara pengetahuan maupun keterampilan bagi petugas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Teknis Unit Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota serta Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Wilayah NKRI, juga sebagai langkah optimalisasi dan peningkatan Sumber Daya Manusia, melalui pemberian kemudahan, kecepatan dan akurasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu adanya petunjuk teknis pelayanan pencatatan sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475):
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang Undang tentang Administrasi Nomor 23 tahun 2006 Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184):

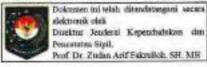
- 4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
- 5. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun Pelayanan Administrasi 2019 tentang Kependudukan Secara Daring (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 108 Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Pemndaftaran Penduduk dan Tata Cara Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789i;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790].

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TEKNIS PELAYANAN PENCATATAN PETUNJUK SIPIL.
- : Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil, KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- Pelayanan Pencatatan Sipil KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman dalam pelayanan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota serta Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Wilayah NKRI.
- : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal KETIGA ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal, 30 Desember 2022

an. MENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);

Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;

6. UNICEF Indonesia.

Sound dergen personagen, verdangen yang berlaka, dakumon ini bilah ditendatangan) secana deleterah yang lemantifikasi oleh Rela Sertifikas Dideronit (SS-C) sehingga bilah diperlakan tenda tangan dan Manpel bosah

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 400.8.2-5484.DUKCAPIL TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PENCATATAN SIPIL



KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PETUNJUK TEKNIS

PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR FORMULIR	v
DAFTAR ISTILAH	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	2
C. Dasar Penyusunan Petunjuk Teknis	
D. Metode Penyusunan	
E. Pemantauan dan Evaluasi Penerapan	
BAB II SEJARAH PENCATATAN SIPIL	5
A. Masa Pemerintahan Hindia Belanda	
B. Masa Pasca Kemerdekaan Sampai dengan Diterbitkannya Undang-Undang	
Nomor 23 Tahun 2006.	6
C. Masa Saat Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sampai	
Dengan Sekarang	7
D. Universalitas Pencatatan Sipil	
BAB III JENIS PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	13
A. Pencatatan Kelahiran	
Dasar Hukum Pencatatan Kelahiran	. 14
Pencatatan Kelahiran di Wilayah NKRI	
Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI	
Lampiran Formulir Pencatatan Kelahiran	
B. Pencatatan Lahir Mati	
Dasar Hukum Pencatatan Lahir Mati	39
Pencatatan Lahir Mati	
Lampiran Formulir Pencatatan Lahir Mati	
C. Pencatatan Perkawinan	42
Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	
Pencatatan Perkawinan di Wilayah NKRI	
Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI	
Lampiran Formulir Pencatatan Perkawinan D. Pencatatan Pembatalan Perkawinan	50
Dasar Hukum Pencatatan Pembatalan Perkawinan	04
Pencatatan Pembataian Perkawinan Pencatatan Pembataian Perkawinan	
Lampiran Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan	56
E. Pencatatan Perceraian	57
Dasar Hukum Pencatatan Perceraian	
Pencatatan Perceraian di Wilayah NKRI	57
Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah NKRI	. 59
Lampiran Formulir Dalam Pencatatan Perceraian	
F. Pencatatan Pembatalan Perceraian	
Dasar Hukum Pembatalan Perceraian	65
Pencatatan Pembatalan Perceraian	65
Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Perceraian	67
G. Pencatatan Kematian	68
Dasar Hukum Pencatatan Kematian	., 68
Pencatatan Kematian di Wilayah NKRI	
Pencatatan Kematian di Luar Wilayah NKRI	72

Lampiran Formulir Dalam Pencatatan Kematian H. Pencatatan Pengangkatan Anak	
Dasar Hukum Pencatatan Pengangkatan Anak	
Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI	
3. Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRI	80
 Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengangkatan 	
Anak	84
I. Pencatatan Pengakuan Anak	86
Dasar Hukum Pencatatan Pengakuan Anak	86
Pencatatan Pengakuan Anak di Wilayah NKRI	87
Pencatatan Pengakuan Anak di Luar Wilayah NKRI	90
 Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengakuan Anal 	k 93
J. Pencatatan Pengesahan Anak	97
Dasar Hukum Pencatatan Pengesahan Anak	98
Pencatatan Pengesahan Anak di Wilayah NKRI	98
3. Pencatatan Pengesahan Anak di Luar Wilayah NKRI	102
 Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengesahan An 	ak 105
K. Pencatatan Perubahan Nama	109
Dasar Hukum Pencatatan Perubahan Nama	
Pencatatan Perubahan Nama	109
Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Perubahan Nama	110
L. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	111
Dasar Hukum Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI di	
Wilayah NKRI	112
3 Pencatatan Peruhahan Status Kewarnanegaraan Bagi Anak Hasil	
Perkawinan Campuran	115
Pencatatan Perubahan Status kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Luar Wilayah NKRI	118
Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Perubahan Statu Kewarganegaraan	us
M. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya	126
Dasar Hukum Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya	
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya	
Lampiran Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya	127
N. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil	
Dasar Hukum Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil	
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil	
 Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pembetulan Akt 	a
Pencatatan SipilO. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	131
Dasar Hukum Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Berdasarkan Penetapan	22811-27230256
Pengadilan 3. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Penetapan	131
	422
Pengadilan (Contrarius Actus)	133
Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Pembatalan Akt	
Pencatatan Sipil	
P. Pencatatan Perjanjian Perkawinan	
Dasar Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan	135
Pencatatan Perjanjian Perkawinan Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Perjanjian Perkawinan	135
3 Formulir Vang Digungkan Dalam Pencatatan Perjanjian Perkawinan	137

Q. Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak Memiliki	
Dokumen Keimigrasian141	1
Dasar Hukum Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang	
Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian141	1
Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak Memiliki	
Dokumen Keimigrasian141	1
Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Peristiwa Penting	5
Bagi Orang Asing yang Tidak Memiliki Dokumen Kelmigrasian	7. 1
R. Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar Negeri	٠
Dasar Hukum Pencatatan Peristiwa Penting dari Luar Negeri	į.
Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar Negeri	
 Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Pelaporan 	
Peristiwa Penting dari Luar Negeri	3
BAB IV PENYELESAIAN MASALAH PENCATATAN SIPIL	7
BAB V PENUTUP	2

DAFTAR GAMBAR FORMULIR

Formulir 1 - Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengan Kode F-2.01
Formulir 2 - Surat Keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, dengan Kode F-2.03
Formulir 3 - Surat Keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri dengan Kode F-2.04
Formulir 4 - Register akta kelahiran, dengan kode F-2.14
Formulir 5 - Kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah
Formulir 6 - Kutipan akta kelahiran anak dari ayah dan Ibu, dengan frasa
Formulir 7 - Kutipan akta kelahiran anak seorang ibu
Formulir 8 - kutipan akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya
Formulir 9 - Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI, dengan kode
F-2.0237
Formulir 10 - Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, Kode F-2.2638
Formulir 11 - Surat Keterangan Lahir Mati, kode F-2.0541
Formulir 12 - Register Akta Perkawinan, dengan kode F-2.1551
Formulir 13 - Kutipan Akta Perkawinan, dengan kode F-2.2152
Formulir 14 - Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kode F-2.26
Formulir 15 - Catatan pinggir pembatalan perkawinan, dengan kode CP.0156
Formulir 16 - Surat keterangan pembatalan perkawinan, dengan kode F-2.0656
Formulir 17 - Register Akta Perceraian, dengan kode F-2.16
Formulir 18 - Catatan Pinggir Pencatatan Perceraian, dengan kode CP.22
Formulir 19 - Catatan Pinggir Pencatatan Perceraian, dengan kode CP.02
Formulir 20 - Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara
Kesatuan, dengan kode F-2.26
Formulir 21 - Catatan pinggir pembatalan perceraian, dengan kode CP.0367
Formulir 22 - Surat keterangan pembatalan perceraian, dengan kode F-2.0967
Formulir 23 - Register Akta Kematian, dengan kode F-2.17
Formulir 24 - Kutipan Akta Kematian, dengan kode F-2.23
Formulir 25 - Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara, dengan kode F-2.26
Formulir 26 - Catatan pinggir mengenai pengangkatan anak pada register akta
kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak, dengan kode CP.0484
Formulir 27 - Surat Keterangan Pengangkatan Anak WNA oleh WNI di Luar Wilayah NKRI
Formulir 28 - Surat Pernyataan Pengakuan Anak, dengan kode F-2.1093
Formulir 29 - Register akta pengakuan anak, dengan kode F-2.1894
Formulir 30 - Kutipan akta pengakuan anak, dengan kode F-2.2495
Formulir 31 - Catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan
akta kelahiran, dengan kode CP.05
Formulir 32 - Catatan Pinggir Pencatatan Pengakuan Anak Berdasarkan Penetapan
Pengadilan96
Formulir 33 - Register akta pengesahan anak, dengan kode F-2.19
Formulir 34 - Kutipan akta pengesahan anak, dengan kode F-2.25
Formulir 35 - Catatan pinggir pencatatan pengesahan anak, dengan kode CP.07 106

Formulir 36 - Catatan Pinggir Pencatatan Perubahan Nama, kode CP-2.09110	5
Formulir 37 - Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA menjadi	
WNI, dengan kode CP-2.10121	
Formulir 38 - Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI menjadi	
WNA, dengan kode CP-2.11122	-
Formulir 39 - Catatan Pinggir Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang Telah	
Mendapatkan Sertifikat Bukti Pendaftaran, dengan kode CP.12122	-
Formulir 40 - Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih	
kewarganegaraan (WNI atau warga negara asing), dengan kode CP-2.13	
Formulir 41 - Catalan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih	6
kewarganegaraan, dengan kode CP.14123	
Formulir 42 - Surat permohonan pelepasan kewaganegaraan	
Formulir 43 - Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan dengan kode F-2.28 125	
Formulir 44 - Catatan Pinggir Perubahan Peristiwa Penting Lainnya, dengan kode CP-	
2.15	
Formulir 45 - Catatan Pinggir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, dengan kode CP-2.16	1
130	
Formulir 46 - Catatan Pinggir Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	
Berdasarkan Penetapan/Putusan Pengadilan, dengan kode CP-2.17134	-
Formulir 47 - Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan, dengan kode F-2.07	
137	~
Formulir 48 - Surat Keterangan Perubahan/Pencabutan Perjanjian Perkawinan,	1
dengan kode F-2.08	
Formulir 49 - Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Sebelum dan Pada	-
Saat Dicatatkan Perkawinan Pada Register dan Kutipan Akta	
Perkawinan, dengan kode CP.19139	
Formulir 50 - Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan Selama Dalam Ikatan Perkawinan	-
Pada Register dan Kutipan Akta Perkawinan, dengan kode CP.20	-
Formulir 51 - Catatan Pinggir Perubahan/Pencabutan Perjanjian Perkawinan Pada	
Register dan Kutipan Akta Perkawinan, dengan kode CP.21	- 7
Formulir 52 - Surat Keterangan Pencatatan Sipil Bagi Orang Asing yang Tidak Memiliki	-
Dokumen Keimigrasian, dengan kode CP-2.13143	
Formulir 53 - Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil, dengan kode F-2.12146	1
Formula 55 - Surat Neterangan Felaporan Fericalatan Sipil, dengan kode 1 - E. IE	-
	13
	-
	10
	-
	10
	-
	13
	-
	1
	200

DAFTAR ISTILAH

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
- Penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
- Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
- Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- 11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan

- kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 12. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
- Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
- 16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
- 18. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 19. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 20. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
- Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK,
 adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan

- komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
- Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- 23.Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
- 24. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada instansi pelaksana

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain¹. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana².

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah alamat untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal terbatas. Peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, termasuk pengangkatan, pengekuan, pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan penting dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat publik maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudahan bagi penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya serta untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya serta tata kelola pemerintahan yang baik, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan

Republik Indonesia, Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1, Ayat 1

¹ Republik Indonesia, Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1, Ayat 15

Sexual dengan perundang - undangan yang beriaku, dokuman ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSril) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan atempel basah

Sipil menyusun Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan pencatatan sipil. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan serta Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjadi pedoman dalam penyusunan Buku Juknis Pelayanan Pencatatan Sipil ini. Titik kritis dalam penyusunan buku petunjuk teknis ini adalah bagaimana mendorong terbangunnya keserasian terkait proses dan pelaksanean pelayanan pencatatan sipil sehingga terurai secara jelas dari proses pendaftaran hingga hasil pelayanan pencatatan sipil yang didapatkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan buku petunjuk teknis ini sebagai pedoman pelaksanaan terkait pencatatan sipil.

B. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran penyusunan buku petunjuk teknis pelayanan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis pelayanan pencatatan sipil adalah:

- Sebagai panduan agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;
- Memberikan pedoman pelaksanaan dalam hal pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pelayanan pencatatan sipil.

Sasaran

Sasaran dari penyusunan petunjuk teknis pelayanan pencatatan sipil ini adalah:

- Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungiawab dalam pelayanan pencatatan sipil;
- b. Memberikan standar yang sama dan terukur bagi petugas di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, UPT Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan petugas pada kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam pelayanan pencatatan sipil.

C. Dasar Penyusunan Petunjuk Teknis

Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

D. Metode Penyusunan

Metode penyusunan petunjuk teknis ini menggunakan pendekatan yuridis yang berbasis kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, kemudian diuraikan dalam sebuah bisnis proses untuk setiap peristiwa penting dalam pelayanan pencatatan sipil.

E. Pemantauan dan Evaluasi Penerapan

Pelaksanaan penerapan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, hendaklah dipantau proses penerapannya, guna mengetahui apakah petunjuk teknis tersebut dapat dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai prosedur. Masukan-masukan hasil pemantauan dari setiap petunjuk teknis merupakan bahan evaluasi untuk penyempurnaan atau revisi terhadap petunjuk teknis, Revisi petunjuk teknis dimaksud adalah melakukan penyempurnaan sesuai kebutuhan dan kondisi aktual dalam pelaksanaan petunjuk teknis ini.

10 10000000000

BAB II SEJARAH PENCATATAN SIPIL

A. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pencatatan sipil adalah pencatatan terhadap peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam buku register pencatatan sipil yang dilakukan oleh Negara. Peristiwa penting yang harus dicatat adalah peristiwa yang dialami oleh penduduk yang membawa akibat terjadinya perubahan hak-hak keperdataan maupun lahirnya hakhak keperdataan atau hapusnya hak-hak keperdataan, sehingga yang dicatat adalah setiap peristiwa yang dialami seseorang dengan tujuan peristiwa itu dapat diketahui dengan jelas.

Dalam dokumen Burgerlijke Stand (BS) pada arsip nasional menunjukkan bahwa pencatatan sipil di Hindia Belanda sudah ada sejak tahun 1623 dan terakhir tahun 1866. Berasal dari daerah Batavia, Java, Semarang, Pasuruan, Surabaya, Makassar, Ternate, Amboina, Meester Cornelis, Benkulen, Banjarmasin, Selebes, Gorontalo, Menado dan Timor. Terdiri dari dokumen: rouwbrieven (surat nikah/kawin), Geboorte (kelahiran) dan naturalisatie (naturalisasi) yang bersumber dari catatan-catatan Gereja (Kerk).

Lembaga pencatatan sipil di negeri Belanda sebenarnya berasal dari Perancis, lembaga ini telah ada sejak revolusi perancis. Catatan sipil di Perancis pada waktu itu diselenggarakan oleh pendeta yang dalam hal ini sebelum abad ke 18 dimana telah menyediakan daftar untuk perkawinan, kelahiran, kematian dan lainnya.

Pencatatan sipil di Perancis diberlakukan di Belanda dan wilayah penjajahan Belanda, termasuk Hindia Belanda. Di Batavia (Jakarta sekarang) catatan sipil telah ada sejak 1820, meskipun secara de jure tahun 1850 yang disesuaikan dengan kedudukan Kota Jakarta itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya hanya diperuntukkan kepada keperluan beberapa penduduk saja.

Pemberlakuan catatan sipil oleh pemerintah Belanda tersebut sesuai dengan politik hukum pemerintah dan penggolongan penduduk di Hindia Belanda sesuai dengan Pasai 131 Jo Pasai 163 Indische Staatsregeling. Menurut ketentuan tersebut penduduk di Hindia Belanda dibagi dalam 3 (tiga) golongan penduduk, dengan pemberlakukan hukum yang berbeda pada masing-masing golongan.

Sebagai akibat dari politik dari pemerintah Hindia Belanda maka aturan Catatan Sipil di Indonesia yang berlaku bagi penduduk tidak seragam aturan hukumnya yaitu:

 Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië, Staatsblad 1847:23).

- Peraturan pencatatan sipil untuk Golongan Eropa (Reglement op het Stand voor Europeanen, Staatsbiad 1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsbiad 1946:136)
- Peraturan pencatatan sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean, Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136).
- Peraturan pencatatan sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement op het Houden van de Registers van den Burgerlijken Stand voor Eenige Groepen v.d niet tot de Onderhoringer van een Zelfbestuur, behorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927:564).
- Peraturan pencatatan sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Huwelijks ordonnantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboyna, Staatsblad 1933;74 jo Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1939:288).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154).

Berdasarkan ketentuan di atas pemerintah Hindia Belanda belum memperhatikan secara serius mengenai pencatatan sipil bagi orang-orang yang beragama Islam. Ketentuan pencatatan sipil bagi orang-orang beragama Islam baru diberlakukan setelah Indonesia Merdeka yaitu melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi WNI yang beragama Islam.

B. Masa Pasca Kemerdekaan Sampai dengan Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Setelah Indonesia merdeka, pencatatan sipil masih dikuasai atau dilaksanakan oleh Pemerintah Hindia Belanda atas nama sekutu dengan mendasar kepada staatsblad tahun 1945 nomor 14, Staatsblad 1947 nomor 37, Staatsblad 1947 nomor 164. Burgerlijke Stand (BS) kemudian diubah menjadi Catatan sipil pada tahun 1950. Setelah berdirinya Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan penyelenggaraan administrasi kependudukan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005, sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

C. Masa Saat Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sampai Dengan Sekarang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk baik yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Indonesia.

Berbagai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan. Menjamin kebebasan memeluk agama dan memilih tempat tinggal, meninggalkannya dan berhak kembali.

Dalam pemenuhan hak penduduk terutama di bidang pencatatan sipil masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan kepada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku keturunan dan agama. Karena berbagai peraturan produk belanda yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam sistem administrasi kependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi tersebut dikarenakan pemerintah tidak memiliki sistem database yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan.

Memperhatikan kondisi tersebut diatas pemerintah kemudian membentuk suatu administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang optimal. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administ. Si kependudukan yang disahkan tanggal 29 Desember 2006 diundangkan tanggal 29 Desember 2006 serta dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, serta penjelasan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674. Dengan disahkannya Undang-Undang ini, merupakan suatu momentum babak baru pengaturan Administrasi Kependudukan yang bersifat nondiskriminatif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mencabut berbagai ketentuan yang mengatur Administrasi Kependudukan yaitu:

- Buku kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23).
- Peraturan pencatatan sipil untuk Golongan Eropa (Reglement op het Houden der Registers van den Burgerlijken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849: 25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1946: 1361).

 Peraturan Pencatatan Sipil untuk golongan Cina (Bepalingan voor Geheel Indonesia Betreffende het bungerlijken handelsreche van de chinezean Staatsblad 1917-129 jo Staatsblad 1939-288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946-136).

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berlakulah ketentuan hukum positif adminduk yang merupakan landasan hukum bagi pelayanan administrasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang administrasi kependudukan ini melahirkan beberapa peraturan pelaksanaan yang merupakan penjabaran pasal-pasal dari undang-undang tersebut. Merujuk pula kepada undang-undang tersebut, penyelenggaraan pencatatan sipil ditujukan bagi seluruh penduduk, baik Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing. Selain itu penyelenggaraan pencatatan sipil di Indonesia juga melayani bagi Orang Asing yang bukan penduduk, sesuai asas universal dari pencatatan sipil.

D. Universalitas Pencatatan Sipil

Pembangunan sistem pencatatan sipil telah menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya program internasional untuk mempercepat perbaikan sistem pencatatan sipil dan sistem statistik vital yang disahkan oleh Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dan 1991, Program ini dirancang oleh 4 (empat) badan dalam lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni Divisi Statistik (United Nations Statistics Division/UNSD), Dana PBB untuk Kependudukan (United Nations Population Fund/UNFPA), Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dan Institut Internasional Pencatatan Sipil dan Statistik Vital (International Institute for Vital Registration and Statistic).

Tujuan program internasional ini untuk mempercepat perbaikan sistem pencatatan sipil dan sistem statistik vital guna mendorong negara-negara berkembang melaksanakan program reformasi jangka panjang untuk meningkatkan sistem pencatatan sipil dan statistik vital di negara masing-masing. PBB memberikan perhatian yang sedemikian besar terhadap perbaikan sistem pencatatan sipil, dikarenakan perbaikan pada sistem ini akan menjadi landasan sistem hukum untuk menegakkan hak asasi manusia warga negara, terutama hak-hak sipil.

Salah satu output Program Internasional tersebut yaitu diterbitkannya Buku Panduan tentang Sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Vital (United Nation Handbook On Civil Registration and Vital Statistic Systems) yang disusun atas hasil beberapa lokakarya yang diselenggarakan di berbagai kawasan dunia selama kurun waktu sekitar 5 (lima) tahun (1991-1995), yaitu di Buenos Aires (1991), Damaskus (1993), Beljing (1993), Addis Ababa (1994) dan Rabat (1995).

Dalam perkembangannya Buku Panduan tentang Sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Vital tersebut menjadi pedoman bagi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam membangun dan mengembangkan Sistem Pencatatan Sipil yang disesualkan dengan karakteristik masing-masing negara.

Dasar Hukum

Sebagai sistem yang bersifat universal, pencatatan sipil dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB secara lintas negara berdasarkan Kaidah Universal. Dasar hukum universal penyelenggaraan pencatatan sipil, antara lain:

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948
 Pasal 25 ayat (2), bahwa semua anak, baik yang lahir di dalam maupun di luar perkawinan harus mendapat perlindungan sosial yang sama.
- b. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966, Pasal 24 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 2005, diatur bahwa:
 - Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh sebuah nama.
 - Setiap anak berhak memperoleh suatu kewarganegaraan.
- c. Konvensi HAK Anak (KHA) Tahun 1989
 Berisi 54 Pasal yang melindungi 31 (tiga puluh satu) hak anak, termasuk:
 - 3) Hak untuk mendapatkan nama.
 - Hak untuk mendapatkan identitas.
 - 5) Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
- d. Konvensi tentang Izin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan, 1962.
- e. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965.
- f. Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979

- 2. United Nations Handbook on Civil Registration and Vital Statistic System.
 - Dilengkapi dengan 5 (lima) buah buku yaitu :
 - Pengelolaan, operasionalisasi dan pemeliharaan.
 - b. Penyiapan kerangka hukum.
 - c. Komunikasi, informasi dan edukasi.
 - d. Komputerisasi.
 - Kebijakan dan protokol pengeluaran catatan pribadi dan pencatatannya dalam arsip.

3. Prinsip Dasar Pencatatan Sipil Secara Universal

Universalitas Sistem Pencatatan Sipil perlu ditekankan sejak awal dalam pembangunan sistem pencatatan sipil di Indonesia, agar proses dan outputnya diakui oleh negara-negara lain. Pencatatan atas peristiwa penting yang dialami penduduk, diselenggarakan oleh seluruh negara di dunia, oleh karena itu disebut universal. Dalam bentuk yang sederhana, universalitas pencatatan sipil diwujudkan dengan berlakunya akta catatan sipil yang diterbitkan oleh sebuah negara di negara lain.

Dalam pengertian yang lebih komprehensif, universalitas pencatatan sipil dapat dilihat dari 5 (lima) aspek, yaitu kaidah, asas, fungsi, norma dan metode, sebagalmana diuraikan di bawah ini:

a. Kaidah

Penyelenggaraan pencatatan sipil didasarkan pada kaidah internasional di bidang hak asasi manusia. Kaidah utama ialah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang dinyatakan pada tahun 1948 (DUHAM 1948). DUHAM 1948 merupakan induk instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang menurunkan dua kovenan yakni Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dalam DUHAM 1948 kaldah tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat (2) bahwa semua anak, baik yang dilahirkan didalam maupun diluar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama. Kaidah serupa juga diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, terutama Pasal 24 yang menyatakan bahwa setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh sebuah nama dan berhak atas suatu kewarganegaraan.

Kedua kovenan tersebut ditindaklanjuti dengan Konvensi tentang Hak Anak pada tahun 1989. Jika DUHAM 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik hanya mengatur norma pokok dari hak asasi manusia, maka Konvensi Hak Anak mengikat setiap negara yang telah meratifikasinya, disertai dengan sejumlah sanksi bagi pelanggaran terhadapnya.

Konvensi Hak Anak berisi 54 (lima puluh empat) pasal yang melindungi 31 (tiga puluh satu) hak anak, terutama hak untuk mendapatkan nama, hak untuk mendapatkan identitas dan hak untuk mendapat kewarganegaraan. Dalam konteks pencatatan sipil, pemenuhan hak-hak ini dilaksanakan dalam bentuk pencatatan kelahiran.

Selain instrumen internasional bidang hak asasi manusia yang terkait dengan pencatatan sipil tersebut, terdapat pula Buku Panduan tentang Sistem Pencatatan Sipil dan Sistem Statistik Vital (United Nation Handbook On Civil Registration And Vital Statistic Systems) yang diterbitkan oleh PBB pada tahun 1998 yang memberikan rekomendasi komprehensif bagi perbaikan sistem pencatatan sipil di negara negara berkembang.

b. Asas

Penyelenggaraan pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan asas universal, permanen, wajib dan terus menerus, yaitu:

1) Universal

Asas universal berarti pencatatan sipil harus diselenggarakan atau menjangkau seluruh wilayah kedaulatan negara dan semua penduduk bagi semua peristiwa penting.

2) Permanen

Asas permanen berarti pelaksanaan pencatatan sipil harus diselenggarakan dengan sebuah sistem yang permanen. Institusi yang menyelenggarakan pencatatan sipil harus bersifat permanen untuk menjamin kontinuitas pelayanan.

3) Wajib

Asas wajib berarti pemerintah wajib menyelenggarakan pencatatan peristiwa penting dan penduduk atas perintah hukum wajib melaporkan setiap peristiwa penting pada jangka waktu tertentu.

Terus-menerus

Asas terus menerus atau berkelanjutan berarti pencatatan sipil harus dilakukan tanpa jeda waktu sejak sistem diberlakukan. Dari operasional sistem yang berkelanjutan ini akan dihasilkan data peristiwa penting yang lengkap, akurat dan mutakhir.

c. Fungsi

Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan 3 (tiga) fungsi pencatatan sipil dalam setiap penyelenggaraannya, yaitu:

1) Fungsi Hukum

Pencatatan sipil memberikan kepastian hukum atas status keperdataan seseorang dan perubahannya melalui akta catatan sipil yang diterbitkannya.

2) Fungsi Statistik

Pencatatan sipil merupakan sumber data terbaru berkaitan dengan peristiwa penting yang dialami seseorang. Data peristiwa penting akan berguna untuk menyusun data statistik negara yang dapat menggambarkan demografi, kecenderungan penduduk dan karakteristiknya serta tren arah perubahan sosial yang terjadi.

Fungsi Kerjasama

Pencatatan sipil secara timbal balik menyediakan data bagi lembaga yang memerlukan untuk kepentingan pelayanan publik.

d. Norma

Norma dalam penyelenggaraan pencatatan sipil meliputi 5 (lima) bagian besar yakni:

- Pengelolaan, operasionalisasi dan pemeliharaan;
- Penyiapan kerangka hukum;
- 3) Komunikasi, informasi dan edukasi
- Komputerisasi;
- Pengarsipan dokumen dan tata cara pengeluaran data individu. Disamping itu PBB juga mengembangkan Pedoman tentang Prinsip Dasar dan Rekomendasi untuk Sistem Statistik Vital.

e. Metode

Berdasarkan rekomendasi dari PBB bahwa metode yang digunakan dalam pencatatan sipil adalah metode registrasi. Metode registrasi ini meliputi proses yang terdiri dari:

- 1) Pelaporan yang berisi pengakuan dilengkapi dengan bukti-bukti.
- 2) Proses verifikasi pengakuan dan validasi bukti dokumen
- Proses pencatatan (hal ini termuat dalam register dan kutipan pencatatan sipil)
- Pencetakan dokumen pencatatan sipil

BAB III JENIS PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

A. Pencatatan Kelahiran

Definisi anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak mempunyai hak yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Berkaitan dengan peranan negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill) dan menghormati (to respect) hak-hak anak. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengamanatkan bahwa Negara pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlindungan dan pengakuan negara terhadap penentuan status pribadi dan status hukum salah satunya melalui pencatatan peristiwa kelahiran memberikan pengakuan hukum dari negara terhadap identitas, silsilah dan kewarganegaraan seseorang, yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kelahiran yaitu akta kelahiran. Dikarenakan merupakan pengakuan negara, maka pencatatan kelahiran dilaksanakan berdasarkan hukum positif ketentuan perundang-undangan, penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan kebijakan nasional. Selain itu manfaat lain dari kepemilikan akta kelahiran meliputi sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya Ijazah, dokumen persyaratan untuk masuk sekolah TK sampai perguruan tinggi, melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI, pembuatan KTP-el, Kartu Keluarga dan NIK, pembuatan SIM, pembuatan paspor, pengurusan tunjangan keluarga, pengurusan warisan, pengurusan beasiswa, pengurusan pensiun bagi pegawai, melaksanakan pencatatan perkawinan, melaksanakan ibadah haji, pengurusan pengakuan anak dan pengesahan anak, pengurusan pengangkatan anak/adopsi dan manfaat lainnya. Adapun pencatatan kelahiran meliputi pencatatan kelahiran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

1. Dasar Hukum Pencatatan Kelahiran

a. Pencatatan Kelahiran di Indonesia

- Pasal 27 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
 - Keterangan: Pasal 27 ayat (1) telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
 Keterangan: Pengaturan dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan Perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2006.
- Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) dan Pasal 34, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5), Pasal 44 ayat (1) dan
 (2) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.
- Pasal 4 ayat (1), (2) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat
 (1), (2) dan ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun
 2019.

b. Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Republik Indonesia

- Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- 2) Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat
 (1), (2) dan ayat (3) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

c. Pencatatan Kelahiran di Atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

- Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1),
 (2) dan (3) dan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
 Tahun 2006.
 - Keterangan: Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) telah diubah sedangkan ayat (2) telah dihapus dalam Undang-Undang Nomor 24 Thn 2013
- Pasal 32 Ayat (1), (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Keterangan; Pengaturan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) merupakan Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

2. Pencatatan Kelahiran di Wilayah NKRI

Proses pencatatan kelahiran di dalam wilayah NKRI dilaporkan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili yaitu dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga pada Kartu Keluarga, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pencatatan Kelahiran Penduduk WNI3

1) Persyaratan Pencatatan Kelahiran Penduduk WNI

Pencatatan kelahiran penduduk WNI dalam wilayah NKRI dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum dan lain sebagainya;
- Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah;
- c) Fotokopi Kartu Keluarga dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- d) Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya;
- e) Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi formulir dengan kode F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a) dan dalam penggunaannya tidak perlu memakai materai karena formatnya telah diatur dahm peraturan perundang-undangan;
- f) Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi formulir kode F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b) dan dalam penggunaannya tidak perlu memakai materai karena formatnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2) Tata Cara Pencatatan Kelahiran Penduduk WNI

Pencatatan kelahiran penduduk WNI dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, yaitu tempat penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai

³ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, Bab II, Pasal 33

anggota keluarga pada Kartu Keluarga (KK). Pencatatan kelahiran penduduk WNI, dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.
 - Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 dengan menyerahkan persyaratan;
 - (2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli, untuk pelayanan online/daring persyaratan yang di scan/di foto untuk diunggah harus aslinya, WNI melampirkan fotokopi Kartu Keluarga untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01, WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01,

- (3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- (4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;
- (5) Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada pemohon.
- b) Melalui Petugas Registrasi Desa/Kelurahan.
 - Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta menyerahkan persyaratan;
 - (2) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
 - (3) Petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi, kepada petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran;
 - (4) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

- (5) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- (6) Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
- (7) Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

b. Pencatatan Kelahiran WNI Bukan Penduduk⁴

1) Persyaratan Pencatatan Kelahiran WNI Bukan Penduduk

Pencatatan kelahiran WNI bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a) Fotokopi surat keterangan kelahiran;
- Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/ perkawinan lainnya; dan
- Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia dan/atau dokumen perjalanan orang tua; atau
- fotokopi surat keterangan pindah luar negeri.

2) Tata Cara Pencatatan Kelahiran WNI Bukan Penduduk

Pencatatan kelahiran WNI bukan penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota tempat terjadinya peristiwa kelahiran, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta menyerahkan persyaratan, termasuk untuk pelayanan secara daring/online.
- b) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
- Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
- d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;
- e) Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada pemohon.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, Bab II, Pasal 33

Pencatatan Kelahiran Bagi Orang Asing⁵

1) Persyaratan Pencatatan Kelahiran Bagi Orang Asing

Pencatatan kelahiran bagi Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum.
- Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah;
- c) Fotokopi dokumen perjalanan;
- d) Fotokopi KTP-el orang tua atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan;
- e) Orang asing dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a) dan dalam penggunaannya tidak perlu memakai materai karena formatnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- f) Orang asing dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b) dan dalam penggunaannya tidak perlu memakai materai karena formatnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,

2) Tata Cara Pencatatan Kelahiran Bagi Orang Asing

Pencatatan kelahiran bagi Orang Asing pemegang izin kunjungan dilakukan di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota tempat terjadinya peristiwa kelahiran, sedang bagi Orang Asing pemegang izin tinggal tetap dan orang asing pemegang izin tinggal terbatas dilakukan di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota tempat Orang Asing berdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta menyerahkan persyaratan;
- Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Sepublik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, Bab II, Pasal 33

- c) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
- d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; Catatan;
 - Pencatatan kelahiran bagi orang asing yang tidak terdaftar sebagai penduduk, akta kelahirannya diterbitkan tanpa NIK.
- e) Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

d. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Kelahiran di Wilayah NKRI

Formulir yang digunakan dalam pencatatan kelahiran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari:

- Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengan kode F-2.01.
- Formulir kelengkapan pemenuhan persyaratan pencatatan kelahiran yang terdiri dari:
 - a) Surat keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, dengan Kode F-2.03;
 - Surat keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, dengan Kode F-2.04;
- 3) Formulir hasil pelayanan pencatatan kelahiran, terdiri dari:
 - a) Formulir register akta kelahiran, dengan kode F-2.14
 - Formulir kutipan akta kelahiran, dengan kode F-2.20. Terdiri dari 4 (empat) jenis formulasi kalimat kutipan akta kelahiran, sebagai berikut:
 - (1) Formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan nama orangtua anak dari Ayah dan Ibu.
 - (2) Formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah namun belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan tetapi status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukkan hubungan perkawinan sebagai suami isteri, (hal ini dapat dilihat dalam Kartu Keluarga orang statusnya sebagai kawin belum tercatat dan/atau di Kartu Keluarga anak pada kolom 16 sudah tercantum nama ayahnya) dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak Ayah dan Ibu dengan

- frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan tetapi status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga tidak menunjukkan hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan nama anak dari Ibu.
- (4) Formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, yang disebut anak yang tidak diketahui asal usulnya dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orangtua.

3. Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI

Kelahiran WNI di Luar Wilayah NKRI dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ⁶.

- a. Pelaporan Hasil Pencatatan Kelahiran WNI yang Telah Dicatatkan di Negara Setempat
 - 1) Persyaratan Pelaporan Hasil Pencatatan Kelahiran

Kelahiran WNI yang telah dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan memenuhi persyaratan berupa;

- Fotokopi kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat;
- Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia orang tua.
- 2) Tata Cara Pelaporan Hasil Pencatatan Kelahiran

Kelahiran WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan tata cara sebagai berikut:

 a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 serta menyerahkan persyaratan;

⁶ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, Bab II, Pasal 35

- b) Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
 Catatan;
 - Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tidak menarik kutipan akta kelahiran dari negara setempat asli, untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang di scan/di foto untuk diunggah harus aslinya, fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.02.
- Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat bukti pelaporan;
- e) Surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.
- Pencatatan Kelahiran WNI di Luar Wilayah NKRI dalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Kelahiran Bagi Orang Asing
 - 1) Persyaratan Pencatatan Kelahiran WNI di Luar Wilayah NKRI

Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Fotokopi keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang di negara setempat;
- b) Fotokopi dokumen perjalanan republik Indonesia orang tua; dan
- c) Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah.

2) Tata Cara Pencatatan Kelahiran WNI di Luar Wilayah NKRI

Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan;
- b) Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
 Catatan:

Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang dari negara setempat dan buku nikah/kutipan akta perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tidak menarik keterangan ketahiran dari instansi yang berwenang dari negara setempat asli, untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang di scan/di foto untuk diunggah harus aslinya, fotokopi dokumen perjalanan RI diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.02.

- Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
- e) Kutipan akta kelahiran disampalkan kepada Pemohon.

Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI

Kelahiran WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan menggunakan formulir sebagai berikut:

- Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI, dengan kode F-2.02.
- Formulir hasil pelayanan pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah NKRI setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, berupa surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.26.

Pencatatan kelahiran WNI pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing menggunakan formulir sebagai berikut:

- Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI, dengan kode F-2.02.
- Formulir hasil pelayanan pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, berupa register akta kelahiran dengan kode F-2.14 dan kutipan akta kelahiran dengan kode F-2.20.

4. Lampiran Formulir Pencatatan Kelahiran

Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode
 F-2.01

Product Malaystechnia Malaystechnia Macanstan Deschlolation Kode Willaysh Jenis Pelaponan Percusatan Sipil Xelation Lath Mala Perbasinan Protocolate Perbasinan Percusatan Fernandan Fernandan Fernandan Fernandan Fernandan	PORMULIK PELAPORAN PESICATIKTAN SIPIL SI DALAM WILATAH SIKKI Pengalium Atal. Pengalium Atal. Pendaman Maria Pendaman Maria Pendaman Maria Pendaman Pen
DATA PELAPOR	
Harris 60K Normo Dokumen Ferjalange* Normo Karla Kaleurga	
Keepgaregason	
DATA SUBJEK ARTA KISSATU	
Name	
No	
Solar Dokumen Nepalanan* Nomen Kash Kalanga	
Sewagan-pasan	
DATA SAKERI Hama Hair. Mamini Furth Kaleunga Mamininganapanan DATA KARSII W	
Name and American	
NORY Fails Resurge	
Revorginage and	
DATA DENING TO A PROPERTY OF	
Pleme Ryski	sertiner percentation helicitime, later and disc demolical
Temper Later Assets	
Tanggai Lahri Ayah	19 84 194
Kesaparepasai Nata ba	
NK Na	
Temps Latin tou	
Tengol Latri bu Konegongeson	79 86 Thi
DATA ANNE 1. None	
2. Jack Kiramin	1 INILIS 2 Promptor
Tempat Statistian Tempat Inlation	1. RSPE 1 Paterna 1. Policie 4 Rundi E Lainqu
5. Fen derranggeltatil 6. Palek	Hell Spi Bell Swi
T. Aris Teatres	1 Target 2 Santar2 3 Nanca 3 4 Kontar4 5 Lainne
E. Sistincle	T 1/2
Perconglatation Desirate	1 Date 2 StarPears 1 Date 4 Lamps
11. Petargtay	

YANG LAHR BATT					
Lamanyo datan fandungan	Balan .				
2 Aeris Issiento	1 1616	2. Perempu	an .		
3. Tenggal left/ mail.	7gt 69c	Tim			
4. Janickelohown	1. Tunggel				
5. Anakke	EV		A material	4 0000	& Lames
6. Tempat dilinikan	1. RS/RB	2. Puskovste	1 Polister 1 Datus	4. Former 4. Lorenye	e Pande
7. Pendong kelahiran	1. Dolner	BidenFerenal	A. Dance	w. Linesys	
8. Sebat land mall	t. Dieter	2. SchnFarent	1. Tesaga Nes	4. Kepdaten	S. Lahreya-
9. Yang monortulus	- Diesis	2 3007000	a londarion	110.725.00	120,000
15. Termini kalahiran PERKAMBAN ATAU PEMBATALAH PERI	CVMNAN				
5. NIK Ayah dad Swarel	2000				
2. Nome Ayah dan Suami	1				
3. NIK lou died Sownii	1				
6. None the dari Souni	1.				
s. Microsociali	1.				
 Name Ayat Gari bibli 	Ť.				
7. MEC Du CME BAS	T				
E. Hams for day hit! E. Sama Podawinan kebelam Kawin	Keele	Golden Kawitt	Devi Hirtor	Certif	Mag
10. Pertuning yang fin-	4 3775		110000000000000000000000000000000000000		
Ti. Issi yang Po-					
(ting) yang poligami()	100 0000			-	
12. Taregai Perderlatan	196	Bis: The			
Pedawina				and the same of th	
13. Tanggal Melapor	- tel	Bit: This		1	
14. Jam Pelapima	1 1 1			r	7
15. Agens	1 blan	2 Natur 3 Nati	M 4.Hodu	5.Bodha	1. Exceptación
16. Keperayaan					111
17. Nama Organisasi					
Keperseyeen					1 1 1
16. Narra Pergadilan	2 100				-
S. Sonor Penertaper Penyadist					
Perguitter				7	
20. Tanggal Prostapan	(p:	Sh: TW:			
Perçeditor					
21. Mania Poesuka Agamai.					
Kapercayaan				1	
22. Noner Synt Izin					
dat Perwinter				1	
23. Norse Passpot				1	
26 Pegapan Potawisan				-	
dibust cleb Hotels				-	
25. Homor Alda Hoturbs				1	
26. Tanggal Akta Notonir					
27. Jurish Arok (jiki ada agar					
mengital formular tambutuan nama					
Anali dan akta kelahkan anak)	Section 1997				
Eagl Personne Perdetalen Pertentren I	temp Mergiel Date di banch ini:			-	
Targgal Polumenan	Tgl	BM This:		- property	
2. Nonor Atta Perturknin					
3. Tanggal Alda Perkawksan	Tø:	Be To		-	
4. Nana Pergadian	1 000				
S. Nonce Publish Regulation					
 Targget Poteste Pongadilan 	Tg/:	Se Ta		-	
7. Tanggal Polapotan Perkawinen	Tgi:	Ba: Thi:		-	
di Lair Regeri	NAME OF THE OWNER.	ne Asset Singers and	to the same	147	
PERCERAIAN ATAU PENBATALAN FER	CERAJAN				
Yang mangajukan percentan/pombatata					
1. Noner Atta Pertuelitan					
Z. Targati Atla Putewhen	14	Bh: The			
3. Tempor Precotator Pediawhan					
6. Hams Progedier	100 - 100 - 100	10 mm = 10 mm 10			
5. Terggal Pubusar Porquition	19	Bh: The:			100
6. Horsor Putusan Pengadian					
7. Nonor Sunt Kelerangan Parltera				1 9	
Pergadian					_
8. Targest Sund Katamapan	19	Die: The:			
Panitera Ferspadlan	V 20 V 9 9 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-1-14.0	-	
9. Tanggal Nelsper	ty .	Dis The			
Bagi Penohos Psettataka Percetaka H	tern Marylei Sets of Season Self-	The state of the s			
	and the same of transmitted			TITI	1
Nonor Alta Peneralan	100	Six Tim:	1		-
Yanggal Akta Percensian	19	ge Tro		7	
3. Targgal Pelaporan	T#	mi.	-	_	
Possensias dan Luar Trigoti					
KEMATIAN					
l. 98K				1 1 1 1	111
2. Nama longkap	Terr	Be The	1111		
Torggal terration	18	100		_	
4 Polisi	1 044 144 174	and property	con Personal	3 Kecelskii	
5 Setub kernaturi	1. Salit bloss i tius 4. Kinnington		nut Ovi	5 Latriya	-
B. Sansatanada	- C. Potrymatuk	1 1 1 1 1 1		- C 140-11	
t. Toepaliterator	1 Date	2 Tomage Karehelper	7. Copolician	4.14	mys
7. Tary reinerargist	1. Dester	To the separation of the	T refresher		7

PENGLAGOUTAN ANNA	V-2	United Section	WARRIE TOWN		
1. Nemo atrok argitati	- []]	1111			1 1 1 1 1
2. Nomor ara hoptirar					
3. Terggol@denTatue	Tel:	Do:	The		
Perentition Alto Keshisan	_			1	
4. Dines Kabupatre/Koo yang	- 1 - 1 - 1				
Minorbitum Atto Kouteran					
5. Name to Senting					
NK Ibu Kanduig					
T. Hevergeregation					
Nanu. Fyth Kenturg					
ii. NK Ayah Kandung					
10. Kesangaregasse	1.3.3				
11. Narva ibu Angket					
12. RK file Anglasi					-
13. Noner Fospor					
14. Nehe Apah Angkat					
15. NK Ayes Angles		+			11111
16. Namer Pospor		-			17
IT. Natu Pergedien		++++	-		
	1				
13. Tanggal Peretapan Fengadian	Tal	Shr	Tier:		
19. Honor Federayan Pengadian					
30. Hieral londags Penetapan Pengadian					
21. Tempat ierataga Ponetapas Pongetilan					
PENGARIANI ANDR.	100	11.0	THE STATE OF THE S	A - U.S. De - Systil.	War
L. Nemor Alto Kalahinan	1				
I Tanggal-Bulan Cahun	19:	Ble	Zie:		Y4345
Princibitan Alba Kolumbran	(Caraties)	United Services			
I Dinar Kabupater/Kots yang	1 5 1 1				
Menerbitists Atta Kelanean	_				
4. Tanggalillulan/Lation	Tyc.	- Bh	The I		
Kilohirar Arak					
t. Targosifisian/Taken	Tgi:	Fit.	Ter I		
Pekewinai Agana		DITTE LA CONTRACTOR			
ii. Nano for flanding					
1. NK builandung					
Sneepengaser In Kenning					+
S. Nama Ajah Xandung 16. NW Ayah Kandung					
TI. Kewergeneganen Ayen Kendong	1				
Tanggal Penetopan Pengadian	1	-			
13. Notice Penetagen Pengadika					
14. Nama lembaga Pongadilan	9				
PENSESAHAN ANAK					
T. NOTION MORNING					-
Tanggai-Bulan/Tahur	To.	1			-
Penelbbir Akti Kalaniwi		1 200			
Dina KatupatesKon yang					
Trimerbitkon Alica Kalahiran					
4. Tergopi/BalonTahus	Tel:	T Sec. I	The Late		
Kelahian Angs	70 = 20	-			
5 Tanggal Sulson Talnur	Tel I	1 to 1	The Committee		
		-		-	
PERSONNEL AGRESS					T
Pekawiran Aganul it. Hover Tanggarbaan Tasus		The state of the s			
	Tg:	Shi	The :		On the second
 Horer Tanggarbaan/Tatur Akta Perturahan/Suku Hikuti 	Tg:	Sh	The		
Hover Tenggarbuan Tamar Akta Pentanhan Buku 16kat Nana Iba Kandung NK bu Kandung	Tg.	Sh	The:		шш
Hover Tanggirbuen/Tanse Also Pediadran/Suls Mikes Tanse Ne Kanding NK Ibu Kanding Kewangangangan No Kanding	Tg.	Sh	Tim		
Hover Tanggiebber Tatter Act Pertuakrantilyus tölust T Mana tils Kandang NK Iba Kandang NK Iba Kandang NA Iba Ayah Kandang	Tg:	Sh.	The:		
Hover Tanggirbuer/Tates Ass Persen'es(Sus Most None No Kandang NK four Kandang Kesanjanganan fou Kandang Kesanjanganan fou Kandang Na Kandang	1g	Sh	The		
Hover Tanggiribsen/Tates Add Pertue/resibus blass Name to Kandang NK bu Kandang Kesanganegaran tio Kandang Kesanganegaran tio Kandang Kesanganegaran Auto Kandang Name Ayah Kandang Name Ayah Kandang Nameganegaran Ayah Kandang Remeganegaran Ayah Kandang	Tg.	Sh	Ten:		
Hover TanggiebuerTraine Akts Pertuekranilijkus tökut T. Nama tils Kandang NK Iku Kandang Kesargangarian flo Kandang Maria Ayan Kandang Nelik Ayan Kandang Nelik Ayan Kandang Nelik Tanggiebuer					
Hover Tanggiebber Tatter Anne bit Kanding Nick bit Kanding Nick bit Kanding Keargangaran for Kanding Keargangaran for Kanding Nick Ayath Kanding	19	Sin Sin	The:		
Hover TanggiebuerTraine Akts Pertuekranilijkus tökut T. Nama tils Kandang NK Iku Kandang Kesargangarian flo Kandang Maria Ayan Kandang Nelik Ayan Kandang Nelik Ayan Kandang Nelik Tanggiebuer					
Nover Tanggiebuer Tatter Acts Pertuaknan Buku töhut T. Nore tile Kandang Nok Iku Kindung Kesargangaraan flu Kandang Kesarganggaraan flu Kandang Nore Ayah Kandang Nore Perdudung Reseguenggaraan Ayah Kandang Reseguenggaran Ayah Kandang Reseguengga					
Nover Tanggild Sen't Lane Nover Tanggild Select Note the Kanding Note the Kanding Note Kanding Note Kanding Nover Tanggild					
Nover Tanggild Sen't Lane Nore The Kanding No. In Kanding No. In Kanding No. In Kanding Keargangsram for Kanding Keargangsram for Kanding Nover Feedgam Progedien Nover Pendagan Progedien Nover Kanding Nover Revenue Pengadien Nover Kanding Nover Revenue Pengadien Nover Lane					
Homer Tenggishbush Timber Akts PentaukranSt, ku tiblus Name tib Kandang Nik Bu Kandang Kesarpanganan tib Kandang Kesarpanganan tib Kandang Nama Ajah Kandang Kesarpanganan Ajah Kandang Nama Ajah Ajah Kandang Nama Ajah Ajah Kandang Nama Ajah Ajah Kandang Nama Ajah Ajah Kandang Nama Lang Nama Lang Nama Lang					
Homer Tenggiebuer Tietner Akts Pentuekrantityku titkus Nama tie Kandung NK, Iba Kandung NK, Iba Kandung Nama Ayan Kandung Nama Pendugan Pengudian Nama Pendugan Pengudian Nama tendagai Pengudian Nama Lama Nama Lama Nama Lama Nama Man Nama Man Nama Man	Ng.				
Nover Tenggiébus Trans Akir Pertankrantikus tökut Naria ta Kandang Nik iba Kandang Kesarjanegaran flo Kandang Kesarjanegaran flo Kandang Naria Ayah Kandang Naria Ayah Kandang Naria Ayah Kandang Naria Kandang Naria Kandang Naria Kandang Naria Pendagan Pengadian Naria tendagai Pengadian Naria Kandanan Naria Cana Naria Kandanan					
Homer TenggishburyTister Akts PentankranSkub bilant Nama bir kandang Holl, bu Kandang Kenarpanganan tip Kandang Kenarpanganan tip Kandang Kenarpanganan Ayak Kanbung Kenarpanganan Pengadian Kenarpanganan Pengadian Kenarpanganan Pengadian Kenarpan Penasapan Pengadian Kenarpan Penasapan Pengadian Kenarpan Penasapan Pengadian Kenarpan Penasapan Kenarpan Pengadian Kenarpangan Pengadian K	The state of the s				
Hower Tenggiebuer Tather Akts Pertuekrantily to Miste T Mana the Kandang S NK Nos Kandang S Kesanganganian to Kandang S Kesanganganian to Kandang S Kesanganganian to Kandang S Kesanganganian Ayak Kandang S Kesanganganian Ayak Kandang S Kesanganganian Pengadian M Tanggar Penedapan Pengadian S Mana benbagai Pengadian S Mana benbagai Pengadian PRHUMANAMA Nama Lama Nama Daw Nama Paphitas/Mai Nama Ayakitas/Mai					
Homer Tenggiebuer Tatter Akts Pertuekrantilyku töket T Nama tils Kandang NK ikis Kandang Kesargangarian flo Kandang Kesargangarian flo Kandang Nama Ayan Kandang Nama Ayan Kandang Nama Ayan Kandang Nama Pertugan Pengadian Nama tentagai Pengadian Nama tentagai Pengadian PERI BARAKKAMA Nama Lama Nama Ayah Italiana					
Recover Tenggielbuer's rame: Acts Pertuelrant(bus 166a) Recover to Kandang Recover to Ka		59	Tiel		
Home TanggiebaerTate Atta Perisahanahijus titlus T. Nana tit Kandang Nik ito Kandang Nik ito Kandang Kesangangarian flo Kandang Kesangangarian flo Kandang Nik Ayah Kandang Nik Ayah Kandang Nik Ayah Kandang Nik Ayah Kandang Nik ito Pendagan Pengadian Ningal Pendagan Pengadian Nana tentaga Pengadian Nana tentaga Pengadian Nana tentaga Pengadian Nana Danu Nesan Danu Nesan Ayah Ito Malanah Nana Ayah Ito Malanah Nana Ayah Ito Malanah Nana Pendaganah unsuh Nik Rana Ayah Ito Malanah Nesan Ayah Ito Mal					

To the state of th
y = N 1
11,664,66 2 Personal
1 Jakob 2 Program
1g: 86: Thi:
10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
VLAXXII PROB
S Foldings 2/foldermer 3 Personale 4 Femilies 5 Fenganghalan Stud
E Práspasa Finança signasa M

Formulir 1 - Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengan Kode F-2.01 Surat keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, dengan Kode F-2.03

	YATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN DATA KELAHIRAN
Saya yang bertandatangan	dibawah ini:
Nama NIK	
Tempat/tanggal lahir	
Pekerjaan	
Alamat	T .
T. State Committee Committ	
menyatakan bahwa:	
Nama	x 1
NIK Tempat/tanggal lahi	r:
Anak ke *)	
Alamat	*
adalah anak kandung dari:	
Nama Ibu	t c
NIK	8
Tempat/tanggal lahir	8
Pekerjaan Alamat	2
yang lahir dengan penolon	n kelahiran:
Nama	y netal mail.
NIK	♦
4 410 4	8
Pekerjaan	•
Alamat	<u> </u>
Demikian surat pemyata: dikemudian hari ternyata p secara hukum sesuai de	: an ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses ngan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang yataan ini menjadi tidak sah.
Demikian surat pemyata: dikemudian hari ternyata p secara hukum sesuai de	emyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses ngan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang
Demikian surat pemyata: dikemudian hari ternyata p secara hukum sesuai de	emyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses ngan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang
Demikian surat pemyata: dikemudian hari ternyata p secara hukum sesuai de dilerbitkan akibat dari pemy Saksi I,	emyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses ngan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang yataan ini menjadi tidak sah.
Demikian surat pemyata: dikemudian hari ternyata p secara hukum sesuai de diterbitikan akibat dari pemy Saksi I,	emyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses ngan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang yataan ini menjadi tidak sah.
Demikian surat pemyata: dikemudian hari ternyata p secara hukum sesuai de dilerbitkan akibat dari pemy Saksi I,	emyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses ngan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang yataan ini menjadi tidak sah.
Demikian surat pemyata: dikemudian hari ternyata p secara hukum sesuai de dilerbitkan akibat dari pemy Saksi I, (NIK. Saksi II,	emyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses ngan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang yataan ini menjadi tidak sah.
Demikian surat pemyata: dikemudian hari ternyata p secara hukum sesuai de diterbitkan akibat dari pemy Saksi I, (NIK. Saksi II,	emyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses ngan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang yataan ini menjadi tidak sah.
Demikian surat pemyata: dikemudian hari ternyata p secara hukum sesuai de diterbitkan akibat dari pemy Saksi I, (NIK. Saksi II, (NIK.	emyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses ngan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang yataan ini menjadi tidak sah.
Demikian surat pemyata: dikemudian hari temyata p secara hukum sesuai de diterbitikan akibat dari pemy Saksi I, (emyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses ngan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang yataan ini menjadi tidak sah.
Demikian surat pemyata: dikemudian hari temyata p secara hukum sesuai de diterbitkan akibat dari pemy Saksi I, (emyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses ngan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang yataan ini menjadi tidak sah. "") Saya yang menyatakan,) am hal persyaratan berupa Surat Keterangan Lahir tidak

Formulir 2 - Surat Keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, dengan Kode F-2.03

 Surat keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, dengan Kode F-2.04

Baya yang bertandatangan dib	nawah ini
Nama	+70 (Aug 210-3) Europe 2 10-35 (Sell p 3-35
NIK	
Tempat/tanggal lahir	2
Pekerjaan	I
Alamat	*
nenyatakan bahwa:	N. Control of the Con
Nama	
NIK	I
Tempat/tanggai lahir	
Pekegaan	T recommendation amountment to the property
Alamat	
adalah suam/isteri*) dari:	
Nama	Tamooneon and a second contract contrac
NIK	1
Tempat/tanggal lahir	S
Pekerjaan	Commission of the commission o
Alamat	
Demikian surat pernyataan apabila dikemudian hari ternya	ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan ata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya
apabila dikemudian hari ternyo bersedia diproses secal perundangundangan dan dok	ata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya
apabila dikemudian hari ternyo bersedia diproses secal perundangundangan dan dok	ata pernyataan saya ini lidak benar, maka saya ra hukum sesuai dengan peraturan
apabila dikemudian hari terny- bersedia diproses secal perundangundangan dan dok penjadi tidak sah.	ata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya ra hukum sesuai dengan peraturan umen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini
apabila dikemudian hari ternyo bersedia diproses secal perundangundangan dan dok	ata pernyataan saya ini lidak benar, maka saya ra hukum sesuai dengan peraturan
apabila dikemudian hari terny- bersedia diproses secal perundangundangan dan dok penjadi tidak sah.	ata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya ra hukum sesuai dengan peraturan umen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini Saya yang menyatakan,
apabila dikemudian hari ternyo bersedia diproses secal perundangundangan dan dok menjadi tidak sah. Saksi I	ata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya ra hukum sesuai dengan peraturan umen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini Saya yang menyatakan,
apabila dikemudian hari ternyo barsadia diproses secal perundangundangan dan dok menjadi tidak sah. Saksi I (ata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya ra hukum sesuai dengan peraturan umen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini Saya yang menyatakan,
apsbila dikemudian hari ternyi bersedia diproses secal perundangundangan dan dok menjadi tidak sah. Saksi I (ata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya ra hukum sesuai dengan peraturan umen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini Saya yang menyatakan,

Formulir 3 - Surat Keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri dengan Kode F-2.04

d. Formulir register akta kelahiran, dengan kode F-2.14

		Warga Negara	NO
Nomor			
NIK	i		
hadir dib seorang p umur	adapan s pelapor be tahun, turahan en/Kota an bahwa ir seorang mpat ting turahan en/Kota i ini disak	tanggal aya Peja rrnama alamat	it tempat RT RW atan it tempat RT RW atan it tanggal pukul pukul Provinsi dar at tinggal Kelurahan Provinsi NIK
Setelah a pelapor d		iran ini dibacakan dan dijelask	an, ditandatangani oleh
	a tangan lapor,		
Pe			
Pe	lapor,		Kepala
Pe	lapor,		Kepala

Formulir 4 - Register akta kelahiran, dengan kode F-2.14

- e. Formulir kutipan akta kelahiran, dengan kode F-2.20
 - Kutipan akta kelahiran dengan penulisan anak seorang ayah dan ibu.



Formulir 5 - Kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

 Kutipan akta kelahiran dengan penulisan anak seorang ayah dan ibu dengan tambahan frasa.

Nomor Induk Kependudukan Personnel Registration Number



PENCATATAN SIPIL REGISTRY OFFICE

WARDA NEGARA NATIONALITY

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasakan Aida Kelahiran Nemor By virtue of Birth Certificate Number

that in

pada langga on date

on year

Man lahir.

anak ke

DARI AYAH FROM FATHER DANIBU AND MOTHER

yang perkawkunnya belum tercetat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kutigen ini dikeluarken Di The except is lesued sade langgal on date The sade

Peabat Pencetatan Spil Officer of Chil Registration

Formulir 6 - Kutipan akta kelahiran anak dari ayah dan Ibu, dengan frasa.

3) Kutipan akta kelahiran dengan penulisan anak seorang ibu.

Nomor Induk Kependudukan Personnel Registration Number



PENCATATAN SIPIL REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA NATIONALITY

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Bestaserkan Akta Kelahiran Nomor By virtue of Birth Certificate Number

that in

peda langgai on date

lation

totals labe

器器

FROM NOTHER

Kutipen in disclusion Di The except is issued

Tatan

Pejabat Penostatan Sipti Officer of Civil Registration

Formulir 7 - Kutipan akta kelahiran anak seorang ibu

4) Kutipan akta kelahiran tanpa penulisan nama ayah dan ibu

Nomer Induk Kependudukan Single Identily Number



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SPL REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA NATIONALITY

KUTIPAN AKTA KELAHPAN EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Arta Kelahkan Norror By withe of Dirth Certificate Number

hatwa di hat o

> tahun on year

pada tanggai on date

> teian lahir was dorn

Kutpen in disclusiven Di Transverpt is assed

peda tenggal on date

Tahun on year

Pejahat Pencatatan Sipi. Officer of Civil Registration

Formulir 8 - kutipan akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02.

	KOP SIGNAT WANTON PERMANALAH PERM	BLY NEORESA
John Driesten Frankrick East.	FORMULE POLANDIAN PENCATATAN SIPILD	CUAR WELVAMINOS Progistum Ands MVI yang berbenduk laggal di lasi VVII
Potavian Percelan Sanatan		Pergeates Asia till ying behingas Ingga di last Whill Pergeate Revisignings and St. Pendestria Arts
Pengangsatas Anak 1864 san	ANY.	Pulagorer Aria Percusaler Sipil Ser Segura Georgian
Sansa Sansa SK	ПППППП	Н
Nonce Datumer Proposes 61" Namer Kirks Kalanga Revergengeran		
EATA SUBJECTION		
MC Neon rists Heurige		
Kovárjanegesan Natie NK		
Marior Kirts Kircenge Khwenjanegarter		
BATH ORBANG TIGH Name Agen NOT Agen Temped Lafor Agen		
Tanggat Lahir Ayah Elimanganagarian haina iba NX Ibu Tanggat Lahir Iba	7g Br. So.	
Tengger (and the Kendingscopin	Ty 80 No.	
DATA SAKRET Name		
Mirror Karts, Kirisanga Karasagarangaran DATA, BASSA B		
Name NK Namer Kata Kalparpa Kawanjanagaman		
DATA ARRIC Name	Cultural I Swengur	
Jeria fisigetin Swepte distriction Swepte distriction National Swepter Swepter Fished	1 (361-36) 2 Patentina (164)	3 Rocks 4 Rock 5 Sample
Java salarase National to Euroloog laukings Best hay Perpeng keyi	AAAA memeri	2 Sendar 9 S. Salanga Man 6 Jalanga
PERCURSUS SIX Ayen dar Suerri		
Name Ayd: dari Suemi NK Bu-dari Suemi Name Su dari Suemi NK Ayde Sad Issa		
Name Hyst delites NK doublites Name to deliter		
Datus Perhandrat Sebalus Hands Rehandat yang/le- teti yang Nu-	Name Startum	Certs HKig Const Mail
(hig yes oligen)	1	

Fergal Personates	Tg De Per
Perkening	
Tanggal Welsoin	Te Bu Tus
Jam Polaposes	
Agents	1 Man 2 Khilen 2 Khilen 4 Hinds 5 Sulths 5 Sulths
Reperceyant	
Vales Organises	
Representation	
Varia Pergadier	
hearor Ferentapies Progadities	So I Be I The
Tanggal Penelapian	7 1 - 1 - 1 - 1
Pengedian Nama Pemala Agama'	
Rependent.	
Homor Sural Idn	
dari Persolitim	
Honor Paspot	
Perpension Parkawinan	
disust own Notaria	
Honox Akta Retaris	
Tanggal Alita Notamo	
Jumited Areals ((Nat sets)	
agar rawigsi fornsiir	
dendrative name analy den attackablese analy	
Stranger Par	
PLACIEUMA	
Yang mengejukan pemperian	
Yang mangapasan pemsesan Komor Akto Perksaanan	
Tenggal Also Fortune	Tal Bri Shir
Tempel Prevention	
Parkenings	
Name Pergadian	
Tangge Publish Pergettini	79 66 700
Notes Putann Peopulian	
Nomo: Sund Anteningan	
Pantera Pengaster.	
Panters Pengaliter. Tenggal Suna Kelesangan	7g De: Tel
Panters Pengalite: Tanggal Sura Keletangan Panters Pengalite:	
Panters Pengalite: Tanggal Sura Keletangan Panters Pengalite:	tg: 18: The 1
Panters Pengalite: Tanggal Sura Keletangan Panters Pengalite:	
Peritera Pengaliter Tanggal Sara Kelenangan Pantara Pengaditer Tanggal Metapor	
Parities Pengaliter Tanggal Sara Keleningan Parities Progettier Fanggal Melapor REMITIMA	7g
Profess Progedie: Tanggel Sola Selectingle: Parties Progedie: Tanggel Maleon REMATINAN NIX Namalengkep Tanggel Immelion	1g
Pyedera Pengaliter Tanggal Sura Teletrasjus Purdisar Prografier Tanggal Melapor REBILITAN NIX Namalangkap Tenggal semilion Pulsal	19
Profess Progedie: Tanggel Sola Selectingle: Parties Progedie: Tanggel Maleon REMATINAN NIX Namalengkep Tanggel Immelion	Tg
Profess Pengalite: Tanggal Jose Selensyle: Porthar Pengalite: Tanggal Malapor #ERRATMAN NIK Namalengkap Tanggal Isensition Pulsal Lodud Hamatan	19
Profes a Progedition Tanggel Gues Nelsonages Parties a Progedition Tanggel Melapor REMISTRAN SIX Vigora language Tanggel semalan Tanggel semalan Tanggel semalan Tanggel semalan Tanggel semalan	Tg: 56: Ton: Sg: 56: Ton: 1. Safe Hone-Star. 4. Namedian 5. Synch Dir. 5. Latings
Profes a Progedition Tanggel Gues Nelsonages Parties a Progedition Tanggel Melapor REMISTRAN SIX Vigora language Tanggel semalan Tanggel semalan Tanggel semalan Tanggel semalan Tanggel semalan	Tg
Pyritera Pengaliter Tanggat Suan Neleragian Pertikan Pengaliter Tanggat Matapor #Ematistat Not Notes Innglat Tanggat Immation Putual Social Nemetion Putual Tanggat Immation Putual Tanggat Immation Tunggat Imma	Tig: 66: Tim: Tig: 66: Tim: Tig: 66: Tim: 1. Sale New Year 1 Water Property 1. Sale New Year 1 Servic Dir. 1. Coller 2 longs Keetstate 1. Expension 4. Lalings
Profess Progedie: Tanggel Suita Nelsonages Parties Progedie: Tanggel Malacor REMATIAN NIX. Natra language Tanggel Inemation Pusial Bodol Nemation Tanggel Inemation Tanggel I	Tg: 66: Ton: Tg: 66: Ton: 15: 66: Ton: 15: 66: Ton: 1 Solid New Year 1
Profess Progedies Tanggel Suis Noticeague Profess Progedies Tanggel Melapor REBUSTAM SIX Vision language Tanggel Inmedia Tangg	Tig: Etc. Tite: Tig: Etc. Tite: 1. Call Name San 1. Value Propagat 1. Name attent 1. Call Name San 1. Value Propagat 5. Lakenge 1. Color 2. Songa Kasendan 1. Faprilarier 4. Lakenge 1. Mills
Protes a Proguéble Tanggel Suita Nelsonague Persian Proguéble Tanggel Malapor #BENITIAN NIX Nix Nixanalangiap Tanggel Isension Putual Double Nameten Tanggel Isension	Tig: 66: Tig: Sp
Profess Progedies Tenggel Sons Notemple Pertina Progedies Tenggel Malecor REMATIAN NOR Normal english Tenggel Inmedie Tenggel Inmedie Tenggel Inmedie Tenggel Inmedie Tenggel Inmedies Tenggel Internation	Tig: Etc. Tite: Spain Etc. Tite:
Protes a Progedier. Tenggel Sola Nelsoneger. Parties a Progedier. Parties a Progedier. Tenggel Melapor. #Emilitate Not. Volumi language Tenggel semation Polius Solad Nemetion Tenggel semation Tenggel Selection Tengg	Tig: Etc. Tite: Spain Etc. Tite:
Profess Frequition Proget Sura Nelsonages Proget Sura Nelsonages Proget Melacor REMITIAN VIX Vixanian glup Tenggel Melacor Remitian South Vernation Fund South Vernation Tempel Invention Tempel Temp	Tig: Etc. Tite: Spain Etc. Tite:
Profess Progedies Parget Core Noticeape Parget Progedies Parget Melapor REMATIAN SIX Volumi Inglas Proged Institute Parget Melapor Parget Melapor Parget Institute Parget Instit	Tig: Etc. Tite: Tig: Etc. Tite: 1. Call Name San 1. Value Propagat 1. Name attent 1. Call Name San 1. Value Propagat 5. Lakenge 1. Color 2. Songa Kasendan 1. Faprilarier 4. Lakenge 1. Mills
Proteira Frengation Langal Sura Kelonagan Partiera Prografiae Langal Melapor EEMITIAN SUR Vision Amplia Langal Installa Langal	Tig: Etc. Tite: Tig: Etc. Tite: 1. Call Name San 1. Value Propagat 1. Name attent 1. Call Name San 1. Value Propagat 5. Lakenge 1. Color 2. Songa Kasendan 1. Faprilarier 4. Lakenge 1. Mills
Proteins Frongation Tenggal Sons Kelenegan Parties Progedies Tenggal Melapor EBERTHAN Vor. Voltan Implies Tenggal Melapor EBERTHAN Vor. Voltan Implies Tenggal Immelian Tengga	Tig: Etc. Tite: Tig: Etc. Tite: 1. Call Name San 1. Value Propagat 1. Name attent 1. Call Name San 1. Value Propagat 5. Lakenge 1. Color 2. Songa Kasendan 1. Faprilarier 4. Lakenge 1. Mills
Profess Frengation Fengal Sons Kelenegan Fengal Sons Kelenegan Fengal Melapor Epintral Six Visit Sons Frengal Fengal Melapor Epintral Six Visit Sons Fengal Fengal Inmedia Fengal Fe	Tig: Etc. Tite: Tig: Etc. Tite: 1. Call Name San 1. Value Propagat 1. Name attent 1. Call Name San 1. Value Propagat 5. Lakenge 1. Color 2. Songa Kasendan 1. Faprilarier 4. Lakenge 1. Mills
Proteira Fringation Tenggal Sons Kelonegan Partiera Progediae Tenggal Melapor REMITTAN VIX Vixon Inngala Tenggal Melapor Regard Semister Folial Double Nameton Tenggal Semister Tenggal Semiste	Tig: Etc. Tite: Tig: Etc. Tite: 1. Call Name San 1. Value Propagat 1. Name attent 1. Call Name San 1. Value Propagat 5. Lakenge 1. Color 2. Songa Kasendan 1. Faprilarier 4. Lakenge 1. Mills
Profess Progedies Paragel Sons Keleninger Paragel Sons Keleninger Paragel Melapor ERRETIAN State Open Inregist Foreign Instale Sons Kelening Foreign Instale Foreign Instal	Tig: Etc. Tite: Tig: Etc. Tite: 1. Call Name San 1. Value Propagat 1. Name attent 1. Call Name San 1. Value Propagat 5. Lakenge 1. Color 2. Songa Kasendan 1. Faprilarier 4. Lakenge 1. Mills
Proteira Frengation Pengat Sura Kelonegan Pengat Sura Kelonegan Pengat Pengatian Fangat Melapor Epartinah Stat Sura Kelonegan Fengat Melapor Fengat Isenation Privat Sodia Hamatan Fengat Isenation Fengatian Isenation Fenga	Tig: Etc. Tite: Spain Etc. Tite:
Proteira Frengation Tenggal Sons Kelenagus Partiera Proguitiae Tenggal Melapor REMITIAN VIX Vixon in rigita Tenggal Melapor REMITIAN VIXI Vixon in rigita Tenggal Melapor Tenggal Inemation T	Tig: Etc. Tite: Tig: Etc. Tite: 1. Call Name San 1. Value Propagat 1. Name attent 1. Call Name San 1. Value Propagat 5. Lakenge 1. Color 2. Songa Kasendan 1. Faprilarier 4. Lakenge 1. Mills
Proteira Pringation Paragel Sons Xeletinger Paragel Sons Xeletinger Paragel Melapor REMITIAN State Votes Integral Melapor Remain Integral Melapor Remain Integral Integral Integral Integral Internation Paragel Internation Torquel Internation Torqu	Tig: Etc. Tite: Tig: Etc. Tite: 1. Call Name San 1. Value Propagat 1. Name attent 1. Call Name San 1. Value Propagat 5. Lakenge 1. Color 2. Songa Kasendan 1. Faprilarier 4. Lakenge 1. Mills
Proteira Frengation Tenggal Suita Nelsonages Partiera Progediae Tenggal Melapor BERSTAM NIX Nix Nemalangiap Tenggal Isension	Tig: Etc. Tite: Spain Etc. Tite:
Proteira Frengation Fengat Sons Kelonegan Fengat Sons Kelonegan Fengat Malapor Epithar Progation Sons Visit Manageria Fengat Malapor Epithar Sons Visit Manageria Fengat Israeliae Forest Sons Fengat Israeliae Forest Sons Fengat Israeliae Forest Sons Fengat Israeliae Fengat Israeliae Fengat Israeliae Fengation Israeliae Feng	Tig: Etc. Tite: Tig: Etc. Tite: 1. Call Name San 1. Value Propagat 1. Name attent 1. Call Name San 1. Value Propagat 5. Lakenge 1. Color 2. Songa Kasendan 1. Faprilarier 4. Lakenge 1. Mills
Protein Frengation Tanggal Suita Nelsonagan Partier Prograftie Tanggal Melapor REMITTAN VIX Namalangkap Tanggal Melapor REMITTAN VIX Namalangkap Tanggal semalan Tanggal Selatah Tanggal Sel	Tig: Etc. Tite: Spain Etc. Tite:
Proteira Frengation Tenggal Suita Kelenagan Partiera Prografian Tenggal Melapor REMITIAN SIX Vision Angles Tenggal Melapor Tenggal Institute Tenggal Institu	Total New Year 1 Wilder Proposit 1 Noveletion 5 Lakings 1 Solid Street 1 Noveletion 5 Lakings 1 Solid Street 1 Noveletion 1 Noveletion 4 Lakings
Profess Progetties Tanget Seas Notemper Parties Progetties Tanget Malapor BERSTAM No. No. Notembringsig Tanget Malapor Berstam Tanget Malapor Berstam Tanget Malapor Tanget Inmedia Tanget Tan Tanget Tan Tanget Tange	Total Service
Profess Progette. Tanget Suis Notemper Profess Progette. Profess Progette. Tanget Melapor REMITTAN NIK Nik Normal Inglish Tanget Melapor Tanget Melapor Tanget Melapor Tanget Insmitten Tokul Sobiat Nameten Tanget Insmitten Tanget Insmitten Tanget Insmitten Tanget Insmitten Tanget Insmitten Tanget Insmitten Tanget Insmitten Tanget Institut Tanget Insmitten Tanget Institut Tanget Institut Tanget Insmitten Tanget Institut	Tig: Etc. The: Solid Marris Nate 1 Viction Propagat 1 Novidation 5 Lakings
Profess Progette. Tanget Seas Notemper. Parties Progette. Parties Progette. Tanget Melapor **Epett Melapor	Total New Year 1 Wilder Proposit 1 Noveletion 5 Lakings 1 Solid Street 1 Noveletion 5 Lakings 1 Solid Street 1 Noveletion 1 Noveletion 4 Lakings
Profess Progette. Tangget Sola Sciencegos Parties Progette. Fangget Malacor #Best Tangget Malacor #Best Tangget Malacor #Best Tangget Malacor #Best Tangget Malacor Malacor Tangget Malacor Malacor Tangget Malacor Malacor Tangget Mala	Total Service
Printers Progedition Tanggel Solar Selectinger Parties Progedition Tanggel Melapor REMITIAN SOL SOLAR Selectinger Tanggel Melapor Tanggel Melapor Tanggel Melapor Tanggel Melapor Tanggel Selecting Tanggel Tan	Tig: Etc. The: Solid Marris Nate 1 Viction Propagat 1 Novidation 5 Lakings
Profess Progette. Tangget Sola Sciencegos Parties Progette. Fangget Malacor #Best Tangget Malacor #Best Tangget Malacor #Best Tangget Malacor #Best Tangget Malacor Malacor Tangget Malacor Malacor Tangget Malacor Malacor Tangget Mala	Total Service

PENDANGAN ANAK Nonor Afra Falininan		
Tinggs/Suten/Felton	Tal Be Sec.	_
Penerbitan Hita Kelahiran		
Dirac Katifutu/Ferwinter A: yong Menetilikan keta-Kelahiran		
Tengpal Bilan Patrico	TWO THE TOTAL STATE OF THE STAT	
Kelebrary Arek		
Tingya/lister/Tuhun	7g	
Personne Agenz Nama Berlanding		
HIC bulkerony		
Kereganganen		
Su Kendung		
Nana Ayan Kanburg NIC Ayah Kanburg		
Conscionagement		
Apatitiansing		
Tanggal Penetapan Pengadian Nonor Penetapas Pengadian	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Sara Lecago Peopaliter		
FUNGESANAN INAA		
Nonur Alta Katalitan		
Tanggalibiaso/Tanun	70 51 710	
Forefolds little fold that Since Konflotterbrandish K		
ys Manadalium Alta Kalufurum		
Targolibion/Tetun	30: 46: 76:	
Restrantion Tanggar@ulevTahun		
Portunement Agents		
Noner Targoe/Buss/Tahun		
Histo Forkaninan Satu Nikah	74 8n Tel	
None bullanding NK Bullanding		
Ninerganiçasını		
Bu Kerdung		
Nama Apah Kardung NIK Apah Kandung		
Kesagarapan		
Ayal Kasking		
Novo Faretapes-Pospadian		
Tanggal Frenkspan Fringariller Nema Cambaga Pengaliller		
PELEPASAH KEWARSANESARAAN PE	TUBLIK RECRESA	C
Kawangan ngantair kans		
Noner Alla Hardriver		
Name Alda Fortswinson		
Nama Supril stay left. NH. busin stay left		
Numer People		
None Mont		
Mirror Ripubusar Presiden Tanggal Sulan Tahun	7/ 10- 10-	Land Section 1
Namor Seria Acata Setpair		100100
Tunggastution Tahun-	7g 5c 5c	
Namer Republish		in his hours
Monket Hulson: das HVM Tanggal-Rules Tahun	12 T 50 T 70 T	
PEMBETALAN AKTA		
Married Autorysing slices		
Bheckarotark News tysk / Its IVsk		
gare & bould unit)		
Hit Auch (by Albi		
PELAPORAN BAKTI PENCATATAN SIPI	L DARI MESARA SETEMPAT	
Namez Book Health an dari		
Kantor Frewakillar Tanggal Build Kosatinas dari		
Kurter Pannaktur		
Kietor Fleveltilan yang		
Menutikan kita		
Nation Ada Kelman can Hegan Saleman		
Tingge Perobles Alls		
Falsifier for Regard Seberged		
Mengatahui		30
Replat Devaluation (Papabat Dutcasell Yang M		
24 11 12 11 12 12	The state of the s	400000000000000000000000000000000000000
		The second second

Formulir 9 - Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI, dengan kode F-2.02

 g. Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.26.

	4			F-2.26
SURAT KETERA DI LUAR WILAYAH	NGAN PELA	PORAN PENCAT		
	Nomor:			
Pada hari initanggal Pencatatan Sipil pencatatan dari		tahun , telah	, Saya menerima	"Pejabat pelaporan
Nama NIX	:			
Nomor Dokumen Perjalanan RI	- 2			
Tempat tanggal lahir				
Pekeriaan				
Agama	1			
Kepercayaan Terhadap Tuh	an			
YME	+			
Alamat				
Kewarganegaraan				
Pencatatan	.tersebut	telah Akta	dilaksanakan	pada
diterbisan olehdi Keduta pencalatandi Keduta Indonesia/Konsulat Repu NomorTangg	an Besar Re	dan telah publik Indonesi ndonesia	tercatat dal	
Surat Keterangan Pelaporan Po	ncatatan		ini bukan men	upekan akta
		and the first	20	
•	a.r		skilan Republik In	
POTO 4 x 6 BERWARNA BERDAMPINGAN SUAMI ISTERI (BAGI				

Formulir 10 - Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kode F-2.26

B. Pencatatan Lahir Mati

Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tandatanda kehidupan⁷. Anak yang lahir mati, sudah dihitung dalam penentuan urutan anak.

Setiap peristiwa lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili setelah lahir mati. Pencatatan peristiwa lahir mati hanya diberikan surat keterangan lahir mati tanpa NIK, tidak diterbitkan akta kelahiran dan akta kematian. Meskipun tidak diterbitkan akta pencatatan sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan. Pencatatan lahir mati bagi penduduk meliputi Penduduk WNI dan Orang Asing.

1. Dasar Hukum Pencatatan Lahir Mati

- a. Pasal 33 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006.
- c. Pasal 36 Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaltaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- d. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.
- e. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3),
 Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

2. Pencatatan Lahir Mati

a. Persyaratan Pencatatan Lahir Mati

Pencatatan lahir mati penduduk WNI dan Orang Asing dilakukan dengan memenuhi persyarat in berupa:

- Fotokopi surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakit/ Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir mati di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum;
- Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga orang tua

⁷ Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan, Penjelasan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, II Pasal demi Pasal, Pasal 33

b. Tata Cara Pencatatan Lahir Mati

Pencatatan lahir mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing dilakukan dengan tata cara, sebagai berikut:

- Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta menyerahkan persyaratan;
- Petugas registrasi dan petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
 Catatan:

Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan lahir mati yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), dinas tidak menarik surat keterangan lahir mati asli, WNI melampirkan Fotokopi Kartu Keluarga untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01, untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang di scan/ di foto untuk diunggah harus aslinya, WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01 dan Dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati.

- Petugas registrasi untuk Penduduk WNI meneruskan formulir pelaporan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk diterbitkan surat keterangan lahir mati;
- Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota dan/atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan lahir mati; dan
- 6) Surat keterangan lahir mati disampaikan kepada pemohon.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Lahir Mati

Pelayanan pencatatan lahir mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing dilakukan dengan menggunakan formulir, terdiri dari:

- Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01.
- Formulir hasil pelayanan pencatatan lahir mati berupa surat keterangan lahir mati, dengan kode F-2.05.

3. Lampiran Formulir Pencatatan Lahir Mati

- a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB III Poin A Angka 4 Huruf a Buku Petunjuk Teknis ini).
- Formulir hasil pelayanan pencatatan lahir mati berupa surat keterangan lahir mati, dengan kode F-2.05.

KOP DIN	KABUPATEN/K	DAN PENCATATAN SIPIL
	KABUPATENIK	,
	SURAT KETERANGA	N LAHIR MATI
	Nomor:	
Berdasarkan lapa	oran dari:	
Name		
NIK	=	
Tanggal lahir/Un	nuri	
Pekerjaan	2	
Alamat		
Bahwa pada		
Hari		
Tanggal	OF SERVICE	
Tempat : telah la	shir mati bayi laki/pe	rempuan*) tunggal/kembar
anak ke sete	lah dalam kandung s	elama bulan, dari seorang
ibu:		
Nama	1	
ATTE		
NIK		
	nur:	
NIK Tanggal lahir/Un Kewarganegaras		
Tanggal lahir/Ur		
Tanggal lahir/Un Kewarganegara Pekerjaan Alamat		
Tanggal lahir/Un Kewarganegara Pekerjaan Alamat		
Tanggal lahir/Un Kewarganegaras Pekerjaan Alamat Istri dari:		
Tanggal lahir/Un Kewarganegaras Pekerjaan Alamat Istri dari: Nama		
Tanggal lahir/Un Kewarganegaras Pekerjaan Alamat Istri dari: Nama NIK Tanggal lahir/Un	in : : : : mur :	
Tanggal lahir/Un Kewarganegaras Pekerjaan Alamat Istri dari: Nama NIK Tanggal lahir/Ur Kewarganegaras	in : : : : mur :	
Tanggal lahir/Un Kewarganegaras Pekerjaan Alamat Istri dari: Nama NIK Tanggal lahir/Ur Kewarganegaras Pekerjaan	in : : : : mur :	10°
Tanggal lahir/Un Kewarganegaras Pekerjaan Alamat Istri dari: Nama NIK Tanggal lahir/Ur Kewarganegaras Pekerjaan	in : : : : mur :	17 19a
Tanggal lahir/Un Kewarganegara	in : : : : mur :	20
Tanggal lahir/Un Kewarganegaras Pekerjaan Alamat Istri dari: Nama NIK Tanggal lahir/Ur Kewarganegaras Pekerjaan	in : : : : mur :	
Tanggal lahir/Un Kewarganegaras Pekerjaan Alamat Istri dari: Nama NIK Tanggal lahir/Ur Kewarganegaras Pekerjaan	in : : : : mur :	and the same of th

Formulir 11 - Surat Keterangan Lahir Mati, kode F-2.05

C. Pencatatan Perkawinan

Definisi perkawinan mendasar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) pada Undang-Undang tersebut juga dijelaskan perihal syarat sah perkawinan yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedang pada ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang berbeda. Pencatatan perkawinan untuk masyarakat yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama non Islam dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

- a. Pasal 33 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006.
- c. Pasal 36 Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- d. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.
- e. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3). Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

2. Pencatatan Perkawinan di Wilayah NKRI

Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili yaitu dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga di Kartu Keluarga sejak tanggal perkawinan.

a. Persyaratan Pencatatan Perkawinan di Wilayah NKRI

1) Pencatatan perkawinan WNI

Pencatatan perkawinan WNI dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Pas foto 4 x 6 berwarna suami dan istri.
- Fotokopi Kartu Keluarga.
- d) KTP-el.
- e) Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya, atau
- Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.
- 2) Pencatatan perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun

Pencatatan perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Fotokopi penetapan pengadilan tentang dispensasi perkawinan
- c) Pas foto 4 x 6 berwarna suami dan istri.
- d) Fotokopi Kartu Keluarga.
- e) KTP-el.
- Pencatatan perkawinan yang ditetapkan pengadilan

Pencatatan perkawinan yang ditetapkan pengadilan dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- Fotokopi salinan penetapan pengadilan mengenai perkawinan antar umat yang berbeda agama atau perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.
- b) Pasfoto 4 x 6 berwarna suami dan istri.
- c) Fotokopi Kartu Keluarga
- d) KTP -el.

 Pencatatan perkawinan yang salah satu atau kedua suami isteri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan yang salah satu atau kedua suami isteri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagai pasangan suami istri dengan materai.
- c) Pas foto 4 x 6 berwarna suami atau istri yang masih hidup.
- d) Fotokopi Kartu Keluarga.
- e) KTP-el pasangan yang masih hidup.
- f) Fotokopi dokumen perjalanan bagi orang asing.
- Pencatatan perkawinan bagi suami melangsungkan perkawinan kedua dan seterusnya

Pencatatan perkawinan bagi suami melangsungkan perkawinan kedua dan seterusnya dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Fotokopi penetapan pengadilan tentang izin perkawinan dari istri sah
- c) Fotokopi Kartu Keluarga.
- d) KTP-el.
- e) Fotokopi dokumen perjalanan bagi orang asing.
- Pencatatan perkawinan pasangan suami dan isteri yang dalam kartu keluarga status cerai hidup belum tercatat

Persyaratan pencatatan perkawinan pasangan suami dan isteri yang dalam Kartu Keluarga status cerai hidup belum tercatat dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat.
- c) Pas foto 4 x 6 berwarna suami dan istri.
- d) Fotokopi Kartu Keluarga.
- e) KTP-el.

7) Pencatatan perkawinan orang asing

Pencatatan perkawinan orang asing dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Pas foto 4 x 6 berwarna suami dan istri.
- c) Fotokopi Dokumen Perjalanan.
- fotokopi Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas.
- e) Fotokopi Kartu Keluarga.
- f) KTP-el
- g) Fotokopi Izin dari negara atau Perwakilan negaranya.

b. Tata Cara Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan WNI, perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun, perkawinan yang ditetapkan pengadilan, perkawinan yang salah satu atau kedua suami isteri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan, perkawinan bagi suami melangsungkan perkawinan kedua dan seterusnya, perkawinan pasangan suami dan isteri yang dalam Kartu Keluarga status cerai hidup belum tercatat dan perkawinan orang asing sebagaimana dimaksud penjelasan sebelumnya dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan tata cara sebagai berikut:

- Pernohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta menyerahkan persyaratan.
- Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.

Catatan:

Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli atau penetapan pengadilan asli atau dokumen perjalanan bagi orang asing asli atau izin dari negara atau Perwakilan negaranya asli hanya berupa fotokopi, asli hanya diperlihatkan, WNI melampirkan Kartu Keluarga Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin), WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01,. SPTJM Perkawinan Belum Tercatat (F-1.05) perlu memakai materai, karena formatnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari organisasi yang terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

- Petugas pada Disdukcapii Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapii Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan.
- 4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- Kutipan akta perkawinan disampaikan kepada pemohon beserta dokumen kependudukan lainnya dengan status kawin tercatat.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Perkawinan

Formulir yang digunakan dalam pencatatan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari:

- Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengan kode F-2.01.
- 2) Formulir hasil pelayanan pencatatan perkawinan, terdiri dari:
 - a) Register akta perkawinan, dengan kode F-2.15.
 - b) Kutipan akta perkawinan, dengan kode F-2.21.

3. Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI

Perkawinan WNI atau perkawinan WNI dengan orang asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

a. Pelaporan Hasil Pencatatan Perkawinan WNI yang Telah Dicatatkan di Negara Setempat

1) Persyaratan Pelaporan Pencatatan Perkawinan

Perkawinan WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Fotokopi kutipan akta perkawinan dari negara setempat.
- b) Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia dari suami dan istri.

Perkawinan WNI dengan Orang Asing yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Fotokopi kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat:
- b) Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia dan dokumen perjalanan; dan
- c) Fotokopi surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

2) Tata Cara Pelaporan Pencatatan Perkawinan

Perkawinan WNI dan perkawinan WNI dengan Orang Asing yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakitan Republik Indonesia di luar negeri dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 serta menyerahkan persyaratan.
- b) Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
 Catatan;
 - Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tidak menarik kutipan akta perkawinan dari negara setempat asli atau dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen perjalanan bagi orang atau surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri berupa fotokopi, asli hanya diperlihatkan, WNI tidak perlu fotokopi KTP-el 2 saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.02;
- Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan;
- e) Surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.

3) Formulir yang digunakan dalam Pelaporan Pencatatan Perkawinan

Formulir yang digunakan dalam pelaporan Perkawinan WNI dan perkawinan WNI dengan Orang Asing yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, terdiri dari:

- a) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI, dengan kode F-2.02.
- b) Formulir hasii pelayanan pencatatan perkawinan WNI atau perkawinan WNI dengan orang asing yang dilakukan pada Instansi berwenang di negara setempat, berupa surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.26.

b. Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI Dalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Perkawinan Bagi Orang Asing^a

1) Persyaratan Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI

Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negari dengan memenuhi persyaratan berupa;

- a) Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.

Perkawinan perkawinan WNI dengan orang asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Fotokopi surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat.
- b) Pas foto berwarna suami dan istri.
- c) Fotokopi dokumen perjalanan republik Indonesia dan dokumen perjalanan.
- d) Fotokopi surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, Bab II, Pasal 40

2) Tata Cara Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI

Pencatatan perkawinan WNI atau perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah NKRI dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 serta menyerahkan persyaratan
- Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.

Catatan:

Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tidak menarik kutipan akta perkawinan dari negara setempat atau surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat atau dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen perjalanan bagi orang atau surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri asli berupa fotokopi, asli hanya diperlihatkan, WNI tidak perlu fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.02.

- c) Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan.
- d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- e) Kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon

3) Formulir

Pencatatan perkawinan WNI atau perkawinan WNI dengan orang asing pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menggunakan formulir, sebagai berikut:

- Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI, dengan kode F-2.02.
- b) Formulir hasil pelayanan pencatatan perkawinan WNI atau perkawinan WNI dengan orang asing di luar wilayah NKRI dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, berupa register akta perkawinan dengan kode F-2.15 dan kutipan akta perkawinan dengan kode F-2.21.

4. Lampiran Formulir Pencatatan Perkawinan

- Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode
 F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 27, BAB III Poin A Angka 4 Huruf a Buku Petunjuk Teknis ini).
- Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02 (Terlampir pada halaman 35 – 37, BAB III Poin A Angka 4 Huruf f Buku Petunjuk Teknis ini).

- c. Formulir hasil pelayanan pencatatan perkawinan, terdiri dari:
 - 1) Register akta perkawinan, dengan kode F-2.15, sebagai berikut:

WARGA REGARA [3] GAN WARGA REGARA [3]	AKTA PERKAWINAN	
Nerver 10		
Not late (5)		
Padds hart not (b) Langgol (f) Lahun Langgol (f) Lahun Langgol (f) Lahun Langgol Lahun Lah		
Section Sect	NICHON 159	
Section Sect	Pada hari no m. Tanagai (f) tahun (fil	guiot
155	(8) Fadir dhadapan tasa (10) Pejabat Penca	
Semak ke (20)	(11)	(13)
ISSNOW No. 129	ternal langua later (34)	Sensor
(24) principles fermout Singal(75) with (27) salawat tempat tinggal (26) statur (27) salawat tempat tinggal (26) (25) salawat tempat tinggal (26) (25) salawat tempat tinggal (26) (26) salawat tempat tinggal (26) (27) salawat tempat tinggal (26) (28) pekerjaan (26) salawat tempat tinggal (26) sabelum perenghun (27) salawat tempat tinggal (26) sabelum perenghun (27) salawat tempat tinggal (26) sabelum perenghun (27) salawat tempat tinggal (27) salawat tempat tinggal (27) salawat tempat tinggal (28) salawat tempat tinggal (28) salawat tempat tinggal tinggal (28) salawat tempat tinggal (28) salawat tempat tinggal (28) salawat tinggal (28) salawa	[15] tahun agama/ kepercayaan (16) pekirjaan (17) Alamat teng	lat tinggol
fernoun ranges (27) sahum, Agama/Sepernayaan (28) paker (25) paker (27) sahum, Agama/Sepernayaan (28) paker (2	[15anak kz (20)	percayase
Section Sect		elemat
Later Late		
State Stat		
Still Semilar Semila		posterjann.
Second		
1991 Umar	TT 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	at tatas
pokerpain (35) pokerpain (35) pokerpain (35) peremptuan (25) peremptuan (2	(R2) umor (15) taken, Agarra/6	регсиуаль
persent/belum persels basels (engel (57) umu (40) tahun, Agama/ Kepercayaan (42) shared (42) umu (40) tahun, Agama/ Kepercayaan (42) shared tempat tahun (43) umu (43) umu (43) tahun, Agama/Kepercay (43) tahun	1861 tekerano (25) alamat tempat boggal (86)	
perraph/belum pernah bawin (engan (87) umu (40) tahun, Agama/ Kepantayaan (42) perempuan (29) umu (40) tahun, Agama/ Kepantayaan (42) alamat tempat ting (43) umu (40) tahun, Agama/ Kepantayaan (42) alamat tempat ting (43) umu (45) tahun, Agama/Kepantayan (46) umu (45) tahun, Agama/Kepantayan (46) pekenjaan (47) alamat tempat ting (48) pekenjaan mereka telah disengungkan dihadipan Pemuka Agama / Pemuka Pengha Kepantayan, (49) pekenjaan (40) pada tang (40) pekenjaan (40) pekenjaan telah disetapkan bendasarkan penerapan pengadian (44) pekenjaan (40) pekenjaan (52) umur (56) tahun, Agama/Kepercayaan (57) pekenjaan (52) umur (56) tahun, Agama/Kepercayaan (57) pekenjaan (52) umur (56) tahun, Agama/Kepercayaan (57) tanggal(44) pekenjaan alamat tempat tenggal mengadikan (57) anak, yaifle (48) Adamat kelahiran number (52) pekenjaan pentawanan number (52) alamat tempat tenggal mengadikan number (52) anak, yaifle (53) alamat tempat tenggal mengadikan number (53) anak, yaifle (53) ana		abelemnye
Perintan (20)	perrah/betur perrah kawin rengan (37) anak ke (38)	-
(A3) (A4)	perempuan (20) umui (40) tahue, Agama/ Kepercayaan (41)	
(A3) (A4)	Poketjaan (42) slamat tempat	tinggal
(66) pricerjoan (47) statum. Agarra/Gepercoy (66) pricerjoan (47) statum. Agarra/Gepercoy (68) pricerjoan (47) statum. Agarra / Perruka Fergiu (69) percayoan nereta telah disengungkan dihadapan Perruka Agarra / Perruka Pergiu (60) pada tang (61) statum. (63) pada tang (64) neretapkan bendasarkan pendapan pengadian (64) neretapkan pendapan pingadian (64) neretapkan (67) peleriyaan (67) peleriyaan (68) statum. Agarra/Cepercayoan (67) peleriyaan (68) statum. Agarra/Cepercayoan (67) peleriyaan (68) statum. (66) peleriyaan neretapkan pertapenan ini solah diakui dan disehkan (60) arak, yafta: 1 (81) Akas Salahiran nereta. (68) peleriyaan disebah diakui dan disehkan (60) arak (63) arak, yafta: 1 (81) Akas Salahiran nereta. (68) peleriyaan disebah disebah disebah disebah disebah disebah pengantan mengantan mengantan melagai bentat (63) 2 Aga salahiran nereta. (68) peleriyaan disebah disebah disebah disebah pengantan pengantan mengantan melagai bentat (63) 3 Aga salahiran neretapkan disebah disebah disebah pengantan pengantan pengantan melagai bentat (63) 5 Agarra (68) peleriyaan pengantan mengantan pengantan pengantan pengantan selah salah salah salah salah disebah pengan pengantan pengantan pengantan selah salah salah salah salah salah disebah selah salah s	(43)	
(46) gekerjaan (47) alamat tempid tas, (48) gekerjaan (47) alamat tempid tas, (48) gerhawisan mereta telah disenjungkan dihadapan Pemuka Agama / Pemuka Pengha Kepercayaan. (49) yang disema (50) pada tas, (48) pada ta		
Perhawitan moreta telah disenjungkan dihadapan Pernuka Agama / Pernuka Pengha Kapercayaan. (40)	[66] umar (45) taken Agarta/6	percayaan
Perkawisan mineka telah ditengkan dihadapan Pemuka Agama / Pemuka Penghi Kapercanyaan. [49]	(40) steeper (47) attract temper	tinggal
Perkawinan Drah ditetapkan bendararkan penerapan pengadian (54) nemor penerapan tenggal bengal bendararkan penerapan pengadian (54) Pentawinan Ini dicaksikan oleh tenggal tenggal (55) winur (56) tahun, Agama/ Kepercayaan (57) pekerjaan (58) Alamat temparatkan Agama/Kepercayaan (57) tem unggal/69) Alamat pentawinan ini dolah diaksi dan disahkan (60) anak, yafta: 1 (81) Aksa Salahkan nomor (62) anak salahkan nomor (62)	PMI	Section 1
Perkawinan Drah ditetapkan bendararkan penerapan pengadian (54) nemor penerapan tenggal bengal bendararkan penerapan pengadian (54) Pentawinan Ini dicaksikan oleh tenggal tenggal (55) winur (56) tahun, Agama/ Kepercayaan (57) pekerjaan (58) Alamat temparatkan Agama/Kepercayaan (57) tem unggal/69) Alamat pentawinan ini dolah diaksi dan disahkan (60) anak, yafta: 1 (81) Aksa Salahkan nomor (62) anak salahkan nomor (62)	Perkawanan moreka birah disengiangkan amangson persuasi Agama / manusa	on tangent
Agrikawisan telah ditetapkan bendasarkan penertagan pengadilan (S4). 1/551	Approximate the second	
tanggal holan, Aphan, Porkaranan na dicakakan alahi 1/55) umur (56) tahun, Agama/ Kepercayaan (57) pekerjaan (58) Alamat tahun, Agama/ Kepercayaan (57) 2 umur tahun, Agama/Kepercayaan 2 pekerjaan alamat tempat tanggal Calam percantatan pertawinan ini selah diakui dan disehkan (60) anak, yaitu: 1 (41) Akta Salahiran nomor (62) 2 Akta Salahiran nomor (62) 3 Assa kalahiran nomor 5 Assa kalahiran nomor 6 A	2520	
tanggal holan, Aphan, Porkaranan na dicakakan alahi 1/55) umur (56) tahun, Agama/ Kepercayaan (57) pekerjaan (58) Alamat tahun, Agama/ Kepercayaan (57) 2 umur tahun, Agama/Kepercayaan 2 pekerjaan alamat tempat tanggal Calam percantatan pertawinan ini selah diakui dan disehkan (60) anak, yaitu: 1 (41) Akta Salahiran nomor (62) 2 Akta Salahiran nomor (62) 3 Assa kalahiran nomor 5 Assa kalahiran nomor 6 A	Perkawiran telah ditetapkan bendararkan penertapan pengadian (54)	enetapes.
1 (56)	tanggal hulan Jahun Pofkalainan ini dicaknikan	dah.
Briggst (44) 2	1355 unsr (56) tahus, Agama/ Kepercayaan (57).	
2	pekerjaan (58)	tempat
pekerjaak		
Catan postatata pertawana ini telah diakui dan disehkan (KO)		
1. (%) Alica Calabiran nomer (62) 2. Alica Calabiran nomer 3. Acquitation received Necessary and acquitation performance design and ampiritus perspection arising bening (63) 4. 7. 5. 8. 9. 5. 10. Sanstan Acquitation of discussion discussion discussion design and perspection design bening (63) Testa length.		
Akta Eulahiran namor (62). 2. Akta Eulahiran namor. 3. Acta Majarian namor. 5. Acta Majarian namor. 6. Acta Majarian namor. 7. 2. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	Datam potuatatan pertawinan ini tolah diakui dan disahkan (60)	
Alexa Selaharan normor. Accumulation normor. Accumulation normor. Messalaran normor. Messalaran normor. Selection normor. Sel		
Akta Salahuran nomer. 3. Acta salahuran nomer. Namba memina kapada sesa supupa menuruhan pertaminanana dengan melampirkan peraparatan sebagai beritat (53) 6. 2. 7. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.		
Activation or necessary consequences of the consequence of the co		
Acquariem nomes. Manufacturem nomes impeda ange repopulation performance design mediamphilan perspectan nels ago immitet (55)		
Nesseka common kapada sega mangai mencaratikan pertaminangai dengan melampahan perspectan sekagai kentest (63)	* HILL THE PARTY OF THE PARTY O	
2	Manata-mentata tapada sepa menga nempatian pertan menapa dangan melampirtan pemparatan relaggi beritat: (53)	
S. S		
4	The transfer of the transfer o	
S. 10. Sensiah Arka Perkawanan ne dibunahan dipelakan ditambarangai sempara penghadap dan saya. Tenda telapan. Sanda tengan Pejaban Pensataian Sart		
Totale beigns. Sende target Pepides Percention Set	S. 10.	
Supri Start		
population and population in the contract of t		
	P()	

Formulir 12 - Register Akta Perkawinan, dengan kode F-2.15

2) Kutipan akta perkawinan, dengan kode F-2.21, sebagai berikut:

	171.7
Nomor Induk Kep Personnel Regist	pendudukan:
невонне нероз	Adjoin reasons
	PENCATATAN SIPIL
	REGISTRYOFFICE
	WARGA NEGARA SUAMI
	HUSBAND NA TIONALITY
	WARGA NEGARA ISTER!
	WIFE NATIONALITY
	KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
	EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE
Burdacarkon Akt	a Perkawinan Nornor :
	riage Certificate Number
	pada tanggal
that in	on date
tahan	tela h tercatat perkawinan antara
on year	on marriage das recorded between
on year	dengan
	with
Access to both Alleger	gungkan dihadapan Pemuka Agam /Pemuka Penghayat Kepercayaan
which is conduct	ted before a dergyman
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
by name	
pada tanggal	
on date Tahun	
on year	
	atau
	Of the second se
	netapan pengadilan
by the court of	
Nomor	
Number	
Tunggal	
Date	
	Kutipan ini dikeluarken
	The excerpt is issued
	Pada tanggal
	On date
	Pelabat Pencatatan Sipi (
	Officer of Civil Registration
	NIP.
Lampiran Perian	jian P erkawinan
	sent Attachment
Notaris	
Notary	
Nomor	SAME IT A DECISION OF A SERVICE - A VICTOR - A DECISION OF THE ACT
Number	The state of the s
Tanggal	
Date	
Service .	

Formulir 13 Kutipan Akta Perkawinan, dengan kode F-2.21

 Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.26, sebagai berikut:

SURAT KETER DI LUAR WILAYAH	NEGARA I			Section 1
Pada hari ini tenggal	bulan .	tahun	Saya	Pejabat
Pencatatan Sipil	telah mene	rima pelaporan	pencatatan	dari
Nama				
NIK				
Nomor Dokumen Perjalanan Ri	1			
Tempet Tanggal lahir				
Pekerisan				
Agame	#			
Kepercayaan Terhadap Tuhan				
YME				
Alamat				
Kewarganegaraan	1			
Pencatatan,		t	ersebut telah dilaks	sanakan pada
tanggal				
yang diterbitkan oleh			dan telah tercat	at delam deftar
pencatatan di Kedu	taan Besar	Republik Indon	esia / Konsulat Jer	nderal Republik
Indonesia/Konsulat Republik In	donesia			
Nomor				

Surat Keterangan Pelaporan Pe	encetatan	ini bu	ukan merupakan a	kta
			erromanocomoscos)	DAY
			kilan Republik Ind	
* FOTO 4x6 BERWARNA	6,1	Transce I ciwa	man reputit in	
BERDAMPINGAN SUAMI ISTE	Ni .			
(BAGI PERKAWINAN)				
(DAGI FERINAMINAN)	-			

Formulir 14 - Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kode F-2.26

D. Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan serta penyesuaian status perkawinan pada dokumen kependudukan lainnya.

Dasar Hukum Pencatatan Pembatalan Perkawinan

- a. Pasal 39 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006.
- c. Pasal 41 Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- d. Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.
- e. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

2. Pencatatan Pembatalan Perkawinan

a. Persyaratan Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pencatatan pembatalan perkawinan dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- Fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Kutipan akta perkawinan.
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga.
- 4) KTP-el.

b. Tata Cara Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pencatatan pembatalan perkawinan dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- Pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta menyerahkan persyaratan.
- Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), dinas tidak menarik salinan putusan asli, WNI melampirkan Kartu Keluarga asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status perkawinan kembali ke sebelumnya), untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang di scan/ di foto untuk diunggah harus aslinya, tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01 dan dinas menarik kutipan akta perkawinan asli

- Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan.
- 4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan.
- Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan.
- 6) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan surat keterangan pembatalan perkawinan kepada pemohon.

c. Formulir yang D'_ ınakan dalam Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pembatalan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari:

- Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01.
- Formulir hasil pelayanan pencatatan pembatalan perkawinan, terdiri dari:
 - a) Catatan pinggir pembatalan perkawinan dengan kode CP.01
 - b) Surat keterangan pembatalan perkawinan dengan kode F-2.06.

3. Lampiran Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan

- Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode
 F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 27, BAB III Poin A Angka 4 Huruf a Buku Petunjuk Teknis ini).
- Formulir hasil pelayanan pencatatan pembatalan perkawinan, terdiri dari:
 - a. Catatan pinggir pembatalan perkawinan dengan kode CP.01, sebagai berikut;

	CATATAN PINGGIR PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN
Berdasarkan Nomor	Putusan Pengadilan Negeri
	Pejabat Pencatatan Sipil
	NIP

Formulir 15 - Catatan pinggir pembatalan perkawinan, dengan kode CP.01

 Surat keterangan pembatalan perkawinan dengan kode F-2.06, sebagai berikut:

	ENDUDUKAN DAN ABUPATEN/KOTA.		PIL
SURAT KETER	ANGAN PEMBATA	AN PERKAWINA	N
	Nomor.:		
iematat dalam register alda perkan pembalalan perkandhan antara. Nama (Laladata) NIK Nomor Dekumen Pedalahan FI Tempat tanpost labid Pekstiaan Agama/Penghaxat Kepemasaan Namat Kewarianepakaan	daan osmor		lolabtextlans
Nama Ayah			
Nama Ibu	Danis		
Nama (Perempuan)	Dengan		
NIK			
Nomor Dokumin Perialanan RI Cempal tanggal lahir Peksitiaan			
Agama/Penghaxat Kepercayaan Alamat			
Cowarpanegaraan Nama Ayah Nama Buu			
Perabataian perkawinan ini berda MA) nama ahun yang menela nengambatkan status dari masing-d Surat Keterangan pembataian perka	tangga ipkan pembalalan per nasing papangan terse minan ini bukan menap	t but kawinan dari pasang but pada status semi skan abta pembalaia 20	MO. an Iersebut dan Wa.
	Peiabat Penc	adatan Sipil	

Formulir 16 - Surat keterangan pembatalan perkawinan, dengan kode F-2.06

E. Pencatatan Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri berdasarkan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami isteri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian. Dalam hal pencatatan perceraian dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri berdasarkan pada pelaporan dari penduduk. Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang terjadi pada dirinya untuk dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dasar Hukum Pencatatan Perceraian

- Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006.
- c. Pasal 42 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- d. Pasal 56, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.
- e. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), (3) dan (5) Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

Pencatatan Perceraian di Wilayah NKRI

Pencatatan perceraian dalam wilayah NKRI dilaporkan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili.

a. Persyaratan Pencatatan Perceraian

Pencatatan perceraian dalam wilayah NKRI dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

 Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2) Kutipan akta perkawinan;

Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan, pemohon membuat surat pernyataan (SPTJM) yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Fotokopi Kartu Keluarga; dan
- 4) KTP-el.

b. Tata Cara Pencatatan Perceraian

Pencatatan perceraian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta menyerahkan persyaratan.
- Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan

Catatan:

Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), dinas tidak menarik salinan putusan asli, WNI melampirkan Kartu Keluarga Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status perkawinan menjadi cerai hidup), untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang di scan/di foto untuk diunggah harus aslinya, tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 saksi karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01, dinas menarik kutipan akta perkawinan asli.

- Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan.
- 4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan.
- 5) Kutipan akta perceraian disampaikan kepada pemohon.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Perceraian

Pelayanan pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan formulir, terdiri dari:

- Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengan kode F-2.01.
- 2) Formulir hasil pelayanan pencatatan perceraian, terdiri dari:
 - a) Register akta perceraian dengan kode F-2.16.
 - b) Kutipan akta perceraian dengan kode F-2.22.
 - c) Catatan pinggir pencatatan perceraian dengan kode CP.02.

3. Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah NKRI

Perceraian WNI di Luar Wilayah NKRI dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pelaporan Hasil Pencatatan Perceraian yang Telah Dicatatkan di Negara Setempat

1) Persyaratan Pelaporan Pencatatan Perceraian

Perceraian WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Fotokopi kutipan akta perceraian/bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
- b) Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia;
- Fotokopi surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

2) Tata Cara Pelaporan Pencatatan Perceraian

Perceraian WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 serta menyerahkan persyaratan.
- b) Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.

Catatan:

Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tidak menarik kutipan akta perceraian/bukti pencatatan perceraian dari negara setempat, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri asli.

- c) Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan.
- d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan.
- e) Surat keterangan pelaporan diberikan kepada pemohon.

3) Formulir Pelaporan Pencatatan Perceraian

Perceraian WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan menggunakan formulir sebagai berikut:

- a) Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02.
- b) Formulir hasil pelayanan pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, berupa surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.26.
- b. Pencatatan Perceraian WNI di Luar Wilayah NKRI Dalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Perceraian Bagi Orang Asing

1) Persyaratan Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah NKRI

Perceraian WNI di luar wilayah NKRI dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan memenuhi persyaratan berupa;

- Fotokopi dokumen yang sah tentang terjadinya perceraian di negara setempat.
- b) Kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan; atau
- Surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan;

 fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia atau surat keterangan pindah luar negeri suami dan istri yang telah berceral.

2) Tata Cara Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah NKRI

Perceraian WNI di luar wilayah NKRI dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan tata cara sebagai berikut

- a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 serta menyerahkan persyaratan.
- Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.

Catatan:

Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tidak menarik dokumen vang sah tentang terjadinya perceraian di negara setempat asli.

- c) Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan.
- d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mencabut dan membuat catatan pinggir pada kutipan akta perkawinan serta menerbitkan register akta perceraian dan kutipan akta perceraian.
- e) Kutipan akta perceraian disampaikan kepada Pemohon.

Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah NKRI

Pencatatan perceraian WNI pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menggunakan formulir sebagai berikut:

- Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode
 F-2.02.
- b) Formulir hasil pelayanan pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, berupa register akta perceraian dengan kode F-2.16 dan kutipan akta perceraian dengan kode F-2.22 serta catatan pinggir pencatatan perceraian dengan kode CP.02.

4. Lampiran Formulir Dalam Pencatatan Perceraian

- a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB III Poin A Angka 4 Huruf a Buku Petunjuk Teknis ini).
- Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02 (Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB III Poin A Angka 4 Huruf f Buku Petunjuk Teknis ini).
- c. Formulir hasil pelayanan pencatatan perceraian, terdiri dari:
 - 1) Register akta perceraian dengan kode F-2.16, sebagai berikut:

Dengan (20) Vang Denkawinannya dicatatkan ga (21) akta Denkawinan nomor (22) tanggal(23) tahun (24) dan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri. (25) langgal (27) tahun (26) yang menyelakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan			AKTA	PERCERAIAN			
NBK Suami (4) NBK Isteri (5) Pade hari ini (6) Ishum (8) Pejabat Pencatatan Saya (9) Pejabat Pencatatan Siya (10) Sestang pelapor berama (11) Sestang pelapor berama (12) Sestang pelapor berama (13) Sestang pelapor berama (14) melaporkan dengan membawa putusan (14) melaporkan dengan membawa putusan (16) melaporkan dengan membawa putusan (16) mengadian (16) sangga(17) Sayang menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian antara (19) dengan (20) dengan (21) dengan (22) dengan (23) dengan (24) dengan (25) dengan (26) dengan (27) dengan (28) dengan (28) dengan (29) dengan (29) dengan (29) dengan (29) dengan (29) dengan (29) dengan (20) d		Committee of the commit		DAN WARD	SANEGARA	2)	
Pads heri ini (6) tanggal (7) hadir dhadapan saya (9) Pejabat Pencatatan Sigil (10) sestang pelapor bernama (10) sestang pelapor bernama (11) unur (12) tahun, pekerjaan (13) alamat tampat tinggal (14) melaporkan dengan membawa putusan pengadilan (16) melaporkan dengan membawa putusan pengadilan (16) sanggal (17) tahun (18) sanggal (17) tahun (18) sanggal (17) tahun (18) cang menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian antara (19) pencawinannya dicatatkan operawinannya (19) tahun (19) dan surat keterangan Pantera Pengadilan Negeri (19) dan surat keterangan Pantera Pengadilan Negeri (19) tahun (19) t							
September (8) hadder chadapan saya (9). Pejabat Pencatatan Sipi (10) sestrang pelapor bermana (11) unur (12) tahun, pekerjaan (13) alamat tempat tinggal (14) melaporkan dengan membawa putusan pengadilan (16) melaporkan dengan membawa putusan pengadilan (16) memor(16), sanggal(17) tahun (18), rang menyatakan bahwa putusnya perkawinan xarena perceraian antara (10) cengan (10) dengan (10) d							
shun (8) hader chadapan saya (9). Pejabat Pencatatan Sipil (10) sestrang pelapor bermana (11) unur (12) tahun, pekerjaan (13) alamat tempat tinggal (14) melaporkan dengan membawa putusan pengadilan (16) melaporkan dengan membawa putusan pengadilan (16) anggal (17) tahun (18). sang menyatakan bahwa putusnya perkawinan karana percaraian antara (10) perkawinan nomor (10) dengan	Pade hari ini (6)			anggal (7)	con in-	messen	
10	whun (8)	20000000			adir	dhadapan	saya
12) tahun, siamat tempat tinggal (14) melaporkan dengan membawa putusan pengadilan (16) melaporkan dengan membawa putusan pengadilan (16) tahun (18) sangpal(17) tahun (18) sangpal(17) tahun (18) perkawinan karena perceraian antara (16) pencawinannya dicatatkan perceraian antara (16) pencawinannya dicatatkan perceraian pengal(18) pencawinannya dicatatkan pengal(18) pencawinan nomor (22) tanggal(23) tahun (24) dan surat keterangan Pantera Pengadilan Negeri Nomor (29) tanggal (27) tahun (29) tanggal (27) tanggal (27) tahun (28) tanggal (27) tanggal (27) tahun (28) tanggal (27) tanggal (28) tahun (29) tanggal (27) tanggal (27) tanggal (28) tahun (28) tanggal (27) tanggal (28) tahun (28) tanggal (28) tahun (29) tanggal (28) tahun (29) tanggal (27) tanggal (28) tahun (29) ta							
13) słamat tempat tinggal 14) melaporkan dengan membawa putusan pengadilan (16) fahun (16) fahun (18) fahun (1				***************			urnur
melaporkan dengan membawa putusan pengadilan (16). anggal(17). tahun (16). anggal(17). tahun (16). dengan menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian antara (16) dengan (20). dengan (20). denawinannya dicetatkan oli (21). akta perkawinan nomor (22). tahun (25). dan surat keterangan Pantera Pengadilan Negeri. Nomor (25). langgal (27). tahun (26). yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan sukum yang tatap. Tanda tangan Palapor Pajabat Pancatatan Sipil (20):							100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
melaporkan dengan membawa putusan pengadilan (16)							tingge
melaporkan dengan membawa putusan pengadian (16)	F-1 - F-1						
nomor(16) anggal(17) tahun 18) tahun					rkan deng	an membawa	pullusar
anggal (17) tahun (18)	pengadilan			The second secon			Home
tengan tengan tengan tengan tengan tentawinannya dicatatkan dicatatkan tengan tentawinannya dicatatkan tengan tentawinannya dicatatkan tengan t							
dengan Dengan De	Commence of the Party.						
dengan (20). yang serkawinannya dicatatkan ga gata dicatatkan serkawinan nomor (22) tahun ga gata dicatatkan nomor (22) dan surat keterangan Pantera Pengadian Negeri. Nomor (25). tanggal (27) tahun (26). yang menyetakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan sukum yang tatap. Tanda tangan Pelapor Pejabat Pencatatan Sipil (30):							
20) dengan (20) yang periawinannya dicatatkan ga (21) akta (21) akta (22) tanggal (23) tahun (24) dan surat keterangan Pantera Pengsolian Negesi. Nomor (25) tanggal (27) tahun (26) yang menyetakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan sukum yang tatap. Tanda tangan Palapor Pajabat Pancatatan Sipil (30).	(18)						
dengan (20) dengan (20) yang perkawinannya dicatatkan di (21) aktu perkawinan nomor (22) tanggal(23) tahun (24) dan surat keterangan Pantera Pengadian Negeri (25) Nomor (26) tanggal (27) tahun (26) yang menyetakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan nukum yang tatap. Tanda tangan Pelapor Pejabat Pancatatan Sipil (30):	(18) yang menyatakan	beliwe put	lusnya	perkawinan	Xarena p	serceraian ani	tera (19)
20 yang	(18) yang menyatakan	behwe put	usnya	perkawinan	Asrena p	serceraian an	tera (19)
serkawinannya dicatatkan di 21) akta (22) tanpgal (23) tahun (24) tanpgal (23) tahun (24) dan surat keterangan Pantlera Pengadian Negeri. Nomor (25) tahun (26) tahun (26) yang menyetakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan rukum yang tatap. Tanda tangan Palapor Pajabat Pancatatan Sipil (30).	(18) yang menyatakan	behwe put	usnya	perkawinan	Asrena p	serceraian an	tera (19)
21) akta perkawinan nomor (22) tanggal(23) tahun 24) dan surat keterangan Pantera Pengadilan Negeri. 25) Nomor 26) tanggal (27) tahun 28) yang menyetakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan nukum yang tatap. Tanda tangan Pelapor Pejabat Pancatatan Sipil (30):	(18) yang menyatakan	behwe put	usnya	perkawinan	Asrena p	serceraian an	tera (19)
perkawinan nomor (22) tanggal (23) tahun (24) dan surat keterangan Pantera Pengsalian Negeri. Somor (25) tahun (25) tahun (26) tahun (26) yang menyetakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tatap. Tanda tangan Pelapor Pejabat Pancatatan Sipil (30).	(18). yang menyalakan (20).	bshwe put	tusnya	perkawinan dengan	Sarena p	serceraien en	tera (19)
24). dan surat keterangan Pantera Pengsdilan Negeri. 25). Nomor 26). tanggal (27). tahun 28). yang menyetakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan nukum yang tatap. Tanda tangan Pelapor Pejabat Pancatatan Sipil (30):	(18). yang menyalakan (20).	bshws put	lusriya	perkawinan dengan	karena p	serceraian an	bera (19)
25. Nomor 25. Isanggal (27). Isahun 25. yang menyetakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan nukum yang tatap. Tanda tangan Pelapor Pejabat Pencatatan Sipil (30)	(18) yang menyalakan (20) penawinannya (21)	beliwe put	lusnya	perkawinan dengan dicetatka	karena p	serceraian an	yang di akta
26). tenggal (27). tahun (26). yang menyetakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan rukum yang tatap. Pelapor Pejabat Pencatatan Sipil (30)	(18). yang menyatakan (20). perkawinannya (21). perkawinan nomor	bsiws put	usnya	perkawinan dengan dicatatka tang:	Sarena p	ercerain an	yang yang si akta
26 yang menyetakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan nukum yang tatap.	(18). yang menyatakan (20). perkawinannya (21). (21). (21). (21). (22). (24).	bsiwe put	usnya surat	perkawinan cengan dicetatka tangg keterangan	karena p n pal(23) Pantera	ercerain an	yang si akta tshun Nepes
	(18) yang menyatakan (20) perkawinannya (21) perkawinan nomor (24)	bshwe put	tusniya surot	perkawinan cengan dicetatka tengg keterangan	Asrena p n pol(23) Pantera	Pengadian	yang gi akta tahun Negen
	(18). yang menyatakan (20). perkawinannya (21). perkawinan nomor (24). (25).	bahwa put	sural	perkawinan dengan dicetatka tangg keterangan	Asrena p n pal(23) Parntera (27)	Pengadian	yang g akta tahun Negen Nemor tahun
20	(18). yang menyatakan (20). pentawinannya (21). perkawinan nomor (24). (25). (26). (28). hukum yang tatap.	(22) dan	sural	perkawinan dicetatka dicetatka tangg keterangan al bahwa putusa	Asrena p (a) (23) Paritera (27) in tersebut to	Pengadian	yang di akta tahun Negeri Nomor tahun ti kekuetan
	(18). yang menyatakan (20). perkawinannya (21). (25). (26). (26). (26). Tanda tan	(22) dan	surot tenggi yelakan	perkawinan cengan dicetatka tangg keterangan al bahwa putusa	Asrena p pol(23) Paritera (27) n fersebut fer	Pengsalian elsh mempunya	yang o akta tahun Negeri Nomor tahun ii kekuetan
	(18). yang menyatakan (20). perkawinannya (21). (25). (26). (26). (26). Tanda tan	(22) dan	surot tenggi yelakan	perkawinan cengan dicetatka tangg keterangan al bahwa putusa	Asrena p pol(23) Paritera (27) n fersebut fer	Pengsalian elsh mempunya	yang di akta tahun Negeri Nomor tahun ti kekuatan
	(18). yang menyatakan (20). perkawinannya (21). (25). (25). (26). (26). Tanda tan	(22) dan	surot tenggi yelakan	perkawinan cengan dicetatka tangg keterangan al bahwa putusa	Asrena p pol(23) Paritera (27) n fersebut fer	Pengsalian elsh mempunya	yang di akta tahun Negeri Nomor tahun ti kekuatan

Formulir 17 - Register Akta Perceraian, dengan kode F-2.16

Kutipan akta perceraian dengan kode F-2.22, sebagai berikut;

Number of Population Identity		
	PENCATATAN SIPS.	
	CIVIL REGISTRATION	
WARGANE	GARA	
	NATIONALITY	
KUT	IPAN AKTA PERCERAIAN	
EXCEPT	T OF DIVORCE CERTIFICATE	
Serdaeurken Akta Perceraian Homor :		botwe di
ly Virtue o f Divorce Certificate Number		tout in
if this of product continue the	Poda langgal	
	on data	
Market	recorded the judgment of	
in year	Namor	
	Number	
Pada tanggal	tahon	
On data	YEST	
there is a termination of marriage owing to o	dbyorde between bishw's at this to	
there is a termination of marriage owing to o	devotes between bythw a st truc in	
there is a termination of morriage owing to d	divorce between between the true in	
there is a termination of marriage owing to:	devotes between bythw a st truc in	
there is a termination of morriege coving to:	devotes between bythw a st truc in	
there is a termination of morriege cwiting to a gaing percawated may a disetolism of a whose marriage was routelasted at lasts percawasen nomes.	devotes between bythw a st truc in	
hare is a termination of morriege cwing to: peng pensawharanya diselekten di whose marriage was registered at is to pensawharan nemice.	Obegen with	
there is a beneficiation of mornings cwing to a yong percawharmays diselection of , whose marriage was registered at ista percawharm nomes but to percawharman nomes pade tongool	devotes between bythw a st truc in	
there is a termination of mornings cwing to: yong percawharmaya diselection ut, whose marriage was registered at sits percawharm nome: marriage certificate number pade tempool.	dergen with tahan se year	
there is a beneficiation of mornings cwing to a yong percawharmays diselection of , whose marriage was registered at ista percawharm nomes but to percawharman nomes pade tongool	diverse derived to the set of the	
there is a beneficiation of mornings cwing to a yong percawharmays diselection of , whose marriage was registered at ista percawharm nomes but to percawharman nomes pade tongool	divigen with taken on year Keligen int Dikeluarian The except in layerd	
hare is a beneatation of mornings cwing to: youg parawitenarya diselection ut, whose marriage was registered at iste parawiten nomes but parawiten nomes pade tengon	diverse derived to the set of the	
hare is a beneatation of mornings cwing to: youg parawitenarya diselection ut, whose marriage was registered at iste parawiten nomes but parawiten nomes pade tengon	deregen with	
yang m anyatakan p u tu an ya perkaw kisa. Ihara ta a terminuhon of morriege cwing too yang persawbannaya diselektran ut whose marriage was registered at sitis persawbanna nomor marriage certificate number pada tanggot. On date	diverse between terms a struct in diverse with taken on year Kelloan int diversers in teresed Pada benggal On sele	

Formulir 18 - Catatan Pinggir Pencatatan Perceraian, dengan kode CP.22

3) Catatan pinggir pencatatan perceraian dengan kode CP.02, sebagai berikut:

	PENCATATA	AN PINGGI AN PERCER	
Berdasarkan entera		Negeri oulan	, Nomor tahun, bahwa perkawinar sebagaimana akta perkawinar
		Pejaba	t Pencatatan Sipil
		NIP	

Formulir 19 - Catatan Pinggir Pencatatan Perceraian, dengan kode CP.02

 Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.26 sebagai berikut:

	R WILAYAH	NEGARA KE	or enter that I would	CATATAN SIP PUBLIK INDON	The second
Pada hari ini	erjalanan Ri bir	telah menerin			
Pencatatan, tanggal yang diterbitkan ole daftar pencatatan Republik Indonesia Nomor Surat Keterangan F	ehdi VKonsulat Re	Kedutaan Be publik Indone anogal	Nomor Ak sar Republik In sia	ta dan telah terca donesia / Kons	tat dalam ulat Jendera
		a.n.K	antor Perwakii	an Republik Inc	20

Formulir 20 - Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara Kesatuan, dengan kode F-2.26

F. Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian.

1. Dasar Hukum Pembatalan Perceraian

- Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006.
- c. Pasal 44 Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- d. Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.
- e. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3) dan pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

2. Pencatatan Pembatalan Perceraian

a. Persyaratan Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pencatatan pembatalan perceraian bagi Penduduk dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- Fotokopi salinan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap;
- 2) Kutipan akta perceraian.
- Kartu Keluarga.
- 4) KTP-el.

b. Tata Cara Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pencatatan pembatalan perceraian bagi Penduduk dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:

- Pasangan suami dan isteri yang perceraiannya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta menyerahkan persyaratan.
- Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), dinas tidak menarik salinan putusan asli, WNI melampirkan Kartu Keluarga asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin kembali menjadi Kawin), untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang di scan/ di foto untuk diunggah harus aslinya, tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01,

- Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan.
- 4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta perceraian, kutipan akta perceraian serta register akta perceraian dan kutipan akta perceraian.
- Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencabut kutipan akta perceraian.
- Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian.
- Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan surat keterangan pembatalan perceraian kepada Pemohon.
- Pejabat pencatatan sipil menerbitkan kutipan kedua akta perceraian yang telah diberi catatan pinggir sesuai dengan permohonan.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pembatalan perceraian terdiri dari:

- Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01.
- Formulir hasil pelayanan pencatatan pembataian perceraian berupa:
 - a. Catatan pinggir pembatalan perceraian, dengan kode CP.03.
 - Surat keterangan pembatalan perceraian, dengan kode F-2.09.

- 3. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Perceraian
 - Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01 (Tertampir pada halaman 24 - 27, BAB III Poin A Angka 4 Huruf a Buku Petunjuk Teknis ini).
 - Formulir hasil pelayanan pencatatan pembatalan perceraian berupa:
 - Catatan pinggir pembatalan perceraian, dengan kode CP.03 :

741	TATAN PINGGIR PEMBATALAN PERCERAIAN
tanggal bulan tahun	geri , Nomor , dengan dengan telah batal.
	Pejabat Pencatatan Sipil

Formulir 21 - Catatan pinggir pembatalan perceraian, dengan kode CP.03

Surat keterangan pembatalan perceraian, dengan kode F-2.09 :

Andre Service of Color of	NDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PATEN/KOTA
SURAT KETER	RANGAN PEMBATALAN PERCERAIAN
Pada hari ini tanggat bu Perceraian nomor Nama Suami NIK Nomor Dokumen Perjalanan Rt Tempat tanggal lahir	Nomor :
Pekerjaan Agama/penghayat keper Alamat Kewarganegeraan Nama Ayah Nama ibu	Dengan
Nama Isleri NiK Nomer Dokumen Perjalanan Rt Tempat langgal lahir Pekerjaan Agama Kepercayaan Terhadap Tul Alamat Kewanganegaraan Nama Ayah Nama Ibu	han YME
PTN / MA) nomer	arkan penetapan putusan pengadian (PN / ulan tahun yang menetapkan pembataian Perceraian n kembali status Perceraian pasangan tersebut sebagai suami is yang bercatat pada kutipan akta Perceraian terbitkan pada tanggai it Keterangan pembataian perceraian ini digunakan sebagai
	Pejabat Pencatatan Sipil.
	NIP

Formulir 22 - Surat keterangan pembatalan perceraian, dengan kode F-2.09

G. Pencatatan Kematian

Akta kematian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagai bukti autentik atas peristiwa kematian seseorang. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat oleh negara dalam bentuk akta kematian.

Tujuan kepemilikan akta kematian yaitu memberikan status dan kepastian hukum atas peristiwa kematian seseorang, memberikan perlindungan data pribadi penduduk yang berkaitan dengan kematian, memberikan fasilitasi pelayanan publik sebagai implikasi pencatatan kematian, guna tertib administrasi kependudukan dan memberikan kontribusi dalam pemeliharaan database kependudukan yang akurat, mutakhir dan dapat dimanfaatkan.

Manfaat kepemilikan akta kematian yaitu sebagai pembuktian kematian secara hukum, pengurusan warisan/hubungan hutang-piutang/asuransi/pensiun bagi pegawai (janda/duda), pemberian tunjangan keluarga, pengurusan taspen/asuransi, pencairan dana tabungan di bank, persyaratan perkawinan bagi pasangan yang ditinggal mati, perubahan status sebagai penduduk dan sebagai pelengkap data statistik vital kematian.

1. Dasar Hukum Pencatatan Kematian

Pencatatan Kematian di Wilayah NKRI

- Pasai 44 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23
 Tahun 2006
 - Keterangan:
 - Pengaturan dalam pasal 44 ayat (1) telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
- Penjelasan pasal 44 ayat (3) telah ditiadakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
- Pasal 44 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24
 Tahun 2013
 - Keterangan:
 - Pengaturan dalam pasal 44 ayat (1) merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013
- 4) Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
- Pasal 61 dan Pasal 62 ayet (1), (2) dan (3) PERMENDAGRI Nomor 108
 Tahun 2019

Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan ayat
 (5), Pasal 7 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019

b. Pencatatan Kematian di Luar Wilayah NKRI

- Pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
- 2) Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
- 3) Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
- Pasal 63 ayat (1), dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (2) dan Pasal 65
 PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019
- Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (2)
 PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019

2. Pencatatan Kematian di Wilayah NKRI

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya atau anak atau ahli waris atau keluarga lainnya di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili.

Persyaratan Pencatatan Kematian di Wilayah NKRI

Pencatatan kematian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- Fotokopi surat kematian meliputi:
 - a) Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain.
 - b) Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya.
 - Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya.
 - d) Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah negara kesatuan republik Indonesia.
- Fotokopi Kartu Keluarga atau dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.

b. Tata Cara Pencatatan Kematian di Wilayah NKRI

Pencatatan kematian dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili. Pencatatan kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris tetapi dapat juga dilaporkan oleh keluarga lainnya, termasuk ketua RT. Pencatatan kematian, dapat dilakukan melalui:

- Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.
 - a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 dengan menyerahkan persyaratan;
 - b) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat kematian yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), Dinas tidak menarik surat kematian asli, WNI melampirkan fotokopi Kartu Keluarga untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01, untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang di scan/ di foto untuk diunggah harus aslinya, WNI dan OA tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01, Orang Asing menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi KITAS/SKTT atau fotokopi KITAP/KTP-el, WNI bukan penduduk menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan RI yang meninggal dunia, dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian. Pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dengan memenuhi persyaratan berupa fotokopi penetapan pengadilan, dalam hal subjek akta tidak tercantum dalam KK dan database kependudukan kutipan akta kematian diterbitkan tanpa NIK.

 c) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;

- d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
- e) Kutipan akta kematian disampaikan kepada pemohon.

2) Petugas Registrasi Desa/Kelurahan

- a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
- Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
- c) Petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi formulir pelaporan dan persyaratan, kepada petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk diterbitkan kutipan akta kematian;
- d) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
- e) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
- g) Kutipan akta kematian disampaikan kepada pemohon.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Kematian

Formulir yang digunakan dalam pencatatan kematian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari:

- Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01.
- 2) Formulir hasil pelayanan pencatatan kematian, terdiri dari:
 - a) Formulir register akta kematian, dengan kode F-2.17.
 - Formulir kutipan akta kematian, dengan kode F-2.23.

3. Pencatatan Kematian di Luar Wilayah NKRI

Pencatatan kematian WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

a. Pelaporan Hasil Pencatatan Kematian WNI yang Telah Dicatatkan di Negara Setempat

1) Persyaratan Pelaporan Pencatatan Kematian

Kematian WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Fotokopi kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat
- b) Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia;
- Fotokopi surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

2) Tata Cara Pelaporan Pencatatan Kematian

Kematian WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir F-2.02 pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
- b) Pejabat pada Perwakitan Republik Indonesia di luar negeri melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan; Catatan: untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), Perwakilan Republik Indonesia tidak menarik kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat, untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang di scan/ di foto untuk diunggah harus aslinya, fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia atau surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.02.

- c) Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat bukti pelaporan dan Surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.

3) Formulir

Kematian WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan menggunakan formulir sebagai berikut:

- Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02.
- Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.26.

b. Pencatatan Kematian WNI di Luar Wilayah NKRI Dalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Kematian Bagi OA

1) Persyaratan Pencatatan Kematian di Luar Wilayah NKRI

Kematian WNI di luar wilayah NKRI dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi orang asing, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Fotokopi surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat.
- Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia.
- Fotokopi surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

2) Tata Cara Pencatatan Kematian di Luar Wilayah NKRI

Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi orang asing, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 serta menyerahkan persyaratan;
- Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tidak menarik surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat asli, untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang di scan/di foto untuk diunggah harus aslinya, fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia atau surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.02.

- Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
- e) Kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.

3) Formulir

Pencatatan kematian WNI pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menggunakan formulir sebagai berikut:

- a) Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02.
- Register akta kematian dengan kode F-2.17 dan kutipan akta kematian dengan kode F-2.23.

4. Lampiran Formulir Dalam Pencatatan Kematian

- a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB III Poin A Angka 4 Huruf a Buku Petunjuk Teknis ini).
- Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02 (Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB III Poin A Angka 4 Huruf f Buku Petunjuk Teknis ini).
- c. Formulir hasil pelayanan pencatatan kematian, terdiri dari:
 - Formulir register akta kematian, dengan kode F-2.17, sebagai berikut:

AKTA	A KEMATIAN
Warga Nego	PTS
Namor :	
NK:	
Pada heri ini tangsai tangsai	SPAT
	opolia .
	mamatshus,
pekerisan elemet tems	set tinggel
	m
4	
metaporkan bahwa di pada hari pada hari	tanggal tehun
pokul telah meninggal dunia	
	odo tanggal tahun
	pat tinggal terakhir.
posegono.	
	(ski-iski/ pecempuan
Ibu Kandung bernama N	
SUCH A CONTRACT OF THE STREET	pekerjaan
alamat tempat tinggal terskhir	A PARTICULAR PROPERTY OF THE P
aumat sempat senggai terawin	
Ayah Kandung berrama WB	(
tanggal tahun.	
alamat tempat tinggal terakhir	
leanance commence and the commence of the comm	
Pencatatan Kematian ini disaksikan oleh :	
1 umur ta	hun, pekerjaan
slamat tempat tinggal	
2 umur t	ahun, pekerjaan
alamat tempat tinggal	
	(CONTRACTOR CONTRACTOR CONT
Setelah Akta Kematian ini dibacakan dan dijelaskan,	ditendetengani oleh pelapor, saksi dan saya.
tanda tangan	
Pelapor	Pejabat Pencatatan Sipil
Lindbar	r spaces r streament sept

Formulir 23 - Register Akta Kematian, dengan kode F-2.17

2) Formulir kutipan akta kematian, dengan kode F-2.23

Noenor Induk K ependudukan :	
Personnel Registration Number	
3,2,000	TATAN SIPIL
	TRY OFFICE
WARGA NEGARA	
NATIONALITY	
KUTIPAN	AKTA KEMATIAN
EXCERPT OF S	DEATH CERTIFICATE
Berdasarkan Akta Kematian Nomor	
By Virtue of Death Certificate Number	
menurut stbid	
in accordance with State gaezette	
behwa di	
that in	
peda tanggal	
on date	
tahun	
on year	MANAGES STATE OF THE STATE OF T
telah meninggal dunia seorang bernama T	
a person has deceased by name of Mr/Mr	
lehir di	
bom in	
•	
on date	
tahun	
on year	
	Kutipan ini dikeluarkan
	The excerpt is issued
	Pade tanggal
	On date
	#45 E250 1
	Pejabat Pencatatan Sipil
	Officer of Civil Registration

Formulir 24 - Kutipan Akta Kematian, dengan kode F-2.23

 surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.26 sebagai berikut:

Surat Keterangan Pelaporan Pencal	tatan Sipil di Luar Wilayah NKRI F-2.26
SURAT KETERANG	AN PELAPORAN PENCATATAN SIPIL
	ARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Control of the Contro	NOT:
steering that the same of the	
Pada hari ini tanggal	bulan tahun Saya Pejaba
Pencatatan Sipi telah	menerima pelaporan pencatatan dar
Nama	
NIK	
Nomor Dokumen Perjalanan Ri	30
Tempat Tanggal lahir	\$-
Pekeriaan	8
Agama	- X
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	1 D
Alamat	1
Kewarganegaraan	§ .
Pencatatan	lersebut telah dilaksanakan pada
tanogal	Nomor Akta
vang ditertifikan oleh	dan telah tercatat dalam
daftar pencatalan di Ked	tutaan Besar Republik Indonesia / Konsulat Jendera
Republik Indonesia/Konsulat Repub	Ik Indonesia
Nomor Tang	gal .
Surat Keterangan Pelaporan Pencal	atanini bukan merupakan akta
	-
A DOTO A O DEDUKADUA	a.n Kantor Perwaldian Republik Indonesia
* FOTO 4x6 BERWARNA BERDAMPINGAN SUAMI ISTRI	
ELECTRICAL STREET, AND STREET, AND ISSUED	
(BAGI PERKAMNAN)	

Formulir 25 - Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara, dengan kode F-2.26

H. Pencatatan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk upaya pemenuhan hak anak serta perlindungan anak. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain mengatur pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak⁹. Pengangkatan anak hakikatnya adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

Proses hukum pelaksanaan pengangkatan anak, pada prinsipnya melalui 2 (dua) tahap yaitu tahap pelaksanaan pengangkatan anak (penetapan/putusan pengadilan atau adat kebiasaan) dan tahap pencatatan pengangkatan anak. Pelaksanaan pengangkatan anak diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pencatatan pengangkatan anak diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya.

Pengangkatan anak melalui penetapan/putusan pengadilan hakikatnya adalah keputusan hukum mengenai keabsahan suatu pengangkatan anak. Sedangkan pencatatan pengangkatan anak merupakan pembuatan/penerbitan alat bukti autentik terhadap pengangkatan anak tersebut. Hasil dari pencatatan pengangkatan anak, berupa catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

1. Dasar Hukum Pencatatan Pengangkatan Anak

Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI

- 1) Pasal 47 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
- Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
- 3) Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
- Pasal 66 Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

⁹ Republik Indonesia, Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab VIII, Pasal 39

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat
 (4) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

b. Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRI

- Pasal 48 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5), Penjelasan Pasal 47 Ayat (1)
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- Pasal 48 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Perpres Nomor 96 Tahun 2018.
- Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.
- Pasel 7 ayat (3), Pasel 8 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

2. Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI

Pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan. Kewajiban melaporkan pencatatan pengangkatan anak adalah orang tua angkat atau orang yang dikuasakan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat calon anak angkat berdomisili.

a. Persyaratan Pencatatan Pengangkatan Anak

Pencatatan pengangkatan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- Fotokopi salinan penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak,
 Penetapan atas putusan pengadilan negeri atau pengadilan agama,
 menerapkan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak.
- Kutipan akta kelahiran;
- Fotokopi Kartu Keluarga orang tua angkat;
- Fotokopi dokumen perjalanan bagi orang tua angkat orang asing.

b. Tata Cara Pencatatan Pengangkatan Anak

Pencatatan pengangkatan anak dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan (F-2.01) serta menyerahkan persyaratan;
- Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan,

Catatan:

Petugas pelayanan tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli, fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 dan tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung, ibu kandung dan orang tua angkat, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. Dalam hal analisis hukum pencatatan pengangkatan anak berbeda dengan tempat diterbitkannya akta kelahiran maka Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat anak angkat berdomisili, berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat diterbitkannya akta kelahiran.

- Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- 4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir kepada pemohon, juga diterbitkan KIA bila belum memiliki KIA serta Kartu Keluarga orang tua angkat dengan mencantumkan status hubungan dalam keluarga sebagai anak dan dalam kolom orang tua tetap tercantum nama orang tua kandung.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pengangkatan Anak

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pengangkatan anak di Indonesia, terdiri dari:

- Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, kode F-2.01.
- Catatan pinggir mengenai pengangkatan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak, dengan kode CP.04.

3. Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRI

Pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pelaporan Hasil Pencatatan Pengangkatan Anak yang Telah Dicatatkan di Negara Setempat

1) Persyaratan Pelaporan Pencatatan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Fotokopi bukti pencatatan pengangkatan anak dari negara setempat;
- b) Kutipan akta kelahiran anak wna/bukti kelahiran anak WNA;
- c) Fotokopi dokumen perjalanan republik Indonesia orang tua angkat;
- d) Fotokopi persetujuan tertulis dari pemerintah republik Indonesia;
- e) Fotokopi persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

2) Tata Cara Pelaporan Pencatatan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan;
- Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
 Catatan:

Persyaratan bukti pencatatan pengangkatan anak dari negara setempat, dokumen perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat, persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia atau persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak berupa fotokopi (asli hanya diperlihatkan);

- Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak;
- e) Surat keterangan pengangkatan anak diberikan kepada Pemohon;
- Pemohon melaporkan pengangkatan anak warga negara asing kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota di tempat tinggalnya setelah kembali di Indonesia untuk direkam dalam database kependudukan;

 Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.

3) Formulir

Pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan menggunakan formulir sebagai berikut:

- Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02.
- b) Surat keterangan pengangkatan anak WNA oleh WNI di Luar Negeri, dengan kode F-2.27.

Pencatatan Pengangkatan Anak WNA oleh WNI di Luar Wilayah NKRI Dalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Pengangkatan Anak Bagi Orang Asing

1) Persyaratan Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRI

Pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi orang asing, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan memenuhi persyaratan berupa:

- Fotokopi salinan penetapan pengadilan atau surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan dari negara setempat;
- b) Kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing; dan
- Fotokopi dokumen perjalanan republik Indonesia orang tua angkat;
- fotokopi persetujuan tertulis dari pemerintah republik Indonesia;
- e) Fotokopi persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

2) Tata Cara Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRI

Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi orang asing, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan tata cara sebagai berikut:

 a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan;

- Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
 Catatan:
 - Salinan penetapan pengadilan atau surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan dari negara setempat, dokumen perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat, persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia atau persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak berupa fotokopi (asli hanya diperlihatkan);
- Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak; dan
- e) Surat keterangan pengangkatan anak diberikan kepada Pemohon.
- f) Pemohon melaporkan pengangkatan anak warga negara asing kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat tinggalnya setelah kembali di Indonesia untuk direkam dalam database kependudukan;
- g) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.

3) Formulir Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRI

Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menggunakan formulir sebagai berikut:

- Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI, dengan kode F-2.02.
- Surat keterangan pengangkatan anak dengan kode F-2.27.

- 4. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengangkatan Anak
 - a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB III Poin A Angka 4 Huruf a Buku Petunjuk Teknis ini).
 - Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02 (Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB III Poin A Angka 4 Huruf f Buku Petunjuk Teknis ini).
 - Formulir hasil pelayanan pencatatan pengangkatan anak
 - Catatan pinggir mengenai pengangkatan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak, dengan kode CP.04, sebagai berikut:

	CATATAN PINGGIR PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK
	etapan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama Nomortanggal
bulan	tahun, bahwa, adalah
anak angkat sah	dari dan
	Pejabat Pencatatan Sipil
	NIP

Formulir 26 - Catatan pinggir mengenal pengangkatan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak, dengan kode CP.04 Surat keterangan pengangkatan anak WNA oleh WNI di Luar Negeri, dengan kode F-2.27, sebagai berikut:

		N PENGANGKATAN ANAK DI LUAR WILAYAH NKRI
	No	
	Kepada Semua	Yang Berkepentingan
	Pejabat Pencatatan Sipil Ke	dutaan Besar/Konsulat Jenderal/Konsulat
F		, menerangkan
t	pahwa anak laki-laki/perempuan be	rnama
		d bulan
	ahun Nomor Akta	Kelahiran anak
	candung pasangan suami/istri dari	dan
t	perdasarkan Surat Putusan/Pe	netapan Pengangkatan Anak dari
F	Pengadilan	Nomor
		dan/atau Surat Keterangan Pengangkatan Negara
	Nomor Tanggal	Tahun
		Vistri dandan
		Rt Rw
		Kecamatan
,	Kab/Kota	Provinst
		20
1	Dikukuhkan di	
	Pada tanggal20	Pejabat Pencatatan Sipil
	770	pada Perwakilan Republik Indonesia
	Pejabat Pencatatan Sipil	
2		

Formulir 27- Surat Keterangan Pengangkatan Anak WNA oleh WNI di Luar Wilavah NKRI

I. Pencatatan Pengakuan Anak

Proses pengakuan anak sebagai pemenuhan hak anak untuk memperoleh identitas dan mengetahui asal usul dari seorang anak yang baru lahir. Pengakuan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diartikan bahwa pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa pengakuan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Walau demikian ketentuan pengakuan anak oleh seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah dimaksud, tetap dapat dilaksanakan pencatatan berdasarkan penetapan pengadilan.

1. Dasar Hukum Pencatatan Pengakuan Anak

- Pasal 49 ayat (1), (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
 Keterangan :
 - Penjelasan Pasal 49 ayat (1) telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 - Pasal 49 ayat (2) telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
- Pasal 49 ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Keterangan:

- Pengaturan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
- Pengaturan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) merupakan perubahan dari Undang-Undang N0 23 Tahun 2006
- Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), Perpres Nomor 96 Tahun 2018
- d. Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
- e. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), (3), (4) dan ayat (5), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

2. Pencatatan Pengakuan Anak di Wilayah NKRI

Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisli.

a. Pencatatan Pengakuan Anak di Wilayah NKRI

1) Persyaratan Pencatatan Pengakuan Anak di Wilayah NKRI

Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah NKRI dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b) Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME;
- c) Kutipan akta kelahiran anak;
- d) Fotokopi Kartu Keluarga ayah atau ibu;
- e) Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

2) Tata Cara Pencatatan Pengakuan Anak di Wilayah NKRI

Pencatatan pengakuan anak dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta menyerahkan persyaratan.
- b) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan,

Catatan:

Persyaratan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berupa fotokopi (asli hanya diperlihatkan), Dinas tidak menarik surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Tuhan Yang Maha Esa asli, fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01, tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

- c) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam data basis kependudukan;
- d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
- e) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil kabupaten/ kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- f) Kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.

3) Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pengakuan Anak

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pengakuan anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari:

- Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01, terlampir.
- Formulir kelengkapan persyaratan pencatatan pengakuan anak berupa surat pernyataan pengakuan anak, dengan kode F-2.10.
- Formulir hasil pelayanan pencatatan pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari;
 - (1) Formulir register akta pengakuan anak, dengan kode F-2.18.
 - (2) Formulir kutipan akta pengakuan anak, dengan kode F-2.24.
 - (3) Catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelhiran, dengan kode CP.05.

b. Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

1) Persyaratan Pencatatan Pengakuan Anak

Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Fotokopi salinan penetapan pengadilan
- b) Kutipan akta kelahiran anak;
- c) Fotokopi Kartu Keluarga ayah atau ibu.

2) Tata Cara Pencatatan Pengakuan Anak

Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta menyerahkan persyaratan;
- b) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Persyaratan salinan penetapan pengadilan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli, fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01, tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

- c) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam data basis kependudukan;
- d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

3) Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pengakuan Anak

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari:

- a) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengan kode F-2.01.
- b) Catatan pinggir pengakuan anak pada akta kelahiran dengan kode formular CP.06.

3. Pencatatan Pengakuan Anak di Luar Wilayah NKRI

- a. Pencatatan Pengakuan Anak Bagi WNI Bukan Penduduk
 - 1) Persyaratan Pencatatan Pengakuan Anak Bagi WNI Bukan Penduduk

Pencatatan pengakuan anak bagi WNI bukan Penduduk dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Kutipan akta kelahiran anak;
- d) Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia.

2) Tata Cara Pencatatan Pengakuan Anak Bagi WNI Bukan Penduduk

Pencatatan pengakuan anak bagi WNI bukan Penduduk dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
- b) Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
 Catatan:

Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan). Dinas tidak menarik surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa asli.

- c) Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak dan membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
- e) Kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon

Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengakuan Anak Bagi WNI Bukan Penduduk

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pengakuan anak WNI bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari:

- a) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI, dengan kode
 F-2.02, terlampir.
- b) Formulir kelengkapan persyaratan pencatatan pengakuan anak berupa Surat Pernyataan Pengakuan Anak, dengan kode F-2.10.
- Formulir hasil pelayanan pencatatan pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari:
 - (1) Formulir register akta pengakuan anak, dengan kode F-2.18,
 - (2) Formulir kutipan akta pengakuan anak, dengan kode F-2.24,
 - (3) Catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelairan, dengan kode CP.05.

b. Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI Bukan Penduduk di Luar NKRI

Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI bukan penduduk di luar wilayah NKRI dilakukan di kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Persyaratan Pencatatan Pengakuan Anak Bukan Penduduk di Luar NKRI

Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI bukan penduduk dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Fotokopi salinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Kutipan akta kelahiran anak; dan
- c) Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia

2) Tata Cara Pencatatan Pengakuan Anak Bukan Penduduk di Luar NKRI

Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI bukan penduduk dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.02 serta menyerahkan persyaratan;
- Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
 Catatan:

Persyaratan salinan penetapan pengadilan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli.

- Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengakses basis data kependudukan untuk melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
- Kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengakuan Anak Bukan Penduduk di Luar NKRI

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI bukan Penduduk di luar NKRI, terdiri dari:

- Formulir Pelaporan pencatatan sipil di Luar Wilayah NKRI, dengan kode
 F-2.02.
- b) Catatan pinggir pengakuan anak pada akta kelahiran dengan kode formulir CP.06.

- 4. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengakuan Anak
 - Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode
 F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 27, BAB III Poin A Angka 4 Huruf a Buku Petunjuk Teknis Ini).
 - Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02 (Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB III Poin A Angka 4 Huruf f Buku Petunjuk Teknis ini).
 - c. Formulir kelengkapan persyaratan pencatatan pengakuan anak berupa Surat Pernyataan Pengakuan Anak, dengan kode F-2.10 sebagai berikut:

KABUPA	TEN/KOTA
SURAT PERYATA	AAN PENGAKUAN ANAK
rang bertanda tangan di bawah in	
Verna	1
VIK .	1
empat/tanggat lahir	* ·
Pekerjaan	3
Mamat	
lengan ini menyatakan mengakui	seorano anak
olologis saya:	and and
Vama	
VIK .	•
lenis ketamin	4
Tempat/tanggal lahir	
Nomor Akta Kelahiran	1
anggal/Bulan/Tahun Akta Kelahir	mm ·
Dinas Kab/Kota Yg Menerbitkan	
Akta Kelahiran	*
Alamat Dinas Dukcapil	
yang merupakan anak kandung da	ori sporang ibu :
ang merupakan anak kanoung da tama	ar sectain tou .
Harria HIK	
Tempat/tanggal lahir	*
Pekerjaan	3
Mamat	
Demikian surat pernyataan ini	
sebenamya, saya bersedia mem	
anggung jawab atas pengaku: iyatakan ini.	an anak yang saya
	20
	Menyetujui
bu Kandung Anak	Yang Membuat Pernyataan Materal 6.000

Formulir 28 - Surat Pernyataan Pengakuan Anak, dengan kode F-2.10

- d. Formulir hasil pelayanan pencatatan pengakuan anak, terdiri dari:
 - Formulir register akta pengakuan anak, dengan kode F-2.18, sebagai berikut:

AKTA PENGAKUAN ANAK Warga Negara				
NIK Ibu Kandung :				
dihadapan saya		tahun pukul Kepala		
1. alamat tempat ting	geaf	pekerjaan		
2	umur tahun	pekerjaan		
laki/perempuan berr tanggal ibunya bernama dengan Akta Kelahir Pengakuan Anak disa I alamat tempat ling	tahun Kelah an nomor tangga aksikan cleh : umur tahun	a mengakui seorang ana r di	pada dan atatkan scatatan	
2	umur tehun	pekerjaan		
	uan Anak ini dibacakan dan	dijelaskan, ditandatangani o		
Tenda tangan Ibu Kandung	Tande tengen Ayah Kandung	Pejabat Pencatatan Sipil		

Formulir 29 - Register akta pengakuan anak, dengan kode F-2.18

 Formulir kutipan akta pengakuan anak, dengan kode F-2.24, sebagai berikut:

Personel Re	: Kependuduk an ; gistration Number
	PENCATATAN SIPIL REGISTRY OFFICE
	WARGA NEGARA NATIONALITY
EXCE	KUTIPAN AKTA PENGAKUAN ANAK RT OF CHILD ACKNOWLEDGEMENT CERTIFICATE
By Virtue of bahw a di that in	Akta Pengakuan Anak Nomor: Child Acknowledgement Certificate Number
a child by no	ik bernama ame of il tahun
On date telah diakui has been ad	on year sebagai anak kandungnya oleh knowledged as their child by
danand	
	Kutipan ini dikeluarkan

Formulir 30 - Kutipan akta pengakuan anak, dengan kode F-2.24

 Catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelhiran, dengan kode CP.05, sebagai berikut:

	IN PINGGIR PENGAKUAN ANAK
Berdasarkan Akta Pengakuan Ana bulan bulan bah sebagai anak oleh	tahun yang diterbitkan wa telah diakul

Formulir 31 - Catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, dengan kode CP.05 Catatan pinggir pengakuan anak pada akta kelahiran dengan kode formular CP.06.

CATATAN PINGGIR PENCATATAN PENGAKUAN ANAK BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN

Berdasarkan Penetapan	Pengadilan Nomor
tanggal bulan	Tahun bahwa
telah diakui sebagai anak	oleh
	20
	Pejabat Pencatatan Sipil
	reposit oreatetar opi
	NIP

Formulir 32 - Catatan Pinggir Pencatatan Pengakuan Anak Berdasarkan Penetapan Pengadilan

J. Pencatatan Pengesahan Anak

Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara. Dalam pencatatan pengesahan anak tersebut, dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran¹⁰. Pengesahan anak juga dapat dilakukan pencatatan melalui proses pengakuan anak yang telah dilakukan, pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya, dan pengesahan anak dapat juga dilakukan tanpa melalui pengakuan anak, yakni dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orangtuanya berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan negeri atau pengadilan agama.

Dalam substansi perubahan Undang-Undang yang berkaitan dengan pencatatan sipil adalah termasuk dalam hal pencatatan pengakuan dan pengesahan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengakuan anak dan pengesahan anak hanya berlaku untuk penduduk yang beragama non muslim. Sebab, untuk penduduk yang beragama Islam, pengakuan anak dan pengesahan anak belum dapat dicatatkan, karena hukum Islam tidak mengenal pengakuan anak dan pengesahan anak.

Di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dipertegas bahwa pengakuan anak dan pengesahan anak dapat dilakukan oleh penduduk yang telah melaksanakan perkawinan agama secara sah. Dengan demikian, dalam perubahan Undang-Undang tersebut, pengakuan anak dan pengesahan anak tidak dibedakan untuk penduduk yang beragama Islam maupun non-Muslim.

Terdapat pergeseran pengertian pengesahan anak, sebelumnya diartikan bahwa pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Hal ini terdapat dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah menjadi pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara. Namun demikian pencatatan pengesahan anak oleh seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dapat dilakukan pencatatan berdasarkan penetapan pengadilan.

¹⁰ Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Permendagri No. 108 Tahun 2019, BN No. 1789 Tahun 2019, Ps. 77.

1. Dasar Hukum Pencatatan Pengesahan Anak

- a. Pasal 50 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
 Keterangan :
 - Penjelasan Pasal 50 ayat (1), (2) dan ayat (3) telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
- b. Pasal 50 ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Keterangan:

- Pengaturan dalam Pasal 50 ayat (1), (2), dan ayat (3) merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Penjelasan Pasal 50 ayat (1)
- c. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
- d. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
- e. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), (3), (4) dan ayat (5), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

2. Pencatatan Pengesahan Anak di Wilayah NKRI

Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisli.

a. Pencatatan Pengesahan Anak di Wilayah NKRI

1) Persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak di Wilayah NKRI

Pencatatan pengesahan anak bagi penduduk WNI dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa;

- c. Kutipan akta kelahiran;
- Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- e. Fotokopi kartu keluarga orang tua.

Pencatatan pengesahan anak bagi Orang Asing dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Kutipan akta kelahiran;
- Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c) Fotokopi Kartu Keluarga orang tua; dan
- fotokopi dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu orang asing.

Tata Cara Pencatatan Pengesahan Anak di Wilayah NKRI

Pencatatan pengesahan anak bagi penduduk WNI dan Orang Asing dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-201 serta menyerahkan persyaratan;
- Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak berupa fotokopi, asli hanya diperlihatkan dan Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli, fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01, tidak perlu KTP-el saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

- Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
- Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- Kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.

Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengesahan Anak di Wilayah NKRI

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pengesahan anak Penduduk WNI dan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari:

- a) Formulir pengajuan pelayanan pencatatan pencatatan pengesahan anak Penduduk WNI dan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.01.
- b) Formulir hasil pelayanan pengesahan anak Penduduk WNI dan Orang Asing, terdiri dari:
 - Formulir register akta pengesahan anak, dengan kode F-2.19.
 - 2) Formulir kutipan akta pengesahan anak, dengan kode F-2.25.
 - Formulir catatan pinggir pencatatan pengesahan anak, dengan kode CP.07.
- Pencatatan Pengesahan Anak yang Dilahirkan Sebelum Orang Tuanya Melaksanakan Perkawinan Sah Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - 1) Persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak

Pencatatan pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili berdasarkan penetapan pengadilan.

Pencatatan pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Fotokopi salinan penetapan pengadilan;
- b) Kutipan akta kelahiran; dan
- c) Fotokopi kartu keluarga.

2) Tata Cara Pencatatan Pengesahan Anak

Pencatatan pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta menyerahkan persyaratan;
- b) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli, fotokopi kartu keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 dan tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

- c) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- e) Kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

3) Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pengesahan Anak

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari:

- Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01.
- b) Catatan pinggir mengenai pengesahan anak berdasarkan pengadilan pada akta kelahiran dengan kode CP.08.

3. Pencatatan Pengesahan Anak di Luar Wilayah NKRI

Pengesahan anak bagi WNI bukan penduduk di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tua pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

- a. Pencatatan Pengesahan Anak Bagi WNI Bukan Penduduk di Luar NKRI
 - Persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak Bagi WNI Bukan
 Penduduk di Luar NKRI

Pencatatan pengesahan anak bagi WNI bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pencatatan pengesahan anak bagi WNI bukan penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Kutipan akta kelahiran;
- b) Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan sebelum kelahiran anak; dan
- c) Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia.

Tata Cara Pencatatan Pengesahan Anak Bagi WNI Bukan Penduduk di Luar NKRI

Pencatatan pengesahan anak bagi WNI bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
- b) Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
 Catatan:
 - Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak berupa fotokopi, asli hanya diperlihatkan. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tidak menarik kutipan akta perkawinan asli dan fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
- Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat mengakses basis data kependudukan untuk melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;

- d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mencatat dalam register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
- Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- f) Kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.
- Formulir Pencatatan Pengesahan Anak Bagi WNI Bukan Penduduk di Luar NKRI

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pengesahan anak bagi WNI bukan penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari:

- a) Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode
 F-2.02.
- b) Formulir hasil pelayanan pengesahan anak bagi WNI bukan Penduduk WNI, terdiri dari;
 - Formulir register akta pengesahan anak, dengan kode F-2.19.
 - (2) Formulir kutipan akta pengesahan anak, dengan kode F-2.25.
- Pencatatan pengesahan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI Bukan Penduduk di Luar NKRI
 - Persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak Bukan Penduduk di Luar
 NKRI

Pengesahan anak bagi WNI bukan Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri berdasarkan penetapan pengadilan, dan pencatatannya dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Fotokopi salinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang berwenang sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b) Kutipan akta kelahiran; dan
- Fotokopi dokumen perjalanan republik Indonesia.

Tata Cara Pencatatan Pengesahan Anak Bukan Penduduk di Luar NKRI

Pencatatan pengesahan anak bagi WNI bukan Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
- Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Salinan penetapan pengadilan berupa fotokopi, asli hanya diperlihatkan.

- Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat mengakses basis data kependudukan untuk melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- e) Kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Formulir Pencatatan Pengesahan Anak Bukan Penduduk di Luar NKRI

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pengesahan bagi WNI bukan Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan menggunakan formulir, terdiri dari:

- a) Formulir pengajuan pelayanan pencatatan pengesahan anak bagi WNI bukan Penduduk WNI yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b) Berupa catatan pinggir pada akta kelahiran, dengan kode CP.08.

- 4. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengesahan Anak
 - a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB III Poin A Angka 4 Huruf a Buku Petunjuk Teknis ini).
 - Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02 (Terlampir pada halaman 35 – 37, BAB III Poin A Angka 4 Huruf f Buku Petunjuk Teknis ini).
 - c. Formulir hasil pelayanan pengesahan anak, terdiri dari:
 - Formulir register akta pengesahan anak, dengan kode F-2.19, sebagai berikut:

	. 4.45 (4.57 (4.56))	GESAHAN ANAM	
lomor Akta IK Ayah Kandung IK Bu Kandung IK Anak			
ada hari ini	fanggal bul	en	tahun hadir dihadapar
aya		Pejaba	it Pencatatan Sipil d i
. Name	unvur tahur	n pekerjaan	RT RW
Desa Kejurahan		Kecamatan	12.112.11.111.111.111.111.111.111.111.1
***************************************			Provinsi
		or Grand All Property of the Control	alamat Tempat linggal
Desa-Kelurahan Kabupaten/Keta		Kecamatan	Provinsi
V900Desenviore			
3.000033300001CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC			
Uda Nikah/ Akta P	erkawinan nomor	tar	nggal bulan tahu
dan	ratau penetapan pe	engadilar	Nome
dan tanggal aya bahwa merek	/afau penetapan pe bulan	engadilan tahun orang anak t	menerangkan kepad aki-laki / perempuan bemam
dan tanggal aya bahwa merel	rafau penelapan po bulan sa mengesahkan se tempat la	engadilan tahun tahun orang anak t ahir di	menerangkan kepad aki-taki / perempuan bemam pada tanopal
dan tanggai aya bahua merel sulan tahun	/afau penetapan pi bulan :a mengesahkan sa tempat ti NRC	engadilan tahun orang anak t ahir di	menerangkan kepad aki-laki / perempuan bemam pada langgal dan seorang ibu bemam
dan tanggai aya bahwa menel sulan tahun Gelahtran anak tersebu	ratau penetapan pi bulan sa mengesahkan sa tempat ti NRC	engadilan tahun orang anak t ahir di sanak ta	menerangkan kepad aki-laki / perempuan bemam pada langgal dan seorang ibu bemam
dan tanggai aya bahwa merek sulen tahun Gelahiran anak tersebi anggal	ratau penetapan pi bulan sa mengesahkan se tempat ti NRK if tetah dicatalkan dengi bulan tahu	engadilan tahun orang anak t ahir di sanak ta	menerangkan kepad aki-laki / perempuan bemam pada langgal dan seorang ibu bemam
dan tanggal aya bahwa merel utan tahun telahiran anak tersebi anggal Pencafalan Anak disak	rafau penetapan pi bulan sa mengesahkan sa tempat la Mik in tetah dicatalkan denga bulan tahu sikan oleh	engadilan tahun erang anak t ahir di	menerangkan kepad aki-laki / perenpuan bemara pada langgal dari seorang ibu bemara n nomor
dan tanggal ulan tahun tahun (elabiran anak tersebi anggal Pencatalan Anak disak Nama	rafau penetapan pi bulan sa mengesahkan sa tempat la Nik ni telah dicafalkan denga bulan tahu sikan oleh :	engadilan tahun erang anak t ahir di	menerangkan kepad aki-taki / perempuan bemam pada langgal dari seorang ibu bemam n nomor
dan tanggai aya bahwa menel udan tahun (elabiran anak tersebu anggal rencatalan Anak disak I. Nama bampat tian	rafau penetapan pi bulan sa mengesahkan sa tempat li NRC ri telah dicafalkan dengi bulan tahu sikan oleh :	engadilan tahun orang anak t ahir di	menerangkan kepad aki-taki / perempuan bemam pada langgal dari seorang ibu bemam n nomor
dan tanggai aya bahwa menel usian tahun (elabiran anak tersebu anggal vencatalan Anak disak Nama tempat ting DesalKeturahan	ratau penetapan pi bulan is mengesahkan sa tempat li NRC ri telah dicafalkan dengi bulan tahu sikan oleh umur	engadilan tahun orang anak t ahir di	menerangkan kepad aki-taki / perempuan bemam pada langgal dari seorang ibu bemam nomor pekerjaan RT RW Kecamatan
dan tanggal siya bahwa merel sulan tahun Gelahiran anak tersebu anggal Pencatalan Anak disak I, Nama alamat tempat ting DesalKeturahan Kabupaten/Kota	ratau penetapan pi bulan sa mengesahkan sa tempat la NRC It tetah dicatalkan dengu bulan tahu sikan oleh :	engadilan tahun erang anak tahun ahir di an Akla Kelehirar n tahun NIK	menerangkan kepad aki-laki / perenpuan bemara pada langgal dari seorang ibu bemara n nomor pekerjaan RT RW
dan tanggal aya bahwa menel ulan tahun Kelahiran anak tersebu anggal Pencatalan Anak disak Nama alamat tempat ting DesalKelurahan Kabupaten/Kota	ratau penetapan pi bulan sa mengesahkan sa tempat la Nik ri telah dicatalkan denga bulan tahu sikan oleh : umur	engadilan tahun erang anak tahur ahir di en Akla Kelehirar n tahun NIK Provinsi tahun NIK	menerangkan kepad aki-taki / perentpuan bemani pada tanggal dari seorang ibu bemam nomor pekerjaan RT RW Kecamatan pekerjaan pekerjaan
dan tanggal aya bahwa menel ulan tahun (elahiran anak tersebi anggal - Nama atamat tempat ting DesalKelurahan Kabupaten/Kota Nama atamat tempat ting	rafau penetapan pi bulan sa mengesahkan sa tempat la Nik ri telah dicatalkan denga bulan tahu sikan oleh umur gal	engadilan tahun erang anak tahir di an Akla Kelehirar n tahun NIK Provinsi sahun NIK	menerangkan kepadaki-laki / perempuan bemam pada langgal dari seorang ibu bemam nomor pekerjaan RT RW RT RW
dan tanggal selahiran anak tersebi anggal sencatalan Anak disak Nama alamat tempat ting DesalKelurahan Kabupaten/Kota Nama alamat tempat tings DesalKelurahan Kabupaten/Kota Nama	rafau penetapan pi bulan sa mengesahkan sa tempat la Nik ri telah dicafalkan denga bulan tahu sikan oleh : umur gal	engadilan tahun erang anak tahun an Akla Kelehirar n tahun NIK Provinsi tahun NIK	menerangkan kepadi aki-taki / perempuan bemam pada tanggal dari seorang ibu bemam n nomor
dan tanggal sulan anak tersebi anggal eencatalan Anak disak i, Nama alamat tempat ting DesalKekurahan Kabupaten/Kota ! Nama alamat tempat tingo DesalKekurahan Kabupaten/Kota	rafau penetapan pi bulan sa mengesahkan sa tempat la Nik ri telah dicafalkan denga bulan tahu sikan oleh : umur gal	engadilan tahun erang anak tahun an Akla Kelehirar n tahun NIK Provinsi tahun NIK	menerangkan kepad aki-taki / perempuan bemam pada tanggal dari seorang ibu bemam normor pekerjaan RT RW RT RW
dan tanggal aya bahwa menel sulan tahun Kelahiran anak tersebi anggal Pencetalan Anak disak Nama alamat tempat ting DesalKelurahan Kabupaten/Kota I Nama alamat tempat ting DesalKelurahan Kabupaten/Kota Setelah Akta Pengesal	Adau penetapan pi bulan sa mengesahkan sa tempat ta Nik ri telah dicatalkan denga bulan tahu sikan oleh umur gal	engadilan tahun erang anak tahir di an Akla Kelehirar n tahun NIK Provinsi tahun NIK	menerangkan kepad aki-taki / perempuan bemam pada langgal dari seorang ibu bemam nomor pekerjaan RT RW Kecamatan RT RW Kecamatan
dan tanggal aya bahua merel sahua tahua tersebu anggal Annak tersebu anggal Annak disak Nama alamat tempat ting DesalKelurahan Kabupaten/Kota Nama alamat tempat ting DesalKelurahan Kabupaten/Kota Setelah Akta Pengesal andung dan saya.	Adau penetapan pi bulan sa mengesahkan sa tempat ta Nik ri telah dicatalkan denga bulan tahu sikan oleh umur gal	engadilan tahun erang anak tahun sahir di anak tahun NiK	menerangkan kepad aki-taki / perempuan bemam pada langgal dari seorang ibu bemam nomor pekerjaan RT RW Kecamatan RT RW Kecamatan
dan tanggal atya bahwa menel sulan tahua tahua tahua tahua tahua tersebu anggal Pencatalan Anak tersebu alamat tempat ting Desa/Kekurahan Kabupaten/Kota I Nama alamat tempat ting Desa/Kekurahan Kabupaten/Kota Setelah Akta Pengesal tandung dan saya. Tanda tangan	rafau penetapan pi bulan sa mengesahkan sa tempat la NIK ri tetah dicatatkan denga bulan tahu sakan oleh : umur gal umur	engadilan tahun tahun tahun anak tahun anak tahun NiK	menerangkan kepad aki-taki / perempuan bemam pada langgal dari seorang ibu bemam nomor pekerjaan RT RW Kecamatan RT RW Kecamatan
dan tanggal atya bahwa menel salam tahun Kelahiran anak tersebu anggal Pencafalan Anak disak i, Nama alamat tempat ting DesalKelurahan Kabupaten/Kota I. Nama alamat tempat ting DesalKelurahan Kabupaten/Kota Setelah Akta Pengesal andung dan saya.	Afau penetapan pi bulan sa mengesahkan sa tempat la Nik If telah dicafalkan denga bulan sikan oleh umur gal umur tah	engadilan tahun tahun tahun anak tahun anak tahun NiK	menerangkin kepad aki-laki / pereripuan bemara pada tanggal dari seorang ibu bemara n nomor pekerjaan RT RW Kecamatan pekerjaan RT RW Kacamatan hadatangani oleh ayah kandung, ib
dan tanggal aya bahwa menel sulan tahun Kelahiran anak tersebu anggal Pencatalan Anak disak Nama alamat tempat ting Desa Kelurahan Kabupaten/Kota I Nama alamat tempat ting Desa Kelurahan Kabupaten/Kota Setelah Akta Pengesal andung dan saya. Fanda tangan	Afau penetapan pi bulan sa mengesahkan sa tempat la Nik If telah dicafalkan denga bulan sikan oleh umur gal umur tah	engadilan tahun tahun tahun anak tahun anak tahun NiK	menerangkin kepad aki-taki / perenpuan bemani pada tanggal dari seorang ibu bemani nomor pekerjaan RT RW Kecamatan pekerjaan RT RW Kacamatan hadatangani oleh ayah kandung, ib

Formulir 33 - Register ekta pengesahan anak, dengan kode F-2.19

Formulir kutipan akta pengesahan anak, dengan kode F-2.25, sebagai berikut:

PENCATATAN SIPIL REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA.....

KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK EXCERPT OF CHILD LEGITIMATION CERTIFICATE

ahwa di	pada tanggal
hat in	on date
Tahun	seorang anak bernama
on year	a child by fiame of
	telah disahkan sebagai anak kandung oleh
	has been legitimate as their child by
	dan
	and
	Kutipan ini dikeluarkan
	The excerpt is issued
	Pada tanggal
	On date
	Pejabat Pencatatan Sipil
	Officer of Civil Registration
	NIP

Formulir 34 - Kutipan akta pengesahan anak, dengan kode F-2.25

 Formulir catatan pinggir pencatatan pengesahan anak, dengan kode CP.07, sebagai berikut

CATATAN PINGGIR PENCATATAN PENGESAHAN ANAK

bulan tahun ya	ang diterbitkan oleh
	telah disahkan sebagai anak sah
	dan

Formulir 35 - Catatan pinggir pencatatan pengesahan anak, dengan kode CP.07

 Formulir catatan pinggir pencatatan pengesahan anak berdasarkan pengadilan, dengan kode CP.08, sebagai berikut

CATATAN PINGGIR PENCATATAN PENGESAHAN ANAK BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN

tanggal bulan	tahun bahwa
	telah disahkan sebagai anak sah pasangan
suami istri deri	dan
	,20
	Pejabat Pencatatan Sipil

Formulir 28- Catatan Pinggir Pencatatan Pengesahan Anak Berdasarkan Penetapan Pengadilan, dengan kode CP.08

K. Pencatatan Perubahan Nama

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk. Pejabat pencatatan sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

1. Dasar Hukum Pencatatan Perubahan Nama

- Pasal 52 avat (1), (2) dan avat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- c. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
- d. Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.
- e. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), (3), (4) dan ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

2. Pencatatan Perubahan Nama

a. Persyaratan Pencatatan Perubahan Nama

Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- 1) Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri;
- Kutipan akta pencatatan sipil;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga; dan
- 4) Fotokopi dokumen perjalanan bagi OA.

b. Tata Cara Pencatatan Perubahan Nama

Pencatatan perubahan nama dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisili dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan;
- 2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan, dengan Catatan: fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01, tidak menarik salinan penetapan pengadilan negeri asli, tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang di bawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

- Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil; dan
- Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Perubahan Nama

Formulir yang digunakan dalam pencatatan perubahan nama, terdiri dari:

- Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengan kode F-2.01.
- Formulir hasil pelayanan pencatatan perubahan nama berupa catatan pinggir perubahan nama pada akta pencatatan sipil dengan kode CP.09.

3. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Perubahan Nama

- a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB III Poin A Angka 4 Huruf a Buku Petunjuk Teknis Ini).
- Formulir hasii pelayanan pencatatan perubahan nama berupa catatan pinggir perubahan nama pada akta pencatatan sipil dengan kode CP.09, sebagai berikut:

(CATATAN PINGGIR
PENCATA	ATAN PERUBAHAN NAMA
Berdasarkan Penetapan Pe	ngadilan Negeri Nomor
tanggal bulan	tahun bahwa
telah	berubah nama menjadi
	20
	Pejabat Pencatatan Sipil
	NIP

Formulir 36 - Catatan Pinggir Pencatatan Perubahan Nama, kode CP-2.09

L. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan berdasarkan laporan instansi terkait, atau penduduk yang telah berubah status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun dari WNI menjadi WNA yang telah mempunyai ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang berupa Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan Status Kewarganegaraan. Perubahan status kewarganegaraan WNA menjadi WNI dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan untuk perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA dicatatkan pada kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan bahwa perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setla oleh pelabat. Pelabat pencatatan sipil merubah status kewarganegaraannya dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mengamanatkan bahwa perubahan status kewarganggaraan dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk diterbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia yang selanjutnya diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan untuk diproses penetapan perubahan status kewarganegaraannya dan penetapan perubahan status kewarganegaraannya disampaikan/diteruskan kepada Instansi Pelaksana untuk pencatatan perubahan status kewarganegaraannya dan membuatkan catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil.

1. Dasar Hukum Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

- Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI di Wilayah NKRI
 - 1) Pasal 53 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
 - 2) Pasal 54 Perpres Nomor 96 Tahun 2018
 - Pasal 81, Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Permendagri Nomor 108
 Tahun 2019
 - Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

- b. Pencatatan Anak Hasil Perkawinan Campuran
 - Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;
 - Pasal 81, Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Permendagri Nomor 108
 Tahun 2019:
 - Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat
 (3) dan ayat (4), Pasal 8 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019
- Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI Menjadi WNA di Luar Wilayah Republik Indonesia
 - a) Pasal 54 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 / Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
 - b) Pasal 28 PP Nomor 40 Tahun 2019
 - c) Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
 - d) Pasal 81, Pasal 84 ayat (1), (2), (3) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
 - e) Pasal 4 ayat (1), (2) dan ayat (3), Pasal 5 dan Pasal 8 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.
- Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI di Wilayah NKRI
 - a. Persyaratan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI di Wilayah NKRI

Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisli setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI berupa:

- Fotokopi petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- Fotokopi berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia;
- Kutipan akta pencatatan sipil;
- 4) Fotokopi kartu keluarga;
- 5) KTP-el; dan fotokopi dokumen perjalanan.

b. Tata Cara Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI di Wilayah NKRI

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan kode
 F-2.01 serta menyerahkan persyaratan.
- Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Perpres mengenai persyaratan;

Catatan:

- Fotokopi petikan Keputusan Presiden atau fotokopi Petikan Keputusan Menteri dan fotokopi berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia pemohon berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan);
- Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
- Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.
- 6) Dalam hal kutipan akta pencatatan sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir.

c. Formulir Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI di Wilayah NKRI

Formulir yang digunakan dalam pencatatan sipil perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari:

- Formulir pengajuan pelayanan pencatatan sipil dengan kode F-2.01, terlampir:
- Catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan pada akta pencatatan sipil, sebagai berikut;
 - a) Catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI dengan kode CP.10.
 - b) Catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, dengan kode CP.11

d. Penjelasan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI di Wilayah NKRI

- 1) Pemohon menyerahkan fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan atau fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan, dengan penjelasan output dari perubahan status kewarganegaraan WNA menjadi WNI ada yang ditetapkan dengan Perpres dan Kepmenkumham;
 - a) Naturalisasi murni dan orang asing yang telah berjasa kepada Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan Negara dapat diberi kewargan garaan RI oleh Presiden yang dilanjutkan dengan Sumpah Janji.
 - b) Perubahan status kewarganegaraan dari perkawinan campuran yang salah satu pasangannya WNA akan meja WNI ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan tidak perlu sumpah janji.
- Pemohon menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan;
- Dalam hal akta pencatatan sipil diterbitkan negara lain, Dinas menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara lain.

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang telah mendaftar, memilih menjadi WNI atau WNA atau tidak memilih, wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Persyaratan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran

- Pencatatan perubahan status kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a) Fotokopi sertifikat bukti pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dari kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 dan
 - b) Kutipan akta kelahiran.
- Pencatatan perubahan status kewarganegaraan Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memilih menjadi WNI, dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa;
 - a) Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
 - b) Kutipan akta pencatatan sipil;
 - c) Fotokopi Kartu Keluarga bagi penduduk WNI;
- Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memilih menjadi WNA.

Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memilih menjadi WNA dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- a) Fotokopi surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian; dan
- b) Kutipan akta kelahiran.
- Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. Fotokopi izin tinggal tetap; dan
 - b. Kutipan akta kelahiran,

b. Tata Cara Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran

Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan kode
 F-2.01 serta menyerahkan persyaratan;
- Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Sertifikat bukti pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (asli hanya diperlihatkan) atau fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan berupa fotokopi (asli hanya diperlihatkan) atau fotokopi Kartu Keluarga bagi Penduduk WNI karena diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01 atau F-2.02; fotokopi surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian (asli hanya diperlihatkan); fotokopi izin tinggal tetap yang (asli hanya diperlihatkan);

- Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
- Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir diserahkan kepada Pemohon.
- 6) Dalam hal kutipan akta pencatatan sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir.

Formulir Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran

Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing terdiri dari:

- Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI dengan kode F-2.01.
- Formulir hasil pelayanan pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, sebagai berikut:
 - a) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang telah mendapatkan sertifikat bukti pendaftaran, dengan kode CP.12
 - b) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan (WNI atau warga negara asing), dengan kode CP.13
 - c) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih kewarganegaraan, dengan kode CP.14

d. Penjelasan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran

- Pencatatan anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat dicatatkan di dalam Wilayah NKRI melalui Dinas Dukcapil dan di luar Wilayah NKRI melalui Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dengan cara pemohon mengisi F-2.01 atau F-2.02 sampai tersedia format isian pencatatan ABG yang akan disisipkan pada Format F-2.01 atau F-2.02.
- 2) Pencatatan anak yang lahir dari perkawinan campuran:
 - a) Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diterbitkan, anak tersebut, dapat dilaporkan langsung kepada Dinas Dukcapil untuk memperoleh NIK dan kalau belum mempunyai akta kelahiran diterbitkan juga akta kelahirannya dengan status kewarganegaraan sebagai WNI.
 - b) Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diterbitkan, harus jelas terlebih dahulu status anak tersebut (ABG atau WNA) karena berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa anak hasil dari perkawinan campuran memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menkumham melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundang. Untuk itu diperlukan perlu

adanya surat keterangan dari Kemenkumham tentang statuskewarganegaraannya apakah WNI atau WNA, selanjutnya dilaporkan Kepada Dinas Dukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk dibuatkan catatan pinggir sebagai ABG pada akta pencatatan sipil atau surat keterangan sebagai pengganti catatan pinggir apabila aktanya terbitan luar negeri.

- 3) Dalam hal Perwakilan Republik Indonesia belum dapat mencatatkan anak hasil dari perkawinan campuran maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dapat mencatatkannya dan memberikan catatan pinggir pada akta pencatatan Sipil (CP.11) atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara lain.
- Pencatatan Perubahan Status kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Luar Wilayah NKRI
 - a. Persyaratan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Luar Wilayah NKRI

Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA di luar wilayah NKRI dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar NKRI dengan memenuhi persyaratan berupa:

- Fotokopi petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- Kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki; dan
- Fotokopi dokumen perjalanan republik Indonesia.
- b. Tata Cara Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Luar Wilayah NKRI

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara Indonesia di luar wilayah NKRI dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan tata cara sebagai berikut;

- Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan dengan kode
 F-2.02 dan menyerahkan persyaratan;
- Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan berupa fotokopi bukan aslinya (asli hanya diperlihatkan) dan dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan);

- Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- 4) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dan mencatat perubahan status kewarganegaraan dan membuat catatan pinggir pada kutipan akta pencatatan sipil;
- 5) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengirim data perubahan status kewarganegaraan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang perubahan status kewarganegaraan untuk diteruskan kepada menteri melalui direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil;
- Menteri meneruskan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota yang menerbitkan akta pencatatan sipil;
- Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil.

Formulir Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Luar Wilayah NKRI

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan formulir yang terdiri dari;

- Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI, dengan kode F-2.02.
- Formulir hasil pelayanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing, Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan dengan kode F-2.28.

- d. Penjelasan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Luar Wilayah NKRI
 - 1) Dalam hal Dinas Dukcapil mengetahui atau mendapat laporan dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau Kantor Imigrasi yang menyatakan bahwa ada WNI yang mempunyai paspor atau identitas kependudukan negara lain yang masih berlaku, maka WNI tersebut tidak otomatis dapat mencatatkan perubahan status WNI menjadi WNA, tetapi dapat dinonaktifkan sementara data kependudukannya dalam SIAK sambil menunggu diterbitkan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pelepasan sebagai WNI, setelah itu baru bisa dicatatkan perubahan statusnya dari WNI menjadi WNA.
 - 2) Pencatatan Perubahan status WNI menjadi WNA dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dalam hal Perwakilan Republik Indonesia belum dapat mencatatkan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA, maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dapat mencatatkan perubahan status kewarganegaraan tersebut dan memberikan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil (CP.11) atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara lain.

- Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
 - Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode
 F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 27, BAB III Poin A Angka 4 Huruf a Buku Petunjuk Teknis ini).
 - Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02 (Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB III Poin A Angka 4 Huruf f Buku Petunjuk Teknis ini).
 - Formulir hasil pelayanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai berikut:
 - Catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI dengan kode CP.10

CATATAN PINGGIR
PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN
DARI WNA MENIADI WNI

	Nomor tanggal
bulan tahun (dan Berita Acara Sumpah/Pernyataan Janji
Setia Nomor	tanggal bulan
tahunbahwa	telah berubah status
kewarganegaraan dari Warga N	
	caera mammi menjadi warga negara
Indonesia.	
	Pejabat Pencatatan Sipil
	NIP

Formulir 37 - Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, dengan kode CP-2 10 Catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, dengan kode CP.11

Pejabat Pencatatan Sipil

NIP....

Formulir 38 - Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, dengan kode CP-2.11

 Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang telah mendapatkan sertifikat bukti pendaftaran, dengan kode CP.12

CATATAN PINGGIR ANAK BERKEWARGANEGARAANGANDA TERBATAS YANG TELAH MENDAPATKAN SERTIFIKAT BUKTI PENDAFTARAN

Berdasark	an Sertifikat Bukti Pendaftaran dari
Nomor	tanggal bulan tahun
bahwa	berstatus Warga Negara Indonesia dan Warga
Negara	sampai berusia 21 tahun.
	20

Peiabat Pencatatan Sipil

NIP

Formulir 39 - Catatan Pinggir Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang Telah Mendapatkan Sertifikat Bukti Pendaftaran, dengan 4) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan (WNI atau warga negara asing), dengan kode CP.13

GANDA Y	ANAK BERKEWARGANEGARAAN YANG TELAH MEMILIH KEWARGANEGARAAN
7.500 (1000)	hun bahwa telah
memilih menjadi Warg	a rvegara

Pelabat Pencatatan Sipil ...

Formulir 40 - Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilihkewarganegaraan (WNI atau warga negara asing), dengan kode CP-2.13

5) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih kewarganegaraan, dengan kode CP.14

NIP

	CATATAN PINGGIR ERKEWARGANEGARAAN GANDA AK MEMILIH KEWARGANEGARAAN
Berdasarkan Keputusan bahwa	
	20
	Pejabat Pencatatan Sipil
	MID

Formulir 41 - Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih kewarganegaraan, dengan kode CP.14

d. Formulir Permohonan Pelepasan Kewarganegaraan, sebagai berikut:

n R I Kepada Yth Menteri (yang membidan kewarganegaraan) melalui Kepa Perwakilan Republik Indonesia di
nř.
201
9
9
2
3
1
*
1
*
an melepaskan kewarganegaraan R I menja kan surat/keputusan

Formulir 42 - Surat permohonan pelepasan kewaganegaraan

 Formulir hasil pelayanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa surat keterangan pelepasan kewarganegaraan dengan kode F-2.28, sebagai berikut:

ada hari ini tanggal. Pejabat ipil. elepasan kewarganegaraan Repul ari;			tal	menerim	, Saya Pencatatan a Iaporan
Pejabat ipilelepasan kewarganegaraan Reput			, telah	menerim	Pencatatan a laporan
ipilelepasan kewarganegaraan Repul	blik Indo	onesia mer	., telah ijadi Warga	menerim Negara	a laporan
elepasan kewarganegaraan Reput	blik Inde	onesia men	jedi Warga	Negara	
eri;					
lama IIK	1				
iomor Dokumen Perjalanan RI	- 00				
empat tanggal lahir	27				
empat tanggar ianir enis kelamin	- 41				
ekeriaan	- 1				
gama	- 1				
eperceysan Terhadap Tuhan YME					
Jamet Baru	20				
lo. Pespor Beru	-				
to Akta Kelah iran *	1				
lo Akta Perkawinan *	9				
lama Suami/Istri*	-				
IIK Suami/Istri*	1				
lamat terakhir di Indonesia *					
to. Paspor Republik Indone sta	-				
erdasarkan surat/keputusan.	momenco	0000001000	No.	mor	
aneral		MAIL THAT TO THE			
entang					
			14		20
					en-ul
			Pejabat F	encatatan :	SIMIL

Formulir 43 - Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan dengan kode F-2.28

M. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pencatatan peristiwa penting lainnya antara lain perubahan jenis kelamin dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan memenuhi persyaratan, tata cara dan formulir yang digunakan dalam pencatatan peristiwa penting lainnya.

1. Dasar Hukum Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

- a. Pasal 56 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Th 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
- b. Pasal 102 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
- c. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
- d. Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

2. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

a. Persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya;
- Kutipan akta pencatatan sipil; dan
- Fotokopi Kartu Keluarga.

b. Tata Cara Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan kode F-2.01 serta menyerahkan persyaratan;
- Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan.

Catatan:

- Fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01, Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli dan tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
- Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;

- Pejabat pencatatan sipil pada disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil; dan
- Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan dengan menggunakan formulir yang terdiri dari:

- Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01.
- Formulir hasil pelayanan pencatatan peristiwa penting lainnya berupa catatan pinggir mengenai peristiwa penting lainnya pada akta pencatatan sipil dengan kode CP.15.

3. Lampiran Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

- a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB III Poin A Angka 4 Huruf a Buku Petunjuk Teknis ini).
- Catatan pinggir mengenai peristiwa penting lainnya pada akta pencatatan sipil dengan kode CP.15, sebagai berikut:

and the second second second	IAIAN PINGGIR
PERUBAHA	AN PERISTIWA PENTING LAINNYA
Berdasarkan Penetapan	Pengadilan Negeri
	tanggal bulanbahwa nama
	merubah jenis kelamin dari bulan
	20
	Pejabat Pencatatan Sipil
	Pejabat Pencatatan Sipil

Formulir 44 - Catatan Pinggir Perubahan Peristiwa Penting Lainnya, dengan kode CP-2.15

N. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dapat dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka, dalam perkembangannya juga dapat dilakukan pencatatan pembetulan nama pada akta pencatatan sipil tanpa melalui penetapan pengadilan/asas Contrarius Actus, penjelasan terkait Contrarius Actus dibahas dalam BAB IV Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil ini. Pembetulan akta pencatatan sipil tanpa melalui penetapan pengadilan dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian penulisan nama pada akta pencatatan sipil dengan dokumen identitas lainnya, misalnya ijazah, buku nikah dan paspor.

1. Dasar Hukum Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

- a. Pasal 71 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Th 2006/Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
- b. Pasal 102 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
- c. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
- d. Pasal 86, Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 88 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

2. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

a. Persyaratan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dengan permohonan dari subjek akta dilaksanakan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia di tempat penduduk berdomisili. Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dengan permohonan dari subjek akta dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- Fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil; dan
- Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

b. Tata Cara Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dengan permohonan dari subjek akta tanpa penetapan pengadilan (asas Contrarius Actus) dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisli atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan tata cara sebagai berikut:

Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan kode
 F-2.01 atau F-2.02 serta menyerahkan persyaratan;

Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01, tidak menarik dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil asli, tidak perlu KTP-el saksi dan ayah, ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur), karena identitas saksi dan ayah, ibu atau wali sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

- Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Repubulik Indonesia di luar negeri melakukan perekaman data kedalam basis data kependudukan;
- Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil mengenai pembetulan akta;
- Pejabat pencatatan sipil menerbitkan kembali kutipan akta pencatatan sipil dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil dari subjek akta; dan
- Kutipan akta pencatatan sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon.

c. Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Pembetulan Pencatatan Sipil

Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dengan permohonan dari subjek akta dilakukan dengan menggunakan formulir yang terdiri dari:

- Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI dengan kode F-2.01 atau Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI F-2.02.
- Formulir hasil pelayanan pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil, dengan kode CP:16.

- Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
 - a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode
 F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 27, BAB III Poin A Angka 4 Huruf a
 Buku Petunjuk Teknis ini).
 - Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02 (Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB III Poin A Angka 4 Huruf a Buku Petunjuk Teknis ini).
 - Formulir hasil pelayanan pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dengan kode CP.16, sebagai berikut:

CATATAN	PINGGIR
PEMBETULAN AKTA	PENCATATAN SIPIL

	persyaratan an pembetular		
ri	an pemberaiai		
The state of the s	 		
			20
			tatan Sipil
	Pej	abat renta	tatan sipin

Formulir 45 - Catatan Pinggir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, dengan kode CP-2.16

O. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil merupakan salah satu subsistem pencatatan sipil di Indonesia. Pengaturan mengenai pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil juga dapat dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan/Contrarius Actus diatur dalam Pasal 89 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Penjelasan terkait Contrarius Actus dibahas dalam BAB IV Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil ini.

1. Dasar Hukum Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

- a. Pasal 72 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006/Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
- b. Pasal 102 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
- c. Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
- d. Pasal 89 ayat (1),(2),(3) dan ayat (4) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

Pencatatan Pembataian Akta Pencatatan Sipil Berdasarkan Penetapan Pengadilan

a. Persyaratan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan penetapan pengadilan dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisili. Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, dengan memenuhi persyaratan berupa:

- Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan;
- Fotokopi Kartu Keluarga.

b. Tata Cara Pencatatan Pembatalan Pencatatan Sipil

Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisili dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan kode F-2.01serta menyerahkan persyaratan;
- Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.

Catatan:

Fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01, tidak menarik salinan putusan pengadilan asli, tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

- Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
- Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;
- Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencabut kutipan akta pencatatan sipil;
- 6) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan putusan pengadilan.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pembatalan Pencatatan Sipil

Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan menggunakan formulir yang terdiri dari:

- Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengan kode F-2.01.
- Formulir hasil pelayanan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan penetapan pengadilan, dengan kode CP.17.

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Penetapan Pengadilan (Contrarius Actus)

Selain melalui penetapan pengadilan pembatalan dapat dilakukan dengan cara contrarius actus yaitu dengan tata cara pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan. Penjelasan terkait Contrarius Actus lebih lanjut dibahas dalam BAB IV Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil Ini.

a. Persyaratan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Penetapan Pengadilan

Persyaratan dalam pembatalan tanpa penetapan pengadilan dapat memenuhi persyaratan:

- 1) Kutipan akta pencatatan sipil yang akan dibatalkan;
- 2) Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
- 3) Kartu Keluarga;
- 4) KTP-el: atau
- 5) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Tata Cara Pencatatan Pembatalan Pencatatan Sipil Tanpa Penetapan Pengadilan

Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara: membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil; mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; menerbitkan register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan putusan pengadilan.

- Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
 - a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB III Poin A Angka 4 Huruf a Buku Petunjuk Teknis ini).
 - Formulir hasil pelayanan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan penetapan pengadilan, dengan kode CP.17, sebagai berikut:

PENCATATAN PEMB	TATAN PINGGIR ATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL IETAPAN/PUTUSAN PENGADILAN
Berdasarkan penetapa	n/putusan pengadilan
Nomordilakukan Pembatalan	tanggal, telah Akta Nomor
tanggal	20
	Pejabat Pencatatan Sipil
	NIP

Formulir 46 - Catatan Pinggir Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Berdasarkan Penetapan/Putusan Pengadilan, dengan kode CP-2.17

P. Pencatatan Perjanjian Perkawinan

Pencatatan perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili.

1. Dasar Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan

- a. Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
- b. Pasal 98, Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
- c. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

2. Pencatatan Perjanjian Perkawinan

a. Persyaratan Pencatatan Perjanjian Perkawinan

Pencatatan Pencatatan perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat di wilayah NKRI dan/atau di luar wilayah perjanjian perkawinan dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- Fotokopi akta perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Kutipan akta perkawinan suami dan isteri atau nama lain yang diterbitkan oleh negara lain;
- 3) KTP-el; dan
- Fotokopi Kartu Keluarga.

b. Tata Cara Pencatatan Perjanjian Perkawinan

Pencatatan Pencatatan perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat di wilayah NKRI dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:

- Pelapor mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
- Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

- Petugas pada disdukcapil Kabupaten/Kota atau upt disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data formulir pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- 4) Pejabat pencatatan sipil pada disdukcapil Kabupaten/Kota atau upt disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register akta perkawinan dan kutipan perkawinan atau menerbitkan surat keterangan jika pencatatan perkawinannya dilakukan di negara lain; dan
- Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau surat keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Perjanjian Perkawinan

- Formulir pengajuan pelayanan pencatatan perjanjian perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.01, terlampir.
- Formulir hasil pelayanan pencatatan perjanjian perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari:
 - a) Surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan, dengan kode F-2.07.
 - b) Surat keterangan perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan, dengan kode F-2.08 sebagai berikut:
 - c) Catatan pinggir perjanjian perkawinan yang Dibuat Sebelum dan Pada Saat Dicatatkan Perkawinan Pada Register dan Kutipan Akta Perkawinan, dengan kode F-2.19 sebagai berikut:
 - d) Catatan pinggir perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan pada register dan kutipan akta perkawinan, dengan kode F-2.20 sebagai berikut:
 - e) Catatan pinggir perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan pada register dan kutipan akta perkawinan, dengan kode F-2.21 sebagai berikut:

3. Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Perjanjian Perkawinan

- Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode
 F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 27, BAB III Poin A Angka 4 Huruf a Buku Petunjuk Teknis Ini).
- Formulir hasil pelayanan pencatatan perjanjian perkawinan di wilayah Negara
 Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari:
 - Surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan, dengan kode
 F-2.07 sebagai berikut:

	ACTIVITY A STATE CONTRACTOR AND ADMINISTRACT.
SURAT KETERANGAN	PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN Iomor:
ejabat Pencatatan Sipil	bulan tahun Saya telah menerima laporan perjanjian talam akta perkawinan /nama tain yang diterbitkan Nomor tanggal
lama (Laki-laki)	
IIK	. 4
tomor Dokumen Perjalanan R	
empat tanggal lahir	
ekerjaan	1
gama/Penghayat Kepercayaa	10
Jamat	
Cewarganegaraan	.3
lama Ayah	1.0
lama Ibu	T_
	Dongan .
lama (Perempuan)	
IIK	0
lomor Dokumen Perjalanan R	I.B.
empat tanggal lahir Pekagaan	3
gama/Penghayat Kepercayaa	30 -
damat	
Cewasganegaraan	
łama Ayah	
fama Ibu	
	to the state of th
Aerujuk pada akta perjanjian lihadapan Notaris	perkawinan nemor tanggal yang dibua yang berkedudukan di
Pelaporan perjanjian perkawi Pelaporan Pencatatan Perkaw anggal	nan ini disertakan pula dengan Surat Keterangar rinan WNI diluar Wilayah NKRI nomoc
	20
	Pejabat Pencatatan Sipit
	NIP

Formulir 47 - Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan, dengan kode F-2.07

 Surat keterangan perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan, dengan kode F-2.08 sebagai berikut:

	MKOTA
SUBATION	RANGAN PERUBAHAN /
	PERJANJIAN PERKAWINAN
9,000	or
Pejabat Pencatatan Sipil. perubahan/pencabutan perjanjan	bulan tahun Saya telah menerima Saporan perkawinan untuk disertakan dalam akta dikan oleh Negara antara:
Nama (Laki-laki)	
NBC	2
	(\$)
Nomor Dokumen Perjalanan RI	
Tempat tanggal lahir	4
Pekerjaan	3
Agama/Penghayat Kepercayaan	13
Alamat	i i
Kewarganegaraan	1
Nama Ayah	1
Nama ibu	The state of the s
530 1000	Dengan
Nama (Perempuan)	
NIIC	1
Nomor Dokumen Perjalanan R.I.	+
Tempat tanggal lahir	2
Pekerjaan	3
Agama/Penghayat Kepercayaan	- 8
Alamat	3
Kewarganegaraan	
Nama Ayah	9
Nama Ru	*
realine not	
Merujuk pada akta perjanjian peri dinadapan Notaris	kawinan nomor tanggai yang dibuat yang berkedudukan di
Pelaporan perubahan/pencabula dengan Surat Keterangan Pelapor NKRI nomor	n perjanjian perkawinan ini disertakan pula ran Pencatatan Perkawinan WM diluar Wilayah
	Pejapat Pencatatan Sipil
	NIP
*) Pilihan	4.500
A Property of the Control of the Con	

Formulir 48 - Surat Keterangan Perubahan/Pencabutan Perjanjian Perkawinan, dengan kode F-2.08

 Catatan pinggir perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dan pada saat dicatatkan perkawinan pada register dan kutipan akta perkawinan, dengan kode CP.19 sebagai berikut:

CP-2.19

CATATAN PINGGIR PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SEBELUM DAN PADA SAAT DICATATKAN PERKAWINAN PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

Lampiran Perjanjian Perkawinan Mariage Agreement Attachment Notaris Notary Namar Number Tanggal Date

Formulir 49 - Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Sebelum dan Pada Saat Dicatatkan Perkawinan Pada Register dan Kutipan Akta Perkawinan, dengan kode CP.19

 Catatan pinggir perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan pada register dan kutipan akta perkawinan, dengan kode CP.20 sebagai berikut

CP-2.20

CATATAN PINGGIR PERIANJIAN PERKAWINAN SELAMA DALAM IKATAN PERKAWINAN PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor tanggal bulan tahun yang dibuat dihadapan Notaris yang berkeduukan di telah mengadakan kesepakatan bersama atas perjanjian perkawinan sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

> Pejabat Pencatatan Sipil NIP

Formulir 50 - Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan Selama Dalam Ikatan Perkawinan Pada Register dan Kutipan Akta Perkawinan, dengan kode CP.20

 Catatan pinggir perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan pada register dan kutipan akta perkawinan, dengan kode CP.21 sebagai berikut:

				CP-2.21	
CA	TATA	N PI	NGGI	R	
PERUBAHAN/P	ENC	ABUT	AN .	PERJAN	MAIL
PERKAWIN					
KUTIPAN	202000000000000000000000000000000000000				4.7
Berdasarkan a	kta	perj	anjian	perka	winan
Nomor				t	anggal
	. ь	ulan			tahun
			dibuat	t diha	dapan
Notaris					
		tela	h	dila	kukan
perubahan/pen	cabu	tan*)		atas	akta
perjanjian p	erka	winar	1 1	Nomor	
tanggal bu	lan		tahu	n	yang
dibuat dihaday	pan	Note	aris		yang
berkedudukan d	dī				
				20.	
				atan Sip	
	30011111				
	NIP		eternion.		

Formulir 51 - Catatan Pinggir Perubahan/Pencabutan Perjanjian Perkawinan Pada Register dan Kutipan Akta Perkawinan, dengan kode CP.21

- Q. Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian
 - Dasar Hukum Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian
 - a. Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
 - b. Pasal 95, Pasal 96 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
 - c. Pasal 6, Pasal 7 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019
 - Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian
 - a. Persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak
 Memiliki Dokumen Keimigrasian

Peristiwa penting yang dialami oleh orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilaporkan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat terjadinya peristiwa penting. Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa bukti peristiwa penting yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan terjadinya peristiwa penting.

 Tata Cara Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian

Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat terjadinya peristiwa penting, dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta menyerahkan persyaratan
- Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

- Bukti peristiwa penting yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan terjadinya peristiwa penting berupa fotokopi, asli hanya diperlihatkan dan Dinas tidak mengambil bukti peristiwa penting yang asli.
- Petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan dan pencetakan dokumen;

- Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat terjadinya peristiwa penting menerbitkan surat keterangan peristiwa penting; dan
- Surat keterangan peristiwa penting diserahkan kepada Pemohon.

Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian

Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dilakukan dengan menggunakan formulir yang terdiri dari:

- Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengan kode F-2.01.
- Formulir hasil pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh orang asing yang tidak memiliki dokumen kelmigrasian di wilayah NKRI, berupa surat keterangan, dengan kode CP.13.

Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian

- a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB III Poin A Angka 4 Huruf a Buku Petunjuk Teknis ini).
- Surat keterangan pencatatan sipil bagi orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian, dengan kode formular CP.13, sebagai berikut:

Control of the Control of Control		ITAN SIPIL BAGI ORANG ASING OKUMEN KEIMIGRASIAN
lerdasarkan laporan dari	7	
lama		
anggal lahir/umur	8	
(ewarganegaraan		
lamat di Indonesia	1	
ahwa pada		
lari		
anggal	- P	
elah terjadi peristiwa	ata:	E .
lama		801
anggal tahir/umur	1	
iewarganegaraan	4	
lamat di Indonesia	3	
engan:")		
lama	5	
anggal lahir/unsur	7	
ewarganegaraan	-	
damat di Indonesia	3	
		20
		Pejabat Pencatatan Sipil
) untuk peristiwa perkawina	n	

Formulir 52 - Surat Keterangan Pencatatan Sipil Bagi Orang Asing yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian, dengan kode CP-2.13

R. Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar Negeri

Peristiwa penting dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat belum dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dilaporkan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili.

1. Dasar Hukum Pencatatan Peristiwa Penting dari Luar Negeri

- a. Pasal 56, Pasal 57, Pasal 64, Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
- b. Pasal 7, Pasal 85 ayat (3), Pasal 97 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019
- c. Pasal 6, Pasal 7 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

2. Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar Negeri

a. Persyaratan Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar Negeri

Pencatatan peristiwa penting dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat namun belum dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

- Fotokopi bukti pencatatan peristiwa penting yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, atau
- 2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak
- Fotokopi Kartu Keluarga

b. Tata Cara Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar Negeri

Pencatatan peristiwa penting dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonc a yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat belum dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan.
- Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan.
- Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman pelaporan dalam basis data kependudukan.

- Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan pelaporan.
- Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar Negeri

Pencatatan peristiwa penting dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaporkan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisli untuk melakukan pencatatan dengan mengguriakan formulir yang terdiri dari:

- Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengan kode F-2.01.
- 2) Formulir hasil pelayanan pelaporan peristiwa penting dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisli, berupa surat keterangan pelaporan pencatatan sipil dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.12.

- Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar Negeri
 - Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode
 F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 27, BAB III Poin A Angka 4 Huruf a Buku Petunjuk Teknis ini).
 - b. Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.12 sebagai berikut:

SURAT	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		ELAPORAN R WILAYA		ATAN SIPIL	
		No	mor:			
Dengan ini menera	ngkan d luar	telah wilayah	menerima NKRI, atas r	pelaporar sama:	n pencatatan	peristiwa
Nama NIK Alamat		:				
Pencatutan					dilaksanakan V	pada
diterbitikan oleh Republik Indonesia Pelaporan Pencatata tanggal Surat Keterangan ini t	n Sipil	đi li	dan ta uar Wilaya	elah dilapor sebagain h NKRI	rkan ke Kantor nana Surat	Perwakian Keterangan
The Device of the County						70

Formulir 53 - Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil, dengan kode F-2.12

BAB IV

PENYELESAIAN MASALAH PENCATATAN SIPIL

A. Asas Hukum Contrarius Actus.

1. Pengertian

Asas Contrarius Actus adalah asas yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dapat berwenang membatalkan atau memperbaiki secara langsung tanpa harus menunggu pihak lain keberatan atau mengalukan gugatan.

2. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pembatalan akta pencatatan sipil dapat melalui pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan atau atasan pejabat yang menetapkan keputusan dalam instansi ini adalah Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota setempat dan Pasal 89 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3. Prinsip dasar

- a. Contrarius Actus melekat pada Jabatan bukan pada pejabat, sehingga Contrarius Actus dapat dilakukan pada jabatan dalam kurun waktu masa jabatan pejabat lain.
- b. Tidak menunda pelaksanaan keputusan pejabat TUN sampai pengadilan membuktikan sebaliknya.
- c. Batasan Untuk Penggunaan Contrarius Actus Ketetapan mengenai Batasan pembatalan tercantum pada pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: "Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pembatalan."
- 4. Contoh Penerapan Kasus di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri Sejak tahun 2020 Disdukcapil Kabupaten Wonogiri telah menyelesaikan kasus pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus sebanyak 28 kasus. Uraian data kuantitas kasus tersebut meliputi:
 - a. Tahun 2020 terdapat 4 kasus, dengan 1 kasus pembatalan akta kelahiran dan 3 kasus pembatalan akta kematian.

- b. Tahun 2021 terdapat 13 kasus, dengan 2 kasus pembatalan akta kelahiran dan 11 kasus pembatalan akta kematian.
- c. Tahun 2022 hingga bulan April terdapat 11 kasus, dengan 4 kasus pembatalan akta kelahiran dan 7 kasus pembatalan akta kematian.

Sampel kasus:

- a. Kutipan akta kematian dengan nama yang tertulis MISNO tidak sah dikarenakan yang bersangkutan masih hidup, terdapat kesalahan pelaporan kematian dari pihak perangkat desa saudara Ferry Iriawan, sehingga MISNO yang masih hidup justru dilaporkan meninggal, maka dari itu akta kematian dengan nomor 3312-KM-29072021-0066 dengan tertulis nama MISNO tidak sah dan dibatalkan.
- b. Kutipan akta kelahiran dengan Nomor akta 3312-LT-25042013-0064 tertulis nama AMIN NUDIN tersebut digunakan untuk kepentingan pendaftaran kepala desa, namun tidak sesuai dengan ijazah yang tertulis AMIN KHUDORI lalu setelah selesai proses pendaftaran kepala desa dan tidak terpilih saudara AMIN KHUDORI ingin mengembalikan akta kelahirannya ke nama semula sesuai dengan ijazah yang ia miliki yaitu AMIN KHUDORI, maka akta kelahiran dengan Nomor akta 3312-LT-25042013-0064 atas nama AMIN NUDIN dibatalkan. Hal ini murni karena kelalaian pihak pelapor untuk mendapatkan akta kelahiran yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.

B. Diskresi

1. Pengertian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Prinsip dasar

Prinsip dasar dalam penggunaan diskresi yang harus dipenuhi oleh pejabat pemerintah adalah:

- a. Sesuai dengan tujuan diskresi;
- Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
- Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
- e. Dilakukan berdasarkan itikad yang baik

Syarat tambahan yang wajib dipenuhi terkait penggunaan diskresi, yakni penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan tersebut dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara.

Setiap penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan tentu memiliki tujuan tersendiri, diantaranya adalah Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, Mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya seperti keadaan bencana alam atau gejolak politik.

4. Contoh Penerapan Diskresi

Dalam hal ini sebagai contoh penerapan diskresi adalah penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, SPTJM adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggung jawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. SPTJM Kebenaran sebagai oleh Istri. adalah pernyataan vang dibuat Pasangan Suami kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang yang di dalam Kartu Keluarga sudah tercantum sebagai Pasangan Suami Istri dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

Dalam pengurusan akta kelahiran, selama ini penduduk sering merasakan kesulitan melengkapi persyaratan surat keterangan lahir dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran terlebih bagi yang mengurus akta kelahiran setelah berusia dewasa. Hal ini disebabkan surat keterangan lahir tersebut tidak ada, hilang atau tidak disimpan baikbaik oleh orangtuanya karena sudah terlalu lama. Apabila tidak memiliki surat keterangan lahir maka persyaratan menjadi tidak lengkap, akhirnya tidak bisa mengurus akta kelahiran. Dengan latar belakang tersebut pemerintah menerbitkan SPTJM sebagai solusi sementara.

SPTJM mulai diberlakukan oleh pemerintah sejak Menteri Dalam Negeri RI menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Permendagri ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah.

Praktik diskresi dalam pelaksanaan pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengakomodir penerimaan berkas belum lengkap untuk tetap diproses dengan dilengkapi selama proses berjalan. Dengan begitu apabila terjadi persyaratan yang belum terpenuhi maka permohonan akan tetap diterima dan diproses sembari masyarakat tersebut melengkapi persyaratan. C. Penggunaan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini berdasarkan Pasal 35 huruf a dan Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan "perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk, yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Contoh implementasi adalah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. yang telah mengabulkan perkawinan beda agama dari pemohon, kemudian memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan perkawinan tersebut.

BAB V PENUTUP

Demikian petunjuk teknis pelayanan pencatatan sipil ini dibuat, untuk menjadi panduan agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dan memberikan pedoman pelaksanaan dalam hal pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pelayanan pencatatan sipil khususnya dalam pelayanan pencatatan sipil kepada masyarakat balk di wilayah NKRI maupun di luar wilayah NKRI. Harapan dengan terbitnya Buku Petunjuk ini dapat meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanogung jawab dalam pelayanan pencatatan sipil dan Memberikan standar yang sama dan terukur bagi petugas di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, UPT Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan petugas pada kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam pelayanan pencatatan sipil dengan berpedoman Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan Sirat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.





DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jl. Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12072 Phone: (021) 79194075

Fax: (021) 7980655, 7949770